

**TRANSFORMASI ADMINISTRASI WILAYAH GRESIK DALAM KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN MASA KOLONIAL (1934-1942) DAN PASCA KEMERDEKAAN
(1950-1974)**

SKRIPSI



Oleh
YULIA WULANDARI
NIM : 211104040029

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
OKTOBER 2025**

**TRANSFORMASI ADMINISTRASI WILAYAH GRESIK DALAM KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN MASA KOLONIAL (1934-1942) DAN PASCA KEMERDEKAAN
(1950-1974)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)

Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Sejarah Peradaban Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh
YULIA WULANDARI
NIM : 211104040029

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
OKTOBER 2025**

**TRANSFORMASI ADMINISTRASI WILAYAH GRESIK DALAM KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN MASA KOLONIAL (1934-1942) DAN PASCA KEMERDEKAAN
(1950-1974)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)

Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Program Studi Sejarah Peradaban Islam

Oleh :

YULIA WULANDARI

NIM : 211104040029

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing :



Ivan Agusta Farizkha, M. T

NIP. 199008172020121004

**TRANSFORMASI ADMINISTRASI WILAYAH GRESIK DALAM KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN MASA KOLONIAL (1934-1942) DAN PASCA KEMERDEKAAN
(1950-1974)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Sejarah Peradaban Islam

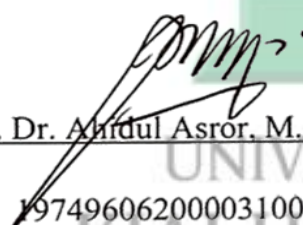
Hari : Jum'at

Tanggal : 17 Oktober 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. Abdul Asror, M.Ag.

NIP. 197496062000031003


M. Al Qautsar Pratama, M.Hum

NIP. 199404152020121005

Anggota :

1. Dr. Win Usuluddin, M.Hum.
2. Ivan Agusta Farizkha, MT

()
()

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۚ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ
مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*

(QS. Ar-Ra'd [13]:11)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemah, & Tajwid, (Bandung, Sygma Creative Media Corp, 2014), 250

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur kehadirat Allah swt., atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis akhirnya dapat merampungkan skripsi ini. Karya ini saya persembahkan kepada Almamater tercinta, Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Seluruh insan akademis dan praktisi Sejarah dan Peradaban Islam di Indonesia, khususnya yang menaruh minat pada kajian sejarah lokal dan administrasi pemerintahan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya yang senantiasa tercurah kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw., yang telah membimbing umat manusia dari kegelapan menuju cahaya Islam. Berkat izin dan ridha-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “*Transformasi Administrasi Wilayah Gresik dalam Kebijakan Pemerintahan Masa Kolonial (1934-1942) dan Pasca Kemerdekaan (1950-1974)*” yang diajukan kepada Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Perjalanan penyusunan skripsi ini penuh tantangan dan memerlukan kerja keras serta ketekunan, yang tentunya tidak dapat penulis lalui tanpa dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag., dan seluruh jajaran Dekanat yang lain atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam pada Program Sarjana Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

3. Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Dr. Win Ushuluddin, M.Hum., atas bimbingan dan motivasi yang diberikan selama proses perkuliahan.
4. Koordinator Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam Dr. Akhiyat, S.Ag., M.Pd. atas bimbingan, motivasi serta diskusi-diskusi yang menarik dan membangun selama proses perkuliahan.
5. Dosen Pembimbing Skripsi Ivan Agusta Farizkha, M. T., yang selalu memberikan motivasi dan meyakinkan penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan, saran, bantuan, dan motivasi beliau penulisan skripsi ini tidak akan selesai.
6. Seluruh dosen di Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang dengan sukarela mentransfer, membagi teori-teori dan ilmu-ilmu serta pengalamannya selama proses perkuliahan.
7. Seluruh pegawai dan karyawan di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas informasi-informasi yang diberikan yang sangat membantu penulis mulai dari awal kuliah sampai bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Kepada Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Gunari dan Ibu Marina, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah. Terima kasih atas do'a yang tak pernah putus, cinta tanpa syarat, dan pengorbanan tanpa lelah demi pendidikan anakmu. Semoga Allah membalas semua kebaikan dengan keberkahan, kesehatan, dan usia yang panjang. Tak lupa untuk Adikku tersayang, Mohammad Jefri, yang diam-diam selalu memberi semangat. Terima

kasih atas kehadiran, senyum, dan kebersamaan yang menjadi pelengkap perjalanan ini.

9. Seluruh narasumber yang telah bersedia membantu memberikan informasi mengenai data yang dibutuhkan penulis dalam proses penelitian skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Terimakasih pada seluruh teman-teman mahasiswa Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam terutama kelas SPI 1 angkatan 21 atas bantuan dan berbagai dukungan semenjak awal masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi.
11. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis, Dinda Audina Z., Hilda Sania S., Masturoh, Rosa Maulidya R., Erlynda Nailatasari, Hanum Marda U., Rodiah Fitriana, Nailiyatun N., Saqinatus S., dan Teman-teman KKN Posko 14, yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama proses penelitian hingga selesai.

Akhirnya tiada balasan yang dapat penulis berikan kecuali do'a, semoga amal baik yang telah dilakukan mendapat balasan yang sebaik-baiknya dan semoga Allah swt selalu memberikan kemudahan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, atas segala kekurangan serta kekhilafan yang ada, dengan sepenuh hati penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya.

Jember, 3 Oktober 2025

Penulis

ABSTRAK

Yulia Wulandari, 2025. *“Transformasi Administrasi Wilayah Gresik dalam Kebijakan Pemerintahan Masa Kolonial (1934-1942) dan Pasca Kemerdekaan (1950-1974)”*

Transformasi administratif wilayah Gresik merupakan proses yang dipengaruhi oleh dinamika kebijakan pemerintahan dari masa kolonial hingga Orde Baru. Perubahan ini bermula dari penghapusan status Kabupaten Gresik pada tahun 1934 dan penggabungannya ke dalam Kabupaten Surabaya, hingga pengembalian status Gresik sebagai kabupaten mandiri pada tahun 1974. Momentum ini menjadi titik balik penting dalam struktur pemerintahan lokal dan menandai awal dari proses pembangunan wilayah yang lebih terfokus di Gresik.

Fokus penelitian dalam skripsi ini dibagi menjadi dua, yaitu: 1) Bagaimana kebijakan pemerintah selama proses Perubahan Administrasi Wilayah Gresik: sentralisasi kolonial (1934-1942) dan peneguhan kabupaten (1950-1974)? Bagaimana kondisi dan dampak kehidupan sosial, dan ekonomi masyarakat Gresik selama masa transformasi administrasi Gresik? Berdasarkan fokus tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mengetahui kebijakan pemerintah selama proses Perubahan Administrasi Wilayah Gresik: sentralisasi kolonial (1934-1942) dan peneguhan kabupaten (1950-1974). 2) Menjelaskan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat lokal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan. Metode penelitian sejarah meliputi : heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber (verifikasi), interpretasi (menafsirkan informasi yang diperoleh), dan historiografi (penulisan sejarah).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan administratif Gresik bersifat multidimensional: politis, ekonomis, dan simbolis. Pada masa kolonial, Gresik mengalami subordinasi dalam sistem pemerintahan sentralistik Belanda; sedangkan pada masa pasca-kemerdekaan, wilayah ini bertransformasi menjadi pusat industri dan pemerintahan daerah yang mandiri. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dampak perubahan administratif tidak sekadar pergeseran birokratis, tetapi juga menjadi faktor penting dalam transformasi sosial, ekonomi, dan demografis masyarakat Gresik, yang tetap relevan dalam memahami perkembangan kawasan pesisir Jawa Timur.

Kata Kunci : Transformasi Administrasi, Kebijakan Pemerintah, Dampak Sosial Ekonomi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Kerangka Konseptual.....	14
H. Metode Penelitian	23
I. Sistematika Pembahasan	27
BAB II PERUBAHAN ADMINISTRASI WILAYAH GRESIK: SENTRALISASI KOLONIAL DAN PENEGUHAN KABUPATEN	29
A. Status Administrasi Pemerintahan Gresik Pra 1934	29
B. Periode I (1934–1942): Penghapusan Kabupaten Gresik dan Sentralisasi Pemerintahan Kolonial	39

C. Periode II: Peneguhan Status Kabupaten Gresik dalam Pemerintahan Republik Indonesia (1950–1974).....	62
BAB III KONDISI DAN DAMPAK SOSIAL EKONOMI TRANSFORMASI ADMINISTRASI WILAYAH GRESIK TAHUN (1934-1942) DAN (1950-1974).....	75
A. Sejarah Kondisi Geografis, Ekonomi dan Sosial Gresik	75
1. Kondisi Geografis	75
2. Kondisi Ekonomi	78
3. Kondisi Sosial	85
B. Kondisi dan Dampak Sosial Ekonomi Selama Proses Tranformasi Wilayah Gresik	90
1. Kondisi dan Dampak Sosial terhadap Masyarakat Gresik.....	90
2. Kondisi dan Dampak Ekonomi terhadap Masyarakat Gresik	96
BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	112
BIODATA PENULIS.....	128

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Gambar 2.1 Peta wilayah Gresik pada tahun 1724 yang diambil dari karya "Oud en Nieuw Oost-Indiën" oleh François Valentyn	32
Gambar 2.2 Sketsa Peta Kota Gresik tahun 1770 memperlihatkan letak pendopo bupati (dalam) yang masih berada di sisi pojok utara alun-alun kota, menandai pusat pemerintahan tradisional masa itu	34
Gambar 2.3 Peta Gresik pada tahun 1928.....	36
Gambar 2.4 Staatsblad van Nederlandsch-Indië Tahun 1934 No. 749.....	43
Gambar 2.5 Peta Gresik setelah digabungkan dengan Kabupaten Surabaya pada tahun 1937	50
Gambar 2.6 Pendopo Kabupaten Surabaya di Genteng kali.....	55
Gambar 2.7 Situasi luar Pabrik Semen Gresik tahun 1955.....	65
Gambar 2.8 Peresmian Pabrik Semen Gresik oleh Soekarno Tahun 1957	66
Gambar 2.9 PT. Petrokimia di Gresik pada Tahun 1970	69
Gambar 2.10 Peraturan Pemerintah no. 38 tahun 1974	70
Gambar 3.1 Pemandangan pelabuhan Gresik yang sangat ramai dengan pemukiman disepanjang pantai pada tahun 1775-1778.....	83
Gambar 3.2 Denah Kota Gresik tahun 1824 menggambarkan tata ruang kota, lengkap dengan alun-alun dan permukiman	86
Gambar 3.3 Rumah dinas Karyawan Pabrik Semen Gresik tahun 1957	93
Gambar 3.4 Grafik kepadudukan Kabupaten Surabaya tahun 1961- 1969	94

DAFTAR TABEL

Tabel

Tabel 2.1 Struktur Pemerintahan Afdeling Gresik dan Kabupaten Gresik tahun 1931.....	38
Tabel 2.2 Struktur Pemerintahan Kabupaten Surabaya pada Tahun 1941	59
Tabel 2.3 Daftar Kebijakan Pemerintah dalam Transformasi Administrasi Gresik-Surabaya 1934-1942.....	60
Tabel 2.4 Daftar Kebijakan Pemerintah dalam Transformasi Administrasi Surabaya-Gresik 1934-1942.....	73
Tabel 3.1 Aktifitas Pelabuhan dagang VOC di kawasan Pantai Utara tahun 1774-1775.....	82
Tabel 3.2 Banyaknya perusahaan di Kabupaten Surabaya (Gresik) tahun 1963.....	99



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sejak Abad XIV M, Kabupaten Gresik adalah salah satu kota bandar yang telah menjadi tempat persinggahan bagi kapal-kapal dagang yang datang dari berbagai wilayah. Pada Abad XV M, Pelabuhan Gresik telah tumbuh menjadi salah satu pelabuhan paling ramai dan makmur, didorong oleh aktivitas perdagangan yang melibatkan wilayah-wilayah di luar Pulau Gresik hingga lintas benua. Berbagai pedagang dari beragam daerah di dunia singgah di pelabuhan ini misalnya Cina, Gujarat, Bangelan Siam, Calicut, dan Liu Kiu, serta para pedagang yang menghubungkan Gresik dengan Maluku dan Banda. Peran Pelabuhan Gresik sangat penting, bahkan mampu bersaing dengan pelabuhan besar di sekitarnya yang lebih dulu berdiri, seperti Pelabuhan Tuban, hingga Abad XVI M. Pelabuhan Gresik terus mempertahankan posisinya sebagai pusat perdagangan yang kuat di tingkat lokal, regional, dan internasional, karena lokasi strategis Nusantara di bagian timur yang menjadi simpul rute perdagangan antara Eropa dan Asia Tengah.¹

Kabupaten Gresik pada Abad XVI M memiliki peran yang sangat signifikan dalam dunia pelayaran dan perdagangan di Nusantara. Letaknya yang strategis di pesisir utara Laut Jawa menjadikannya jalur perdagangan utama yang menghubungkan berbagai wilayah, baik dalam skala lokal maupun internasional. Keunggulan geografis Gresik didukung oleh kondisi tanahnya yang berbatu, yang secara alami mencegah pendangkalan pantai dan mempermudah kapal-kapal untuk bersandar. Selain itu, posisi

¹ Uswatun Hasanah, "Syahbandar Perempuan Nyai Ageng Pinatih di Gresik, Jawa Timur (Peran dan Kontribusinya Bagi Sumber Belajar Sejarah di SMA)", (Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha, 2020), 3

Gresik yang berada di antara dua muara sungai besar, yaitu Sungai Bengawan Solo di sebelah barat dan Sungai Brantas di sebelah timur, semakin mengukuhkan perannya sebagai pusat perdagangan maritim. Aktivitas pelayaran dan perdagangan di kota ini terkonsentrasi di dua pelabuhan utama, yakni Pelabuhan Gresik yang terletak di Desa Karang Kiring dan menghadap ke Sungai Lamong, serta Pelabuhan Jaratan yang berada di Desa Mengare dan berbatasan langsung dengan Sungai Bengawan Solo. Kedua pelabuhan ini memainkan peran krusial dalam mendukung arus barang dan mobilitas pedagang yang menjadikan Gresik sebagai salah satu kota dagang terpenting di Nusantara pada masa itu.²

Gresik berkembang menjadi kota pelabuhan dan pusat perdagangan yang mendorong pertumbuhan pusat kota serta permukiman di sepanjang pantai. Permukiman ini terletak di dekat Pelabuhan Gresik, terutama di Desa Karang Kiring. Area tersebut dihuni oleh penduduk lokal dan penumpang kapal dari berbagai pulau dan negara, seperti Arab, Tiongkok, dan Madura. Banyak pedagang dari kelompok ini memutuskan untuk tinggal dan menikah dengan warga setempat. Permukiman ini berbentuk kampung yang diberi nama sesuai dengan etnis atau pekerjaan penghuninya, seperti Pecinan, Kampung Arab, dan Kampung Kemas, yang kemudian menjadi pola awal permukiman di Gresik. Kehadiran kolonial mulai mempengaruhi Gresik sejak tahun 1746, saat pemerintah kolonial Belanda mengatur pembagian permukiman di wilayah jajahannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (*Regerings Reglement*) tahun 1854. Permukiman di Gresik juga mengalami perkembangan, termasuk penggunaan batu bata untuk rumah-rumah elit pribumi dan rumah orang asing.³

² Meytha Aisyi Muniroh, "Industrialisasi dan Perkembangan Perumahan di Gresik (1957-1993)", (Skripsi, Universitas Airlangga, 2015), 1

³ Meytha Aisyi Muniroh, *Industrialisasi dan Perkembangan Perumahan di Gresik*, 2

Perkembangan Kota Gresik pada awal Abad XX M, mengalami kemunduran sebagai pusat pemerintahan. Penurunan ini terjadi akibat kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang lebih mengutamakan pembangunan pelabuhan modern. Surabaya akhirnya ditetapkan sebagai pelabuhan utama. Akibatnya, banyak pedagang yang beralih ke Surabaya untuk melakukan aktivitas perdagangan. Pada periode tersebut, Gresik berfungsi sebagai kota penyangga bagi Surabaya dan hanya berperan sebagai pelabuhan lokal, tidak lagi menjadi pelabuhan internasional seperti pada Abad XVIII hingga Abad XIX. Kemunduran ini mencapai puncaknya pada tahun 1934 ketika status Gresik sebagai kabupaten secara resmi dihapus, dan kota ini dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Surabaya dengan status sebagai kewedanan.⁴

Kondisi geografi Kota Gresik dan wilayah sekitarnya, yang didominasi oleh kawasan karang serta batu kapur yang kurang cocok untuk pertanian, ternyata tidak menjadi hambatan bagi penduduk setempat. Sebaliknya, tantangan geografis ini justru membawa keuntungan tersendiri bagi masyarakat Gresik. Seiring berjalannya waktu, kondisi alam yang menantang tersebut justru mendorong perluasan wilayah kota serta mempercepat perubahan sosial yang signifikan. Pengaruh geografis ini berkontribusi besar dalam dinamika kehidupan masyarakat, yang awalnya didominasi oleh petani, nelayan, dan industri rumahan, kemudian beralih menjadi masyarakat yang bergantung pada sektor industri besar dan perdagangan. Kota Gresik yang sebelumnya berkembang secara stagnan mulai mengalami kebangkitan kembali. Fenomena ini mulai terlihat sejak tahun 1953 dengan berdirinya Pabrik Semen Gresik, yang kemudian diikuti oleh terbentuknya komunitas Semen Gresik pada tahun 1959. Peristiwa ini menjadi titik awal industrialisasi di Gresik, mengukuhkan kota ini sebagai pusat industri di Jawa

⁴ Eko Jarwanto, *Gresik Punya Cerita Peran Gresik dalam Lintasan Sejarah Nusantara*, (Gresik: Yayasan Mataseger, 2022), 219

Timur dan membentuk masyarakat industri dengan karakteristik yang berbeda dari masyarakat agraris sebelumnya.⁵

Keberadaan pabrik semen di Gresik telah memberikan kontribusi besar terhadap ekspansi kota ini. Daerah Kebomas, yang sebelumnya merupakan lahan kosong, mengalami perkembangan pesat dan terintegrasi dengan pusat kota Gresik. Perluasan wilayah terus berlangsung seiring dengan berdirinya berbagai industri lain di sekitar Semen Gresik, menjadikan kota ini sebagai pusat industri yang berpengaruh. Pemilihan Gresik sebagai kawasan industri didasarkan pada beberapa faktor strategis. Secara geografis, lokasinya yang hanya berjarak sekitar 18 km dari Surabaya menjadikannya pilihan ideal untuk pengembangan industri. Sebagai kota metropolitan utama di Jawa Timur, Surabaya menyediakan berbagai fasilitas pendukung bagi industrialisasi di Gresik. Selain itu, posisi Gresik di tepi Laut Jawa memungkinkan berdirinya industri dengan tingkat polusi tinggi serta pembangunan pelabuhan khusus yang melayani aktivitas ekspor-impor. Beberapa pabrik besar bahkan memiliki pelabuhan mandiri, seperti Pelabuhan Semen Gresik dan Pelabuhan Petro Kimia Gresik, guna memperlancar distribusi bahan baku dan hasil produksi. Status Gresik sebagai kota industri semakin diperkuat oleh kebijakan pembangunan yang menempatkannya sebagai pusat pertumbuhan industri strategis di Jawa Timur. Seiring dengan bertambahnya pabrik dan sektor industri lainnya, Gresik mengalami perubahan signifikan dalam lanskap ekonomi dan sosial, menjadikannya salah satu kota industri utama di Indonesia.⁶

⁵ Purnawan Basundoro, "Industrialisasi, Perkembangan Kota, dan Respon Masyarakat", *Humaniora* 13, No. 2, 2001, 136, <https://www.neliti.com/publications/11798/>

⁶ Basundoro, "Industrialisasi, Perkembangan Kota, dan Respon Masyarakat", 137

Pada era Orde Baru, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 yang dikeluarkan pada 1 November 1974,⁷ ditetapkan bahwa Gresik menjadi pusat pemerintahan untuk Kabupaten Surabaya. Perbedaan istilah "Surabaya" dalam konteks kabupaten dan "Gresik" sebagai ibu kota dianggap tidak sesuai secara psikologis. Maka, pada 27 Februari 1975, nama Kabupaten Surabaya secara resmi diubah menjadi Kabupaten Gresik, dengan acara peresmian yang dipimpin oleh KDH Tingkat I Jawa Timur, Moh. Noer. Sebagai pusat pemerintahan baru Kabupaten Gresik yang dibentuk pada tahun 1974, dipimpin oleh Bupati Letkol Laut H. Soeflan, yang merupakan bupati pertama dan memulai pembangunan pusat pemerintahan di Gresik. Sejak diangkat pada tahun 1973, Bupati Soeflan berupaya memperbaiki keadaan kabupaten. Perubahan status administratif ini menghilangkan nama Kabupaten Surabaya, memberikan Gresik kebebasan baru untuk mengelola pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara bertahap, semua kegiatan administrasi pemerintahan dipindah ke Gresik.⁸

Penelitian sejarah mengenai *Transformasi Administrasi Kabupaten Gresik dalam Kebijakan Pemerintah Masa Kolonial (1934-1942) dan Pasca Kemerdekaan (1950-1974)*” memiliki urgensi yang tinggi karena mencerminkan dinamika perubahan kebijakan pemerintahan dari masa kolonial hingga pascakemerdekaan dalam mengelola wilayah administratif strategis. Periode ini mencakup masa transisi penting yang membawa perubahan terhadap status wilayah, struktur birokrasi, dan hubungan antara negara dan masyarakat. Kajian ini penting untuk mengungkap bagaimana kebijakan administratif dijalankan dan bagaimana dampaknya terhadap relasi antara negara dan

⁷ Sutiono Arjanggal, “Pedagang Buah Madura di Gresik Tahun 1974-1990”, *AVATARA: e-Jurnal Pendidikan Sejarah* 4, No. 1, (2016), 2, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/13855>

⁸ Umi Fadlilah dan Artono, “Sejarah Perubahan Status Administrasi Gresik dari Kabupaten Surabaya ke Kabupaten Gresik Tahun 1974”, *AVATARA: e-Jurnal Pendidikan Sejarah* 9, No. 1, (2020), 2, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/35373/31447>

rakyat di tingkat lokal. Selain merekonstruksi perjalanan administratif Gresik, penelitian ini penting sebagai bahan refleksi dan evaluasi bagi kebijakan pembangunan daerah di masa kini. Dengan mengungkap dampak-dampak sosial ekonomi yang muncul akibat kebijakan administratif, penelitian ini juga berkontribusi dalam membangun kesadaran historis masyarakat terhadap proses pembentukan wilayah dan peran aktif mereka dalam menentukan arah pembangunan ke depan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dipaparkan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan pemerintah selama proses Perubahan Administrasi Wilayah Gresik: sentralisasi kolonial (1934-1942) dan peneguhan kabupaten (1950-1974)?
2. Bagaimana kondisi dan dampak kehidupan sosial, dan ekonomi masyarakat Gresik selama masa transformasi administrasi Gresik?

C. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa aspek dalam tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah selama proses Perubahan Administrasi Wilayah Gresik: sentralisasi kolonial (1934-1942) dan peneguhan kabupaten (1950-1974)
2. Untuk mengetahui kondisi dan dampak kehidupan sosial, dan ekonomi masyarakat Gresik selama masa transformasi administrasi Gresik?

D. Ruang Lingkup Penelitian

1. Temporal

Batas waktu penelitian yang ditentukan mencakup dua periode penting dalam sejarah administrasi wilayah Gresik, yakni masa akhir pemerintahan kolonial Hindia Belanda (1934–1942) dan masa pasca kemerdekaan Republik Indonesia (1950–1974). Periode pertama, tahun 1934 dipilih karena pada masa ini terjadi perubahan besar di mana status Kabupaten Gresik dihilangkan dan wilayahnya digabung ke Kabupaten Surabaya. Perubahan ini adalah bagian dari kebijakan kolonial Hindia Belanda yang bertujuan untuk membenahi pemerintahan lokal. Kebijakan desentralisasi serta reorganisasi wilayah yang diterapkan Belanda menjadi titik awal transformasi struktur pemerintahan lokal di Gresik. Tahun 1942 menjadi batas akhir periode ini karena pendudukan Jepang menandai berakhirnya kekuasaan kolonial dan kebijakan administratif Belanda di Indonesia.

Adapun periode kedua, tahun 1950 hingga 1974, mencerminkan fase penataan kembali pemerintahan daerah setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Dimulai pada tahun 1950, ketika pemerintah Indonesia mulai menyusun kebijakan pembentukan daerah otonom, termasuk Kabupaten Gresik, dan berakhir pada tahun 1974 dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Penghapusan nama Kabupaten Surabaya dan diganti dengan Kabupaten Gresik. Dengan demikian, rentang waktu 1934–1942 dan 1950–1974 dipilih untuk menggambarkan dinamika perubahan dan kesinambungan kebijakan administratif yang membentuk identitas serta struktur pemerintahan wilayah Gresik dari masa kolonial hingga era awal Orde Baru.

2. Spacial

Batas tempat penelitian yang berfokus pada perubahan status administratif wilayah Gresik mengacu pada area geografis dan administratif yang relevan dengan studi sejarah serta perkembangan pemerintahan Gresik selama masa perubahan itu. Sebelum tahun 1934, Gresik merupakan kabupaten yang berdiri sendiri dengan batas administratif yang diterima oleh pemerintah Hindia Belanda, mencakup pusat kota Gresik dan sekitarnya. Namun, sejak tahun 1934 sampai 1974, status Kabupaten Gresik dihilangkan dan wilayahnya digabung dengan Kabupaten Surabaya. Pada periode ini, meskipun wilayah Gresik masih ada secara geografis, tetapi status administratifnya berada di bawah pengelolaan Surabaya. Penelitian ini mencakup area yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Gresik, termasuk area perkotaan dan pedesaan yang merupakan bagian dari struktur administrasi pada waktu itu. Dengan menempatkan perhatian pada wilayah Gresik, penelitian ini dapat menganalisis secara mendalam dampak perubahan status administratif terhadap pengelolaan, sosial, budaya, dan ekonomi daerah tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Berikut adalah manfaat yang diharapkan:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya kajian sejarah dan ilmu pemerintahan, khususnya terkait dengan perubahan administrasi wilayah dalam konteks kebijakan pemerintah. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori tentang transformasi administratif dan desentralisasi pemerintahan, serta interaksi

antara kebijakan nasional dan kondisi lokal. Selain itu, penelitian ini juga akan memperdalam pemahaman tentang dampak kebijakan pemerintah terhadap struktur sosial, ekonomi, dan budaya di wilayah tertentu, dengan mengambil contoh konkret di Gresik. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi studi lebih lanjut mengenai perubahan administratif dan dinamika pemerintahan daerah, serta memperkaya literatur terkait otonomi daerah dan pemerintahan lokal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Manfaat praktis bagi peneliti adalah untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika perubahan administrasi dan kebijakan pemerintahan daerah. Penelitian ini juga dapat mengasah keterampilan analisis peneliti dalam mengkaji dampak sosial, ekonomi, dan politik dari kebijakan pemerintah pada masa tersebut, serta membuka peluang untuk pengembangan studi lebih lanjut tentang transformasi administratif dan desentralisasi di Indonesia.

b. Bagi UIN KH Achmad Siddiq Jember

Manfaat praktis bagi UIN KHAS Jember adalah sebagai referensi untuk memperkaya kurikulum studi sejarah, ilmu pemerintahan, dan kajian sosial di lingkungan kampus. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi bagi dosen dan mahasiswa dalam pengembangan penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan pemerintah daerah serta dampaknya terhadap masyarakat, khususnya dalam konteks pemerintahan lokal di Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Manfaat praktis bagi masyarakat adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perubahan administratif yang memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini dapat membantu masyarakat memahami bagaimana kebijakan pemerintah di masa lalu berdampak pada struktur sosial, identitas lokal, serta pembangunan wilayah. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan di tingkat lokal.

F. Penelitian Terdahulu

Jurnal yang ditulis oleh Umi Fadlilah dengan judul **“Sejarah Perubahan Status Administrasi Gresik dari Kabupaten Surabaya ke Kabupaten Gresik Tahun 1974”**. Jurnal ini membahas perubahan administrasi Gresik dari bagian Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik, yang resmi terjadi pada tahun 1974. Perubahan ini berakar dari kebijakan pemerintah pada tahun 1965, yang mengakibatkan lima kecamatan di Gresik masuk ke wilayah Kota Madya Surabaya. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antara ibu kota kabupaten dan wilayah yang dikelolanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan nama resmi dari Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974. Sejak pengesahan pada 27 Februari 1975, Gresik mengalami percepatan dalam pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan industri, yang terlihat dengan berdirinya berbagai pabrik, termasuk PT. Petrokimia Gresik.⁹

Skripsi yang ditulis oleh Vetri Agung Santuso dengan judul **“Dari Surabaya ke Gresik : Pembangunan dan Perubahan Sosial 1953-1974”**. Skripsi ini

⁹ Umi Fadlilah dan Artono, “Sejarah Perubahan Status Administrasi Gresik dari Kabupaten Surabaya ke Kabupaten Gresik Tahun 1974”

mengangkat tema mengenai sejarah perkembangan administrasi Kabupaten Gresik, serta perubahan industri dan sosial yang berlangsung di daerah tersebut antara tahun 1953 hingga 1974. Penelitian ini memaparkan perjalanan transformasi Gresik, yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Surabaya, menjadi kabupaten mandiri pada tahun 1974. Proses ini dipengaruhi oleh dinamika ekonomi, industri, dan infrastruktur yang terus berkembang. Salah satu tonggak penting dalam sejarah ini adalah awal berdirinya Pabrik Semen Gresik pada tahun 1953, yang berfungsi sebagai pionir, mendorong investasi serta modernisasi di kawasan tersebut. Selain itu, skripsi ini juga mengeksplorasi dampak kehadiran industri terhadap pola pikir masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta perubahan administratif yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan sosial Gresik selama periode tersebut.¹⁰

Jurnal yang ditulis oleh Purnawan Basundoro dengan judul **“Industrialisasi, Perkembangan Kota, dan Respon Masyarakat: Studi Kasus Kota Gresik”**. Jurnal tersebut meneliti perkembangan kota Gresik dalam konteks industrialisasi, mencakup perubahan dalam pemerintahan, perubahan sosial, dan efek terhadap lingkungan. Sejak Gresik mengalami perubahan administrasi pada tahun 1934, kota ini mulai menunjukkan kemajuan sebagai pusat ekonomi dan industri. Perkembangan ini semakin dipercepat oleh pembangunan infrastruktur, seperti pelabuhan dan jalan, yang mendukung kegiatan perdagangan. Industrialisasi memicu terjadinya urbanisasi dan pertumbuhan populasi, yang menghasilkan perubahan signifikan dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, proses ini juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti konflik lahan, polusi, dan ketimpangan ekonomi di antara kelompok masyarakat yang berbeda.¹¹

¹⁰ Vetri Agung Santuso, “Dari Surabaya ke Gresik : Pembangunan dan Perubahan Sosial 1953-1974”, (Skripsi, Universitas Airlangga, 2011)

¹¹ Purnawan Basundoro, “Industrialisasi, Perkembangan Kota, dan Respon Masyarakat”

Skripsi karya Wisnu dengan judul **“Terbentuknya Kabupaten Gresik Tahun 1974: Studi Tentang Sejarah Perubahan Status Kabupaten Surabaya Menjadi Kabupaten Gresik”**. Skripsi ini membahas mulai dari latar belakang, proses, hingga dampak dari pemekaran wilayah Gresik. Sebelum pemekaran, Gresik adalah bagian dari Kabupaten Surabaya. Namun, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan infrastruktur yang pesat, kebutuhan untuk memiliki pemerintahan yang lebih efisien dan responsif terhadap perkembangan lokal semakin mendesak. Proses pemekaran ini melibatkan berbagai faktor, termasuk aspek politik, sosial, dan ekonomi. Keputusan untuk memisahkan Gresik dari Kabupaten Surabaya didasari oleh kebutuhan untuk meningkatkan layanan publik, pengelolaan sumber daya alam, dan pengembangan wilayah yang lebih terarah. Konsekuensi dari pemekaran ini mencakup peningkatan otonomi daerah, percepatan pembangunan infrastruktur, dan perbaikan kualitas layanan publik. Namun, pemekaran juga menghadirkan tantangan, seperti koordinasi antarinstansi, pengelolaan sumber daya, dan penyesuaian dalam administrasi pemerintahan.¹²

Skripsi oleh Muhammad Ainur Ridlo yang berjudul **“Industrialisasi dan Perubahan Sosial dalam Masyarakat Islam Kota Gresik (1957-1990)”**. Skripsi ini mengkaji tentang proses industrialisasi dan perubahan sosial dalam komunitas Islam di Kota Gresik antara tahun 1957 hingga 1990. Industrialisasi dipahami sebagai perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, yang dimulai dengan berdirinya pabrik Semen Gresik pada 1957. Keberadaan pabrik ini memicu lahirnya industri lain, seperti Petrokimia Gresik, menjadikan Gresik sebagai pusat industri di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi untuk mengeksplorasi

¹² Wisnu, “Terbentuknya Kabupaten Gresik Tahun 1974: Studi Tentang Sejarah Perubahan Status Kabupaten Surabaya Menjadi Kabupaten Gresik”, (Skripsi, Universitas Negeri Surabaya, 2005)

dampak industrialisasi terhadap aspek sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat Islam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa industrialisasi menyebabkan perubahan besar, termasuk berkurangnya lahan pertanian dan pergeseran mata pencaharian masyarakat dari sektor agraris ke sektor industri. Meskipun ekonomi Gresik semakin stabil, muncul pula masalah ekologis dan perubahan dalam nilai sosial yang mengarah pada pergeseran dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman baru tentang sejarah dan perkembangan Kota Gresik yang berubah dari kota santri menjadi kota industri.¹³

Skripsi oleh Muhammad Fasikhul Amin yang berjudul **“Sejarah Sidayu dari Bekas Kadipaten , Kewedanan, hingga menjadi Kecamatan Abad XVI-XX M”**. Skripsi ini membahas sejarah Sidayu dari bekas kadipaten hingga menjadi kecamatan, dengan fokus pada tiga isu utama: kondisi Sidayu saat ini, hubungan Sidayu dengan Mataram Islam, dan perubahan pemerintahan Sidayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sidayu sebagai bekas kadipaten dipimpin oleh bupati sejak Abad ke-16, menjadi bawahan Mataram pada tahun 1625, dan mengalami peralihan status pemerintahan menjadi kawedanan pada tahun 1935 di bawah keresidenan Gresik. Akhirnya, pada tahun 1999, Sidayu resmi berstatus kecamatan dalam Kabupaten Gresik. Saat ini, Sidayu berada di utara Kabupaten Gresik.¹⁴

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan kajian ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian berjudul *“Transformasi Administrasi Wilayah Gresik dalam Kebijakan Pemerintahan Masa Kolonial (1934-1942) dan Pasca Kemerdekaan (1950-1974)”* merupakan kontribusi terbaru dalam bidang studi ini. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada tiga tema utama:

¹³ Muhammad Ainur Ridlo, “Industrialisasi dan Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Islam Kota Gresik (1957-1990)”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2018)

¹⁴ Muhammad Fasikhul Amin, “Sejarah Sidayu dari Bekas Kadipaten , Kewedanan, hingga menjadi Kecamatan Abad XVI-XX M”, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)

perubahan status administrasi Gresik yang terjadi pada tahun 1974, perkembangan industrialisasi di wilayah tersebut, dan perubahan sosial dalam masyarakat local. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, kajian ini secara khusus membahas proses transformasi administratif di Gresik dalam rentang waktu yang lebih panjang, yaitu dari tahun 1934 hingga 1974. Penelitian ini juga menyoroti kebijakan pemerintahan yang berperan dalam transformasi tersebut, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Gresik selama periode tersebut. Oleh karena itu, Kajian ini menjadi langkah penting dalam memperkaya pemahaman sejarah lokal Gresik dari sudut pandang administratif dan kebijakan pemerintahan.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan salah satu bagian penting dalam pembahasan penelitian yang berfungsi untuk memberikan penjelasan terperinci mengenai berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan rekonstruksi peristiwa masa lalu dengan pendekatan historis. Penelitian ini disusun untuk menggambarkan secara sistematis, rinci, dan objektif mengenai proses transformasi yang terjadi dalam penggabungan dan perubahan status administratif Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik selama periode 1934-1974. Selain itu, skripsi ini juga bertujuan untuk menganalisis dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang timbul akibat kebijakan perubahan administrasi tersebut terhadap masyarakat Gresik. Dengan mengacu pada bukti-bukti sejarah yang relevan, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pengaruh transformasi administratif tersebut terhadap dinamika kehidupan masyarakat setempat. Adapun kerangka konseptual yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi:

1. Teori Transformasi Wilayah

Fred W. Riggs menekankan bahwa studi administrasi publik tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial, budaya, politik dan ekonomi di mana administrasi itu berjalan. Ia menggunakan istilah “ekologi administrasi” untuk menggambarkan hubungan timbal-balik antara sistem administrasi dan lingkungan sosialnya. Menurut Riggs, sistem administrasi bukan benda yang berdiri sendiri, tetapi “organisme” yang terus menerus dipengaruhi oleh lingkungan eksternal (termasuk struktur sosial, nilai budaya, kondisi ekonomi) dan sekaligus mempengaruhi lingkungan tersebut. Dengan pendekatan ini, Riggs menolak asumsi bahwa “model birokrasi Barat” bisa langsung diterapkan ke negara berkembang tanpa adaptasi yang mempertimbangkan kondisi lokal.¹⁵ Pendekatan ekologis ini menjadi dasar bagi pengembangan model *prismatic society*, yang menggambarkan proses transformasi masyarakat dari bentuk tradisional (*fused*) menuju modern (*diffracted*), dengan fase transisi yang disebut *prismatic*.

Riggs mengembangkan model *fused–prismatic–diffracted* untuk menjelaskan tahapan transformasi administrasi dalam masyarakat. Pada masyarakat *fused*, struktur sosial dan administrasi masih menyatu tanpa diferensiasi fungsi yang jelas. Masyarakat *prismatic* adalah masyarakat transisi, di mana unsur tradisional dan modern hidup berdampingan, menciptakan ketegangan dan kompleksitas. Sementara masyarakat *diffracted* adalah masyarakat modern yang telah mengalami spesialisasi dan diferensiasi fungsi secara penuh. Model ini sangat relevan untuk menganalisis negara-negara

¹⁵ Hilman Fitrian Akbar, *dkk*, “Faktor-Faktor Ekologi Adminstrasi dalam Sistem Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, No. 12, (2021), 2753, <https://ejournal.stpmataram.ac.id/JIP/article/view/538>.

berkembang yang sedang berupaya mengadopsi sistem administrasi modern namun masih dibayangi oleh nilai dan praktik tradisional¹⁶

Tiga konsep utama yang diperkenalkan Riggs dalam model *prismatic society* (masyarakat prismatic) adalah *heterogeneity*, *formalism*, dan *overlapping*. *Heterogeneity* merujuk pada keberagaman nilai, norma, dan institusi yang hidup berdampingan dalam satu masyarakat, sehingga sering terjadi benturan antara sistem lama dan baru. *Formalism* adalah kesenjangan antara aturan formal yang diadopsi (seringkali dari Barat) dengan praktik nyata di lapangan, sehingga aturan hanya menjadi simbol tanpa implementasi efektif. *Overlapping* menggambarkan tumpang tindih kewenangan dan fungsi antara institusi tradisional dan modern, yang menyebabkan ambiguitas dan inefisiensi dalam tata kelola. Ketiga konsep ini menjadi alat analisis utama untuk memahami mengapa reformasi administrasi di negara berkembang sering gagal atau berjalan lambat.¹⁷

Teori transformasi administrasi Fred W. Riggs relevan dalam menganalisis perubahan administratif wilayah Gresik tahun 1934–1974 karena menekankan bahwa sistem pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang melingkupinya. Melalui pendekatan ekologi administrasi, Riggs memandang sistem pemerintahan sebagai organisme hidup yang saling memengaruhi dengan lingkungannya. Dalam konteks Gresik, perubahan status dari bagian Kabupaten Surabaya menjadi daerah otonom mencerminkan proses ekologis di mana kebijakan pemerintahan berinteraksi dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat lokal.

¹⁶ Wen-shien Peng, "A Critique of Fred W. Riggs Ecology of Public Administration", *Internasional Public Management Review* 9, No. 1, (2008), 214, <https://ipmr.net/index.php/ipmr/article/view/51>.

¹⁷ Engkus, "Administrasi Publik dalam Pendekatan Ekologi", *JISPO* 7, 1, (2017), 94, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/article/view/1739>.

Dengan kerangka model *fused-prismatic-diffracted*, proses transformasi Gresik dapat dipahami sebagai pergeseran dari sistem *fused* pada masa kolonial, menuju fase *prismatic* setelah kemerdekaan, dan perlahan mendekati *diffracted* saat struktur pemerintahan semakin modern. Tiga konsep utama Riggs, yaitu *heterogeneity*, *formalism*, dan *overlapping*—menjelaskan dinamika administrasi Gresik: adanya keberagaman nilai sosial antara masyarakat pesisir dan pedesaan (*heterogeneity*), kesenjangan antara aturan formal dan praktik lapangan (*formalism*), serta tumpang tindih kewenangan antara lembaga tradisional dan birokrasi modern (*overlapping*).

Dengan demikian, teori Riggs menegaskan bahwa transformasi administrasi Gresik bukan sekadar restrukturisasi kelembagaan, tetapi juga proses adaptasi ekologi antara kebijakan pemerintahan dan struktur sosial-budaya masyarakat. Pendekatan ini memberikan kerangka analitis untuk memahami bagaimana perubahan administratif memengaruhi hubungan sosial, pola kekuasaan, dan dinamika ekonomi masyarakat Gresik selama periode transisi 1934–1974.

2. Konsep Reformasi Administrasi

Gerald E. Caiden mendefinisikan reformasi administrasi sebagai *the artificial inducement of administrative transformation against resistance*, yakni upaya perubahan yang dilakukan secara sadar dan disengaja untuk mentransformasi sistem administrasi, meskipun sering kali menghadapi hambatan atau perlawanan dari dalam sistem itu sendiri. Definisi tersebut mengandung beberapa konsekuensi penting. *Pertama*, reformasi administrasi merupakan proses perubahan yang dirancang secara sistematis dan tidak terjadi secara spontan. Perubahan ini bukan hasil dari dinamika alamiah, melainkan

hasil dari perencanaan yang matang serta kesadaran manusia untuk memperbaiki sistem birokrasi agar lebih efektif. Dengan demikian, setiap langkah dalam reformasi administrasi selalu melibatkan unsur kesengajaan, perencanaan, dan pengendalian terhadap arah perubahan yang diinginkan.

Kedua, reformasi administrasi menjadi bagian dari upaya fundamental untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Reformasi ini mencakup perubahan nilai, struktur, dan mekanisme kerja birokrasi agar mampu berfungsi secara optimal sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). *Ketiga*, dalam setiap proses reformasi selalu terdapat resistensi atau penolakan dari pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan oleh perubahan tersebut. Oleh karena itu, reformasi administrasi merupakan proses panjang yang menuntut strategi adaptif dan keberlanjutan dalam mengatasi hambatan struktural, kultural, maupun politik yang muncul.¹⁸

Caiden juga menekankan bahwa reformasi administrasi merupakan “*a never ending process*”, artinya proses pembaruan dalam sistem administrasi publik tidak pernah benar-benar berakhir, karena selalu ada kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik yang dinamis. Lebih lanjut, fokus utama reformasi administrasi menurut Caiden adalah meningkatkan kinerja administrasi individu, kelompok, maupun institusi agar lebih efektif, ekonomis, dan cepat dalam memberikan pelayanan publik.

¹⁸ Ramadhani Haryo Seno, “Strategi Reformasi Administrasi dan Kepemimpinan”, *Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani* 7, No. 2, (2020), 115, <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/1061>

Selain efektivitas dan efisiensi, aspek keadilan (*equity*) juga menjadi ukuran penting dalam menilai keberhasilan reformasi administrasi.¹⁹

Bagi negara-negara berkembang, Caiden berpendapat bahwa reformasi administrasi merupakan suatu keharusan sebagai bagian dari tanggung jawab pascakemerdekaan. Negara-negara yang baru merdeka harus mampu membangun sistem administrasi yang mandiri serta mencari solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan besar dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam konteks tersebut, pendekatan reformasi harus disesuaikan dengan beberapa faktor utama, yaitu: kultur lokal, reputasi kepemimpinan nasional, jenis rezim politik, kekuatan serta keragaman oposisi, dan ketersediaan sumber daya.²⁰

Konsep reformasi administrasi yang dikemukakan oleh Gerald E. Caiden sangat relevan untuk memahami transformasi administrasi wilayah Gresik pada periode 1934–1974. Caiden mendefinisikan reformasi administrasi yaitu perubahan administratif yang sengaja dirancang untuk meningkatkan kinerja pemerintahan meskipun menghadapi resistensi. Hal ini sesuai dengan kondisi Gresik, di mana perubahan administratif dilakukan secara terencana oleh pemerintah—baik pada masa kolonial Belanda maupun pascakemerdekaan—untuk menata ulang struktur birokrasi, sistem pemerintahan, dan pola pembangunan ekonomi sesuai tuntutan zaman. Kebijakan tersebut mencakup modernisasi administrasi, penguatan kontrol

¹⁹ Endang Wirjatmi Trilestari, “Reformasi Administrasi dengan Pendekatan “Systems Thingking” Mengkonstruksi Birokrasi dalam Mengatasi Kompleksitas Permasalahan untuk Suatu Perubahan”, *Jurnal Ilmu Administrasi* 5, No. 3, 2008, 219, <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/448>

²⁰ Ade Putra Ode Amane, *dkk, Reformasi Administrasi Publik*, (Purbalingga, Eureka Media Aksara, 2023), 21, <https://publikasi.uib.ac.id/index.php/Monograf/catalog/download/104/121/511-1?inline=1>

pusat, pembangunan infrastruktur, pembentukan lembaga lokal, serta peningkatan pelayanan publik.

Selain aspek struktural, reformasi administrasi menurut Caiden menekankan peningkatan efektivitas, efisiensi, dan pemerataan (equity), yang tercermin dalam transformasi sosial dan ekonomi masyarakat Gresik. Perubahan ini mendorong masyarakat beradaptasi dengan kondisi baru, meskipun tidak selalu diterima tanpa resistensi. Sebagian masyarakat menolak kebijakan tertentu karena dianggap bertentangan dengan nilai lokal, namun seiring waktu mereka mulai berpartisipasi dalam program pemerintah, termasuk pendidikan, pembangunan, dan sektor ekonomi. Dengan demikian, transformasi administrasi Gresik pada 1934–1974 dapat dipahami sebagai bagian dari proses reformasi yang berkelanjutan, yang tidak hanya mengubah struktur pemerintahan, tetapi juga memengaruhi berbagai dimensi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat secara menyeluruh.

3. Teori Habitus

Menurut Bourdieu, habitus adalah suatu sistem disposisi yang bersifat tahan lama namun dapat berubah, yang berperan sebagai dasar pembentuk bagi praktik-praktik sosial yang terstruktur dan memiliki keterpaduan secara objektif. Habitus terbentuk melalui proses internalisasi terhadap struktur dunia sosial yakni struktur sosial yang diserap dan tertanam dalam diri individu yang lahir dari perpaduan antara kondisi objektif dan pengalaman historis pribadi. Pembentukan habitus berlangsung setelah individu lahir dan mulai berinteraksi dengan lingkungannya dalam konteks ruang dan waktu tertentu. Dengan

demikian, habitus bukanlah sifat bawaan sejak lahir, melainkan hasil dari proses pembelajaran melalui pengasuhan serta sosialisasi.²¹

Pembentukan habitus berlangsung melalui pengalaman sosial, pendidikan, serta pengaruh lingkungan budaya tempat individu dibesarkan. Proses ini bersifat halus dan sering kali tidak disadari, sehingga tindakan individu kerap muncul secara spontan sesuai dengan pola yang telah tertanam dalam habitus. Habitus meliputi cara berpikir, kebiasaan, persepsi, serta tindakan yang menjadi bagian dari identitas diri individu dan membentuk cara mereka berinteraksi dengan realitas sosial. Dalam konteks sosial, habitus bertindak sebagai mekanisme penyesuaian subjektif terhadap posisi sosial seseorang yang kemudian menentukan arah praktik sosial yang dilakukan.²²

Konsep habitus tidak dapat dipisahkan dari ranah (*field*), yaitu arena sosial tempat individu berkompetisi dalam memperoleh sumber daya material maupun simbolik. Praktik sosial, dalam kerangka teori Bourdieu, merupakan hasil interaksi antara habitus, modal, dan ranah, yang dirumuskan melalui hubungan: $(\text{Habitus} \times \text{Modal}) + \text{Ranah} = \text{Praktik}$. Modal yang dimaksud mencakup modal ekonomi, budaya, dan simbolik, yang dapat saling dipertukarkan dan diakumulasi dalam setiap ranah sosial. Dengan demikian, habitus tidak hanya dibentuk oleh struktur sosial, tetapi juga berperan dalam mempertahankan dan mereproduksi struktur tersebut melalui praktik sosial yang berulang.²³

²¹ Mengihut Siregar, "Teori "Gado-gado" Pierre Felix- Bourdieu", Jurnal Studi Kultural 1, No. 2, (2016), 80, <https://erepository.uwks.ac.id/16679/1/3.2.pdf>.

²² Fendi Saifulloh Yusuf, *Habituasi Nilai-Nilai Keagamaan Remaja dalam Grup Banjari Al-Dzikri di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik*, (Skripsi, IAIN Kediri, 2023), 18.

²³ Mohammad Adib, "Agen dan Struktur dalam Pandangan Pierre Bourdieu", *BioKultur* 1, No. 2, (2012), 107, <https://media.neliti.com/media/publications/493156-portrait-of-maulanas-life-a-wealthy-index-de903ea6.pdf>.

Secara konseptual, teori habitus Pierre Bourdieu memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk memahami keterkaitan antara struktur sosial dan agensi individu. Habitus bukan hanya produk dari kondisi sosial yang ada, tetapi juga menjadi kekuatan yang membentuk, meneguhkan, sekaligus mengubah struktur sosial melalui praktik sehari-hari. Melalui pemahaman terhadap habitus, kita dapat menelusuri bagaimana pola-pola sosial, kebudayaan, dan ketimpangan dalam masyarakat terus terbentuk dan direproduksi dari waktu ke waktu.²⁴

Teori habitus Pierre Bourdieu dapat digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan transformasi administrasi wilayah Gresik (1934–1974) memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Perubahan struktur pemerintahan, mulai dari masa kolonial hingga pembentukan Kabupaten Gresik sebagai daerah mandiri, tidak hanya berdampak pada sistem birokrasi, tetapi juga mengubah pola pikir, perilaku, dan kebiasaan sosial masyarakat. Melalui proses internalisasi nilai dan aturan baru yang lahir dari kebijakan pemerintah, masyarakat Gresik membentuk habitus baru yang mencerminkan penyesuaian terhadap sistem sosial modern. Dalam bidang sosial, terjadi pergeseran dari pola kehidupan tradisional menuju struktur sosial yang lebih rasional dan administratif, seiring interaksi masyarakat dengan birokrasi modern dan praktik pemerintahan pascakemerdekaan.

Dalam bidang ekonomi, habitus masyarakat Gresik berkembang melalui adaptasi terhadap kebijakan tata ruang dan industrialisasi yang menjadikan Gresik sebagai kawasan industri dan pelabuhan strategis. Masyarakat yang

²⁴ Hanna-Mari Husu, "Rethinking incumbency: Utilising Bourdieu's field, capital, and habitus to explain energy transitions", *Energy Research & Social Science* 93, (2022), 3, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629622003280>.

sebelumnya bergantung pada sektor agraris mulai berorientasi pada sektor industri, perdagangan, dan jasa, menciptakan pola ekonomi baru yang lebih dinamis. Dengan demikian, teori habitus Bourdieu menjelaskan bahwa dampak kebijakan transformasi administrasi tidak hanya terlihat dalam restrukturisasi kelembagaan, tetapi juga pada perubahan kultural berupa nilai, orientasi, dan praktik sosial-ekonomi masyarakat. Habitus menjadi penghubung antara struktur kebijakan dan agensi masyarakat, yang bersama-sama membentuk arah perkembangan sosial dan ekonomi Gresik selama masa transformasi tersebut.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian sejarah. Metode ini merupakan himpunan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang disusun secara sistematis untuk mempermudah proses pengumpulan bahan-bahan yang menjadi sumber sejarah. Selain itu, metode ini berfungsi untuk mengevaluasi dan menguji keabsahan serta kredibilitas sumber-sumber tersebut secara kritis. Setelah melalui tahapan analisis, hasil dari penelitian ini disusun dan disajikan dalam bentuk tulisan yang mencerminkan pencapaian-pencapaian yang diperoleh selama proses penelitian.²⁵ Metode penelitian sejarah mencakup empat tahapan yang harus dilalui dalam proses pengumpulan data, yaitu :

1) Heuristik (Pengumpulan sumber)

Heuristik adalah tahap dalam penelitian sejarah yang mencakup pencarian, penemuan, serta pengumpulan berbagai sumber untuk memahami peristiwa atau kejadian sejarah yang relevan dengan penelitian.²⁶ G. J. Renier

²⁵ Wasino dan Endang Sri Hartatik, *Metode Penelitian Sejarah (Dari Riset Hingga Pebulisan)*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), 11, <http://eprints.undip.ac.id/70451/1/>

²⁶ Wulan Juliani Sukmana, "Metode Penelitian Sejarah", *Seri Publikai Pembelajaran* 2, No. 2, (2021), 3, <https://www.researchgate.net/publication/351097486>

menyatakan bahwa heuristik bukanlah sebuah ilmu, melainkan sebuah teknik atau seni. Oleh karena itu, heuristik tidak mempunyai aturan-aturan umum yang tetap. Dalam praktiknya, heuristik lebih mengandalkan keterampilan yang mencakup keterampilan mencari, mengelola, memperinci bibliografi, serta mengklasifikasikan dan memelihara catatan-catatan sejarah.²⁷

Dalam proses pencarian sumber, peneliti harus memperhatikan dua jenis sumber yang penting, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup bahan-bahan sejarah yang autentik, seperti informan, foto, bangunan bersejarah, serta dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Untuk penelitian ini, sumber primer meliputi dokumen resmi pemerintah seperti UU No. 12 Tahun 1950, UU No. 2 Tahun 1965, dan PPRI No. 38 Tahun 1974, berbagai arsip dari era kolonial, foto-foto yang menggambarkan kondisi masyarakat Gresik, serta bangunan bersejarah yang masih ada, seperti tugu batas wilayah Kabupaten Surabaya, Gedung GNI, dan Kantor Pos Pelabuhan Gresik (yang dulunya adalah Asrama VOC). Selain itu, wawancara dengan tokoh masyarakat Gresik, sejarawan lokal, dan dokumen relevan lainnya. Disisi lain, sumber sekunder berfungsi untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari sumber primer. Dalam penelitian ini, sumber sekunder dikumpulkan melalui kajian pustaka yang mencakup jurnal, artikel, buku, skripsi, dan berbagai literatur lain yang berkaitan dengan pemerintahan Gresik pada periode 1934–1974.

2) Verifikasi (Kritik sumber)

Setelah menyelesaikan tahap pengumpulan sumber, langkah berikutnya dalam metode penelitian sejarah adalah verifikasi. Proses verifikasi ini sangat

²⁷ Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), 101.

penting untuk memastikan kredibilitas dan keaslian sumber yang telah dikumpulkan. Dalam metode penelitian sejarah, verifikasi melibatkan dua jenis kritik yaitu, kritik eksternal dan kritik internal.

Kritik eksternal memeriksa keabsahan sumber dengan menganalisis aspek fisiknya, seperti jenis kertas, tinta, gaya tulisan, dan bahasa yang digunakan, untuk memastikan bahwa sumber tersebut sesuai dengan periode waktu dan konteks sejarah yang diteliti. Peneliti memperoleh sumber-sumber berupa arsip, koleksi buku, koran, serta foto-foto dari masa kolonial dan pasca-kolonial. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti melakukan verifikasi terhadap validitas halaman yang diakses melalui internet serta memeriksa kejelasan dan keakuratan sumber tersebut. Sementara itu, kritik internal mengevaluasi keakuratan isi sumber dengan meninjau informasi yang terkandung secara mendalam. Proses ini membantu peneliti menentukan sejauh mana informasi tersebut relevan dan dapat dipercaya untuk mendukung penelitian sejarah.²⁸

3) Interpretasi

Interpretasi merupakan proses menganalisis dan memahami berbagai data yang telah ditemukan, sekaligus menentukan makna serta keterkaitan di antara data-data tersebut. Dengan demikian, interpretasi mencakup pengolahan informasi yang bersumber dari peninggalan masa lalu untuk menghidupkan kembali suasana atau konteks dari masa yang sedang diteliti. Proses ini membutuhkan ketelitian dan kejelian dalam menghubungkan setiap fakta,

²⁸ Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah Islam*, 105-108

sehingga peneliti mampu menyusun ulang suatu peristiwa sejarah secara lengkap dan mendalam.²⁹

Penulis akan menganalisis dan memahami informasi dari berbagai sumber yang telah diperoleh dengan cara membandingkan satu sumber dengan sumber lainnya. Sumber-sumber tersebut dapat berupa foto, arsip, hasil wawancara, dokumen-dokumen tertulis, serta sejumlah buku yang relevan. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan menyeluruh, sehingga interpretasi yang dihasilkan dapat menggambarkan topik penelitian secara akurat dan mendalam.

4) Historiografi

Tahap akhir dalam metode penelitian sejarah dikenal sebagai historiografi. Historiografi merujuk pada proses di mana hasil rekonstruksi imajinatif dari fakta-fakta sejarah yang telah diidentifikasi dan dianalisis pada tahap-tahap sebelumnya yang kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk tulisan. Proses ini bertujuan untuk menggambarkan narasi sejarah yang komprehensif.³⁰ Dalam skripsi ini, penulis akan menguraikan secara mendetail mengenai proses transformasi wilayah Gresik, dengan kebijakan pemerintahan yang diterbitkan dalam rentang waktu antara tahun 1934 hingga 1974. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang latar belakang, proses, serta dampak dari perubahan administrasi tersebut terhadap perkembangan wilayah Gresik.

²⁹ Een Herdiani, "Metode Sejarah dalam Penelitian Tari", *Jurnal Seni Makalangan* 3, No. 2, (2016), 41, <https://jurnal.isbi.ac.id/index.php/makalangan/article/view/889>

³⁰ Een Herdiani, "Metode Sejarah dalam Penelitian Tari", 42

I. Sistematika Pembahasan

Penyajian pembahasan dalam penelitian karya tulis ini disusun dengan pendekatan yang sistematis. Dalam skripsi dibagi menjadi beberapa bab yang masing-masing mencakup ruang lingkup tertentu. Pembagian ini bertujuan untuk memberikan struktur yang jelas, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami topik yang dibahas. Adapun pembagian bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Perubahan Administrasi Wilayah Gresik: Sentralisasi Kolonial dan Peneguhan Kabupaten, membahas dua fase utama dalam perubahan status administratif wilayah Gresik. Pertama, diuraikan proses penghapusan Kabupaten Gresik pada tahun 1934 oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, yang dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi global dan kebijakan efisiensi anggaran, serta strategi politis untuk memperkuat posisi Surabaya sebagai kota metropolitan. Perubahan ini menjadikan Gresik sebagai kewedanan di bawah Kabupaten Surabaya. Selanjutnya, dibahas pengembalian status administratif Gresik menjadi kabupaten mandiri pada tahun 1974 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974, yang didorong oleh kebutuhan untuk memperjelas identitas pemerintahan dan mempercepat pembangunan wilayah. Bab ini menjelaskan secara detail latar belakang, proses, serta implikasi administratif dari kedua kebijakan tersebut terhadap struktur pemerintahan lokal Gresik.

Bab III Kondisi dan Dampak Sosial Ekonomi dari Transformasi Administrasi Wilayah Gresik 1934–1974, menguraikan secara mendalam dinamika geografis serta keadaan sosial-ekonomi masyarakat Gresik sebelum dan selama proses

transformasi administratif. Pembahasan dimulai dengan penjelasan menyeluruh mengenai karakteristik geografis wilayah, struktur sosial, dan kondisi ekonomi masyarakat Gresik sebelum tahun 1934, sebagai landasan penting untuk memahami perubahan yang terjadi selanjutnya. Bab ini juga menyoroti dampak kebijakan pemerintahan selama masa transformasi administrasi Gresik tahun 1934-1974. Fokus utama diarahkan pada bagaimana kebijakan administratif tersebut memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk perubahan pola mata pencaharian, relasi antarkelompok sosial, serta dinamika ekonomi lokal yang berkembang sebagai akibat dari kebijakan kolonial dan pembangunan industri pascakemerdekaan.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan ringkasan singkat dari seluruh temuan penelitian yang relevan dengan masalah yang dikaji, berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Adapun saran disusun berdasarkan temuan penelitian, dengan berisi rekomendasi langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti hasil penelitian tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

PERUBAHAN ADMINISTRASI WILAYAH GRESIK: SENTRALISASI KOLONIAL DAN PENEKUALAN KABUPATEN

A. Status Administrasi Pemerintahan Gresik Pra 1934

Status administrasi wilayah Gresik mengalami dinamika yang cukup kompleks dan bertingkat, seiring dengan perubahan kekuasaan serta struktur pemerintahan di kawasan Jawa Timur. Sekitar Abad XV M, Gresik berada di bawah otoritas Kerajaan Giri Kedaton, sebuah kekuatan lokal yang berbasis pada kepemimpinan keagamaan. Dalam kurun waktu Abad XVI M, para pelaut dan pedagang asal Gresik turut menyebarluaskan nama Giri ke wilayah pesisir di bagian timur Nusantara, menunjukkan pengaruh simbolik maupun kultural dari Giri di luar wilayah Jawa. Sejak masa kepemimpinan Sunan Prapen, dominasi para tokoh agama dari Giri atas wilayah Gresik semakin kuat dan mengakar. Menariknya, tidak ditemukan catatan sejarah dari paruh kedua Abad XVI M yang menunjukkan keberadaan kekuasaan sekuler atau pemerintahan duniawi yang independen di pelabuhan Gresik. Hal ini menegaskan bahwa otoritas keagamaan dari Giri memainkan peran sentral dalam struktur kekuasaan dan pemerintahan lokal Gresik pada masa tersebut.³²

Kota tua Bandar *Grissee* merupakan titik awal kehadiran *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) atau Perserikatan Dagang Hindia Belanda di wilayah Gresik. Lembaga dagang ini dibentuk di Amsterdam, Belanda, pada Maret 1602 M, dan mulai menancapkan pengaruhnya di Gresik sejak tahun 1603 M, bertepatan dengan

³² Abdullah Hafizh dan Artono, "Perkembangan Kerajaan Giri Kedaton Tahun 1548-1605", *AVATARA e-journal Pendidikan Sejarah*, Vol, 11, No. 1, 2021, 5, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/41852/36003>

masa pemerintahan Panembahan Kawis Guwo (1601–1614 M) di Giri Kedathon. Pada saat itu, VOC mendirikan kantor dagangnya di Bandar Grisee dan menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat kegiatan niaga serta pertahanan strategis. Selama hampir dua Abad, atau tepatnya 197 tahun, VOC menjalankan aktivitas monopoli perdagangan di wilayah ini dan secara bertahap mengintervensi urusan pemerintahan lokal. Kendati demikian, dominasi VOC, khususnya dalam sektor garam, serta kondisi ekonomi yang tidak stabil di bawah administrasi kolonial Belanda, menciptakan ketegangan dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi kekuasaan kolonial tersebut.³³

Giri mengalami kemunduran sebagai pusat kekuasaan yang mulai tampak pasca kekalahannya dalam konfrontasi militer dengan Kesultanan Mataram pada tahun 1636 M, di mana pasukan Mataram dipimpin oleh Pangeran Pekik dari Surabaya. Faktor utama yang mendorong kemunduran tersebut adalah konflik berkepanjangan antara Giri dan Mataram, yang memuncak melalui keterlibatan Giri dalam pemberontakan Trunojoyo pada periode 1675–1679 M. Dampak dari dinamika ini menyebabkan disintegrasi wilayah Giri-Gresik yang sebelumnya merupakan entitas terintegrasi, menjadi dua entitas pemerintahan yang terpisah. Masing-masing wilayah kemudian memiliki struktur kepemimpinan tersendiri: Giri tetap berada di bawah otoritas seorang bangsawan bergelar pangeran, sementara Gresik diperintah oleh seorang pejabat bergelar umbul, yang dalam perkembangan selanjutnya menjadi embrio dari jabatan bupati.³⁴

³³ Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Gresik, “Periodesasi Sejarah Gresik”, diakses 20 April 2025, <https://disparekrafbudpora.gresikkab.go.id/detailpost/periodesasi-sejarah-gresik>

³⁴ Muhammad Ilham Perkasa, “Konfigurasi Spasial pada Kawasan Peninggalan Islam di Wilayah Perkotaan Jawa Timur: Studi Kasus Kawasan Maulana Malik Ibrahim, Ampel, dan Giri”, (Tugas Akhir, Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, 2020), 135-136

Kemudian terjadi Perang Suksesi Jawa I (1704–1708) memberikan pengaruh signifikan terhadap pergeseran kekuasaan di Gresik. Raden Ngabehi Nalladika, penguasa Gresik saat itu, diketahui mendukung Amangkurat III, yang akhirnya kalah dari koalisi Pangeran Puger (Pakubuwana I) dan VOC. Kekalahan tersebut memaksa Pakubuwana I, sebagai penguasa baru Mataram, menunjuk sosok baru untuk memimpin Gresik. Pilihan jatuh kepada Kyai Tumenggung Pusponegoro, yang secara politis dan genealogis dinilai memiliki legitimasi kuat baik sebagai menantu Tumenggung Nalladika maupun ipar dari Ngabehi Arya Nalladika. Selain itu, Pusponegoro juga menjabat sebagai mantri nayaka, yang semakin mengukuhkan kelayakannya sebagai penguasa. Dengan berbagai pertimbangan strategis dan kedekatan kekerabatan, ia diangkat sebagai Bupati Gresik menggantikan iparnya, tepat pada masa krisis akibat konflik suksesi tersebut. Kyai Tumenggung Poesponegoro diangkat sebagai Bupati Gresik Tahun 1706 oleh Susuhunan Pakubuwana I (Pangeran Puger) dari Kerajaan Mataram Islam.³⁵

Pada masa kekuasaan Bupati Poespanegoro, struktur pemerintahan Kabupaten Gresik yang berlokasi di Tandes mulai dikembangkan dengan mengadopsi unsur-unsur administratif dari gaya pemerintahan Mataram dan kolonial Belanda. Poespanegoro, yang berasal dari kalangan bangsawan, membangun dinasti kekuasaan yang diwariskan secara turun-temurun di wilayah tersebut. Meskipun demikian, kekuasaan tersebut tetap berada di bawah pengaruh dan pengawasan pemerintahan Mataram dan Belanda. Hal ini terlihat dari pengangkatan para Bupati Gresik di Tandes yang dilakukan oleh pihak Mataram atau Belanda. Ciri khas pemerintahan kerajaan pada periode ini tampak jelas

³⁵ Eko Jarwanto, *Penguasa-Penguasa di Nagari Tandhes*, (Gresik: Yayasan Mataseger, 2024), 67

melalui pembagian kekuasaan dalam dua jabatan Bupati, yaitu Bupati Kasapuhan dan Bupati Kanoman.³⁶



Gambar 2.1 Peta wilayah Gresik pada tahun 1724 yang diambil dari karya "Oud en Nieuw Oost-Indiën" oleh François Valentyn.

(Sumber : Atlas of Mutual Heritage)

Berdasarkan tradisi lisan yang berkembang di masyarakat, lokasi pusat pemerintahan Kabupaten Tandes diperkirakan berada di wilayah yang kini termasuk dalam Kecamatan Gresik. Namun demikian, letak pastinya masih bersifat spekulatif dan belum dapat dipastikan secara arkeologis maupun historis. Perlu ditegaskan pula bahwa Tandes di Gresik tidak identik dengan Tandes yang berada di wilayah Surabaya. Sumber informasi lainnya menyebutkan bahwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda, pusat administrasi Kabupaten Gresik berada di sekitar kawasan Alun-alun Gresik. Hal ini diperkuat dengan keberadaan simbol-simbol tradisional pemerintahan kabupaten di area tersebut, seperti Masjid Jami', pendopo kabupaten, pohon beringin, serta berbagai bangunan peninggalan kolonial lainnya.³⁷

³⁶ Irma Lutfiana Dewi, "Peralihan Kekuasaan Gresik dari Kerajaan Giri Kedaton menjadi Kabupaten Tandes (Studi Historis)", (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 28

³⁷ Soebali, *Grissee Tempo Doeloe*, (Gresik, Pemerintah Kabupaten Gresik, 2004), 112

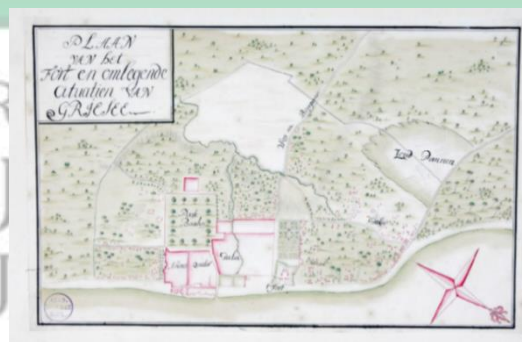
Wilayah Gresik secara hukum berada di bawah kekuasaan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) sebagai konsekuensi dari dinamika politik yang terjadi di lingkungan Kesultanan Mataram pada tahun 1743. Penyerahan ini merupakan hasil dari perjanjian antara Sultan Pakubuwana II dan VOC, yang dilatarbelakangi oleh peristiwa Geger Pecinan tahun 1740, yakni sebuah pemberontakan besar yang dipelopori oleh komunitas Tionghoa di Batavia dan kemudian menyebar ke wilayah Mataram. Dalam konteks tersebut, VOC memberikan bantuan militer kepada Pakubuwana II untuk menumpas pemberontakan serta mengamankan kembali otoritasnya atas takhta Mataram. Sebagai bentuk kompensasi atas dukungan tersebut, dan dengan kondisi keuangan Mataram yang saat itu sangat terpuruk, Susuhunan Pakubuwana II menyerahkan sejumlah wilayah strategis di pesisir utara Jawa kepada VOC, termasuk di dalamnya Gresik. Peristiwa ini menjadi momentum transisi politik dan administratif yang signifikan bagi Gresik, yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Mataram, kemudian beralih ke dalam sistem administrasi kolonial VOC.³⁸

Dalam dinamika transisi kekuasaan tersebut, posisi Kyai Tumenggung Joyonegoro sebagai Bupati Gresik mengalami dualitas legitimasi. Pada tahap awal, sebelum tahun 1743, pengangkatannya dilakukan langsung oleh Susuhunan Pakubuwana II sebagai representasi kekuasaan Kesultanan Mataram di wilayah Gresik. Namun, setelah terjadinya penyerahan wilayah kepada VOC pada tahun 1743, otoritas kolonial melalui Pemerintah Agung di Batavia melakukan pengangkatan ulang terhadap Joyonegoro, menandai penyesuaian administratif dengan struktur kekuasaan baru yang dipegang oleh VOC. Sejak saat itu, tidak hanya kewenangan pemerintahan

³⁸ Eko Jarwanto, *Gresik Punya Cerita Peran Gresik*, (Gresik: Yayasan Mataseger, 2022), 140-141

lokal yang berada di bawah otoritas VOC, tetapi seluruh kegiatan ekonomi dan sistem perdagangan di Gresik juga terintegrasi dalam mekanisme kontrol dan regulasi yang ditetapkan oleh kongsi dagang Belanda tersebut.³⁹

Kehadiran Gresik sebagai satuan wilayah administratif yang signifikan mulai mendapatkan pengakuan yang lebih nyata ketika kota ini berada di bawah dominasi kekuasaan para pedagang asing, khususnya di bawah kendali *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC). Pada tahun 1746, setelah Gresik resmi menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kompeni Belanda, proses pemerintahan setempat mengalami perubahan penting, di mana pengangkatan bupati di wilayah ini dilakukan langsung oleh otoritas Kompeni. Dalam struktur administratif saat itu, *Afdeling* Gresik mencakup tiga daerah utama, yakni Gresik, Lamongan, dan Sidayu. Integrasi ketiga daerah ini dalam satu afdeling mencerminkan upaya Kompeni untuk memperkuat kontrol politik dan ekonomi di kawasan pesisir utara Jawa Timur yang strategis.⁴⁰



Gambar 2.2 Sketsa Peta Kota Gresik tahun 1770 memperlihatkan letak pendopo bupati (dalem) yang masih berada di sisi pojok utara alun-alun kota, menandai pusat pemerintahan tradisional masa itu.

(Sumber : Atlas of Mutual Heritage)

³⁹ Eko Jarwanto, *Penguasa-Penguasa di Nagari Tandhes*, 88

⁴⁰ Purnawan Basundoro, "Industrialisasi, Perkembangan Kota, dan Respon Masyarakat", *Humaniora* 13, No. 2, 2001, 132, <https://www.neliti.com/publications/11798/>.

Perubahan situasi politik di Pulau Jawa terjadi ketika kekuasaan atas wilayah ini beralih dari tangan Prancis kepada Inggris. Dalam rangka penggantian administrasi, Thomas Stamford Raffles diangkat sebagai Gubernur Jenderal menggantikan posisi yang sebelumnya dipegang oleh Herman Willem Daendels. Memahami pentingnya *Afdeling* Gresik, khususnya potensi strategisnya sebagai pelabuhan dagang, Raffles mengambil kebijakan untuk menaikkan status administratif Gresik, dari yang semula hanya berstatus *afdeling* menjadi sebuah karesidenan tersendiri. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi dan posisi geografis Gresik dalam sistem perdagangan regional.⁴¹

Reorganisasi administratif yang diterapkan oleh Raffles sempat mengubah tatanan pemerintahan di Gresik, namun perubahan tersebut tidak berlangsung lama. Setelah kekuasaan di Pulau Jawa kembali berada di tangan Belanda, sistem administrasi pun ditata ulang mengikuti kebijakan kolonial Belanda. Tepatnya pada 21 tanggal September 1826 tercantum pada *Besluit* dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* no. 53 tahun 1826, pemerintah kolonial secara resmi membubarkan Karesidenan Gresik. Sebagai dampaknya, wilayah Kabupaten Gresik digabungkan ke dalam Karesidenan Surabaya bersama Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Lamongan.⁴² Seorang Asisten Residen ditunjuk sebagai kepala administrasi di wilayah tersebut dan bertanggung jawab langsung kepada Residen Surabaya. Meskipun demikian, pada tingkat lokal, struktur pemerintahan tetap mempertahankan keberadaan bupati sebagai pejabat

⁴¹ Ahmad Sholehuddin Suryanullah, "Gagasan Kolonial Tentang Permasalahan Lingkungan di Gresik pada Paruh Kedua Abad XIX", *Historiography*, Vol, 5, No. 1, 2025, 61, <https://journal2.um.ac.id/index.php/JDS/article/download/57787/pdf>

⁴² *Besluit* dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* No. 53 Tahun 1826

pribumi yang memiliki peran penting dalam pengelolaan wilayah,⁴³ yang berfungsi menjalankan administrasi daerah di bawah pengawasan dan kontrol kolonial.

Berdasarkan data sensus penduduk Hindia Belanda tahun 1920 yang tercantum dalam *Tabel der Bevolkingssterkte en Administratieve Indeling*, wilayah Gresik (*Grissee*) yang termasuk dalam Provinsi Jawa Timur (*Oost-Java*) memiliki jumlah total penduduk sebanyak 783.623 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.436 orang merupakan warga Eropa, 305 orang Timur (*Oosterlingen*), 4.392 orang Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) dan 778.926 orang pribumi (*Inlanders*).⁴⁴ Tingginya jumlah penduduk ini menunjukkan bahwa pada awal Abad XX, Gresik memiliki kepadatan dan aktivitas sosial-ekonomi yang signifikan, serta berperan sebagai kawasan penting dalam jaringan administratif dan demografis wilayah Karesidenan Soerabaja.



Gambar 2.3 Peta Gresik pada tahun 1928

(Sumber : Schoolatlas van Nederlandsch Indië)

Peta tahun 1928 memperlihatkan bahwa wilayah Kabupaten Gresik (disebut *Grissee* dalam peta kolonial) memiliki cakupan administratif yang luas dan strategis

⁴³ P. P. Rooda Van Eysinga, *Handboek der Land- en Volkenkunde, Geschied-, Taal-, Aardrijks- en Staatkunde van Nederlandsch Indie*, (Amsterdam: L. Van Bakkenes, 1850), 194, <https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/132691>

⁴⁴ Berdasarkan sensus 1920 yang dimuat dalam *Schoolatlas van Nederlandsch-Indië*, penduduk wilayah *Grissee* tercatat sebanyak 783.623 jiwa, yaitu : sebanyak 2.436 orang Eropa, 305 orang Timur (*Oosterlingen*), 4.392 orang Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) dan 778.926 orang pribumi, 8

dalam struktur pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Wilayah ini terbentang dari garis pantai utara Jawa Timur, mulai dari daerah pesisir seperti Bawean, Sidayu, Boengoe (Bungah), Pangkah, Patjiran (Paciran), hingga ke pedalaman yang kini meliputi Lamongan, BABad, Karangbinangoen, Karanggeneng, Tjerme-Kidoel (Cerme Selatan), Soemari, Kedungpring, Kembangbae, dan Ngimbang. Di sebelah barat, Kabupaten Gresik berbatasan langsung dengan Bojonegoro, sementara di timur berbatasan dengan wilayah administratif Surabaya. Pusat pemerintahan kabupaten ditandai dengan kota Grisee yang terhubung langsung melalui jalur kereta api ke kota-kota penting seperti Soerabaja (Surabaya), Lamongan, dan Toeban (Tuban), menunjukkan peran sentral Gresik sebagai simpul transportasi dan ekonomi. Keberadaan rel kereta api dan jalur sungai menegaskan posisi strategis Gresik dalam jaringan distribusi kolonial⁴⁵

Dalam catatan dokumen *Regeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië* tahun 1931 menjelaskan tentang struktur pemerintahan di wilayah Afdeeling Gresik dan Kabupaten Gresik pada tahun 1931, struktur pemerintahan di wilayah *Afdeling* Gresik yang termasuk dalam Karesidenan Surabaya menunjukkan adanya pembagian wewenang yang jelas antara pejabat kolonial Belanda dan elite lokal pribumi. *Afdeling* Gresik dikelola langsung oleh seorang pejabat Eropa bernama H.M. van Altena yang menjabat sebagai residen sejak 2 November 1930. Beliau dibantu oleh pejabat-pejabat kolonial lainnya seperti M.F. Pieter yang menjabat sebagai Sekretaris *Afdeling* atau kepala kantor sejak 2 Maret 1929, serta J.C.W.F. Pelle sebagai Komisi kelas satu sejak 5 Juli 1929. Struktur administratif ini mencerminkan sistem birokrasi kolonial yang hirarkis dan tersentralisasi, di mana pengawasan dan pengambilan keputusan utama

⁴⁵ W. van Gelder dan C. Lekkerkerker, *Schoolatlas van Nederlandsch-Indië*, edisi ke-19 (Groningen: J.B. Wolters, 1928), 77, <https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?coll=boeken&identifier=MMKB24:068487000:0002>

tetap berada di tangan Belanda. Selain struktur sipil, pengawasan keamanan juga menjadi prioritas penting, dibuktikan dengan adanya posisi *Hoofdpolitieopziener* yang dijabat oleh J. Jahn sejak 27 Agustus 1927.

Di sisi lain, struktur pemerintahan lokal dalam wilayah Kabupaten Gresik masih dijalankan oleh elite pribumi, namun dengan pengawasan ketat dari otoritas kolonial. Raden Adipati Ario Soerowinoto menjabat sebagai bupati (bupati) sejak 15 Agustus 1917, dibantu oleh seorang patih bernama Mas Soetardjo yang dilantik pada 24 September 1929. Posisi administratif lainnya dipegang oleh Raden Kodrat Samadikoen yang bertugas sebagai sekretaris Kabupaten kelas dua sejak 4 April 1929. Wilayah Kabupaten ini dibagi menjadi beberapa distrik kawedanan yang masing-masing dipimpin oleh seorang wedana, antara lain Kiai Ngabehi Ardjoadiprodjo di Gresik (28 September 1929), Raden Pandji Goeroadikoesoemo di Cerme (30 November 1928), Raden Soebani di Sidayu (25 Agustus 1928), dan Raden Abdoelchamid di Karangbinangoen (15 Maret 1930). Selain itu, pemerintah kolonial juga menunjuk tokoh dari komunitas etnis sebagai penghubung administratif, seperti Han Khee Liang sebagai Letnan Cina (19 September 1929) untuk komunitas Tionghoa, serta Said Hoessin bin Moehamad bin Oemar bin Sjahab sebagai Kapiten Arab (22 Mei 1913) untuk komunitas Arab.⁴⁶

Tabel 2.1 Struktur Pemerintahan Afdeling Gresik dan Kabupaten Gresik tahun 1931

Kategori	Jabatan	Nama Pejabat	Tanggal Penunjukan
Pejabat inti Kolonial (Afdeling Gresik)	Residen	H. M. van Altena	2 November 1930
	Afdeeling	M. F. Pieter	2 Maret 1929
	Komisi Kelas 1	J. C. W. F. Pelle	5 Juli 1929

⁴⁶ *Regeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië* tahun 1931, 362-363

	Kepala Pengawas Kepolisian	J. Jahn	27 Agustus 1927
Pejabat inti Pribumi (Kabupaten Gresik)	Bupati	Raden Adipati Ario Soerowinoto	15 Agustus 1917
	Patih	Mas Soetardjo	24 September 1929
	Sekretaris	Raden Kodrat Samadikoen/Sastrodinoto	4 April 1929
Kepala Distrik (Wedana)	Gresik	Kiai Ngabehi Ardjoadiprodjo	28 September 1929
	Cerme	Raden Pandji Goeroadikoesoemo	30 November 1928
	Sidayu	Raden Soebani	25 Agustus 1928
	Karangbinangun	Raden Abdoelchamid	15 Maret 1930
Jabatan Khusus	Letnan Cina	Han Khee Liang	19 September 1929
	Kapiten Arab	Said Hoessin bin Moehamad bin Oemar bin Sjahab	22 Mei 1913

Sumber/Source : Regeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië tahun 1931

B. Periode I (1934–1942): Penghapusan Kabupaten Gresik dan Sentralisasi Pemerintahan Kolonial

Latar belakang penggabungan administratif antara Kabupaten Gresik dan Kabupaten Surabaya dijelaskan dalam sejumlah kajian akademik sebagai akibat dari faktor geografis, khususnya pendangkalan yang terjadi di wilayah pelabuhan Gresik. Pendangkalan ini menyebabkan berkurangnya fungsi strategis pelabuhan Gresik sebagai pusat perdagangan dan pelayaran, sehingga mendorong pemerintah kolonial memindahkan aktivitas pelabuhan utama ke Surabaya, yang pada waktu itu berkembang menjadi kota pelabuhan modern dengan infrastruktur yang lebih memadai. Konsekuensi dari pergeseran fungsi pelabuhan ini turut memengaruhi kebijakan

administratif, termasuk dalam hal penggabungan wilayah pemerintahan antara Gresik dan Surabaya. Namun, informasi tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan keterangan dari Bapak Kris Adji, selaku budayawan Gresik, yaitu :

“Pada masa kolonial Belanda terdapat upaya untuk mengubah Surabaya menjadi Kota metropolitan, karena itu walaupun Gresik pada saat itu memiliki pelabuhan yang besar, lebih ramai, pelabuhan yang dalam dan tenang. Kolonial melakukan pengembangan pelabuhan Kali mas yang nantinya merupakan Pelabuhan Tanjung perak, karena itu pusat-pusat yang terkait perdagangan dan kegiatan lainnya dipindahkan ke Surabaya, kemudian Gresik mulai ditinggalkan. Meskipun masih terdapat kegiatan perdagangan di Gresik. Namun karena peraturan dan kebijakan yang memfokuskan kegiatan lebih di Surabaya. Alasan transformasi administrasi bukan karena pendangkalan namun karena ekonomi dan politik. Makanya dulu Gresik dijadikan Kabupaten Surabaya, bisa jadi dulu dalam rangka untuk mengembangkan kota Surabaya”⁴⁷

Dari pertanyaan Bapak Kris Adji selaku budayawan Gresik tersebut, bahwa kebijakan penggabungan administratif Gresik ke dalam wilayah Kabupaten Surabaya tidak semata-mata disebabkan oleh faktor geografis seperti pendangkalan pelabuhan, sebagaimana dijelaskan dalam sejumlah literatur. Beliau menekankan bahwa latar belakang utama dari transformasi tersebut justru lebih bersifat ekonomi dan politis, sejalan dengan visi Pemerintah Kolonial Belanda untuk menjadikan Surabaya sebagai kota metropolitan dan pusat perdagangan utama di kawasan timur Jawa. Meskipun pada masa itu pelabuhan Gresik memiliki kedalaman, kestabilan, dan aktivitas niaga yang tinggi, kolonial justru memilih untuk mengembangkan Pelabuhan Kalimas yang kemudian menjadi Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya.

Langkah tersebut diikuti oleh pemindahan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan administrasi dari Gresik ke Surabaya secara bertahap, sebagai bagian dari strategi kolonial untuk memusatkan kekuatan logistik dan kontrol perdagangan di satu titik

⁴⁷ Wawancara dengan Pak Kris Adji dirumahnya pada 30 April 2025 (Jl. Usman Sadar Gg. XVII No.15, Ngipik, Sukorame, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik)

strategis. Akibatnya, meskipun aktivitas perdagangan masih berlangsung di Gresik, wilayah tersebut mulai kehilangan fungsinya sebagai simpul utama perdagangan dan pemerintahan. Oleh karena itu, transformasi administratif Gresik menjadi bagian dari Kabupaten Surabaya dipandang bukan sebagai akibat dari kemunduran alamiah, tetapi sebagai langkah politis dalam rangka memperkuat peran Surabaya sebagai pusat kota kolonial modern.

Memasuki awal dekade 1930-an, Hindia Belanda turut terdampak oleh krisis ekonomi global yang dikenal sebagai *Malaise* atau *Great Depression*, yang melanda hampir seluruh dunia. Dampak krisis tersebut tidak hanya dirasakan dalam sektor ekonomi dan perdagangan, tetapi juga memaksa pemerintah kolonial melakukan penyesuaian di bidang administratif sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran. Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah penghapusan dan penggabungan sejumlah kabupaten (*regentschap*) yang dianggap tidak efisien secara fiskal dan administratif. Menanggapi kondisi tersebut, Eko Jarwanto selaku sejarawan Gresik menyatakan bahwa:

“Hindia Belanda mengalami krisis ekonomi bahkan tidak hanya Hindia Belanda namun juga seluruh dunia. Jadi untuk efisiensi beberapa Kabupaten di Jawa Timur dibubarkan dan digabungkan tidak hanya Gresik namun juga 5/7 Kabupaten yang dibubarkan yang kemudian digabungkan dengan Kabupaten tetangganya.”⁴⁸

Sebagaimana dijelaskan secara rinci dalam sumber *De Indische Courant* dalam berita *Oost-Java Nieuws*, latar belakang penggabungan Kabupaten Gresik dan Kabupaten Surabaya tidak dapat dilepaskan dari konteks krisis ekonomi global (Depresi Besar) yang melanda dunia sejak akhir 1920-an dan turut berdampak signifikan terhadap kondisi fiskal pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dalam upaya

⁴⁸ Wawancara dengan Pak Eko Jarwanto di SMA As-Sa’adah Bunga pada 28 Mei 2025

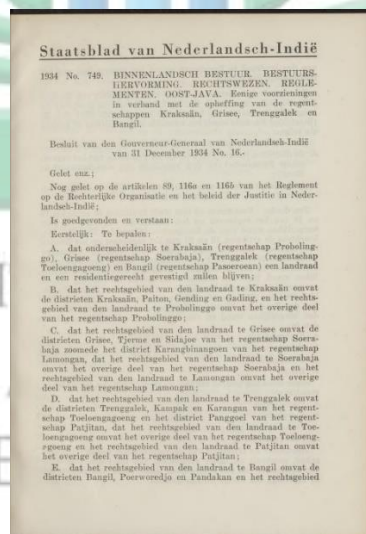
menekan pengeluaran negara agar seimbang dengan pemasukan yang semakin menurun, pemerintah kolonial menerapkan kebijakan *bezuiniging* (penghematan anggaran) secara sistematis, termasuk dalam bidang pemerintahan daerah. Salah satu langkah konkret dari kebijakan tersebut adalah pembubaran sejumlah regentschap (kabupaten) yang dianggap kurang strategis dari sisi ekonomi dan administrasi.⁴⁹

Kabupaten Gresik dinilai tidak memiliki basis ekonomi kolonial seperti perkebunan Eropa atau industri besar, serta Soerabaja, yang wilayah regentschap-nya mengalami penyusutan akibat pembentukan kota otonom (*stadsgemeente*), menjadi dua entitas administratif yang dianggap layak untuk digabungkan. Pemerintah menilai bahwa fungsi-fungsi pemerintahan di Regentschap Soerabaja semakin kecil karena sebagian besar urusan keamanan dan ketertiban telah diambil alih oleh otoritas kota dan kepolisian. Sementara itu, Gresik dianggap memiliki kesamaan karakteristik sosial-ekonomi dengan wilayah pedesaan Surabaya, sehingga penggabungan keduanya dinilai logis dan tidak menimbulkan gesekan besar. Dengan dalih efisiensi dan penyederhanaan struktur pemerintahan, pemerintah kolonial akhirnya secara resmi menggabungkan Regentschap Gresik dan Regentschap Soerabaja berdasarkan *Staatsblad* 1934 No. 749, yang mulai berlaku per 1 Januari 1935.

Kebijakan yang tertuang dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1934 No. 715 mengenai perubahan pembagian wilayah *dienstplichtkringen* (lingkungan wajib militer) menjadi *inschrijvingskringen* (daerah pendaftaran wajib militer) menunjukkan adanya penyesuaian administratif yang berdampak terhadap struktur kewilayahan di berbagai *regentschap*, termasuk Gresik (*Grissee*). Melalui keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 29 Desember 1934 No. 8, aturan terkait pembagian

⁴⁹ *De Indische Courant* dalam berita *Oost-Java Nieuws* tanggal 12 Juni 1935

wilayah pendaftaran wajib militer untuk beberapa daerah—yakni Gresik, Trenggalek, Bangil, dan Kraksaan—dinyatakan tidak berlaku lagi atau dihapus dari ketentuan sebelumnya dalam *Staatsblad 1931 No. 447*.⁵⁰ Perubahan ini menandakan terjadinya reorganisasi administratif di bidang pertahanan kolonial, di mana wilayah Gresik tidak lagi memiliki status administratif tersendiri dalam sistem kewajiban militer. Secara implisit, kebijakan ini memperlihatkan adanya pergeseran fungsi wilayah Gresik dari satuan administratif yang memiliki peran tersendiri dalam registrasi penduduk militer, menjadi bagian dari sistem kewilayahan yang lebih terpusat di bawah pengawasan administratif Surabaya. Transformasi yang terjadi bukan hanya bersifat militer, tetapi juga menunjukkan pergeseran kontrol pemerintah kolonial terhadap pendataan dan mobilisasi penduduk Gresik.



Gambar 2.4 Staatsblad van Nederlandsch-Indië Tahun 1934 No. 749

(Sumber : <https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/> . *Staatsblad van Nederlandsch-Indië voor ...*, 1934 tanggal 01 Januari 1934)

⁵⁰ *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* Tahun 1934 No. 715

Transformasi administratif wilayah Gresik pada masa kolonial Belanda juga dapat ditelusuri melalui *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* Tahun 1934 No. 749, yang merupakan peraturan resmi pemerintah kolonial Hindia Belanda terkait reorganisasi pemerintahan dalam negeri (*binnenlandsch bestuur*). Dalam beleid ini, pemerintah kolonial menghapus sejumlah Kabupaten (kabupaten), seperti Kraksaän, Grisee, Trenggalek, dan Bangil. Tiap wilayah yang sebelumnya berdiri sebagai Kabupaten kemudian dialihkan fungsi yudisial dan administratifnya ke pusat-pusat yang lebih besar dan dianggap lebih strategis, seperti Probolinggo, Surabaya, Tulungagung, dan Pasuruan. Penghapusan ini merupakan bagian dari kebijakan *bestuurshervorming* atau reformasi pemerintahan yang memusatkan kendali dan menggabungkan wilayah-wilayah yang dianggap tidak efisien secara ekonomi maupun politik ke dalam unit administratif yang lebih besar.⁵¹

Dalam *Staatsblad* tersebut ditegaskan bahwa wilayah hukum (*rechtsgebied*) dari *landraad* Gresik hanya meliputi sebagian distrik di bekas wilayah Gresik, yaitu distrik Gresik (*Grisee*), Tjermee (Cerme), dan *Sidajoe* (Sidayu), serta satu distrik dari Lamongan, yakni Karangbinangoen. Wilayah-wilayah ini secara hukum berada di bawah yurisdiksi *Landraad* Gresik, namun secara administratif berada dalam kekuasaan Kabupaten Surabaya. Transformasi yang terjadi pada wilayah Gresik akibat kebijakan ini memperlihatkan perubahan struktur pemerintahan dari otonomi administratif menjadi wilayah subordinat yang tetap memiliki fungsi yuridis. Selain itu, kebijakan ini juga mengalihkan pengelolaan arsip hukum dan catatan sipil seperti registrasi pernikahan, akta kelahiran, serta dokumen perdata lainnya dari pejabat Gresik ke

⁵¹ *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* Tahun 1934 No. 749

pejabat di bawah yurisdiksi Surabaya, sehingga menegaskan sentralisasi administrasi kolonial.

Penghapusan nama Gresik sebagai satuan administratif secara resmi merupakan bagian dari kebijakan reorganisasi pemerintahan kolonial yang terjadi pada tahun 1934. Dalam kebijakan tersebut, status Gresik diturunkan dari *regentschap* (kabupaten) menjadi distrik atau kewedanan. Sebagai konsekuensinya, Gresik tidak lagi memiliki kedudukan administratif sebagai kabupaten tersendiri dan tidak lagi dipimpin oleh seorang bupati (regent), melainkan oleh seorang wedana yang berada di bawah otoritas langsung Kabupaten Surabaya. Wilayah bekas Kabupaten Gresik kemudian dibagi ke dalam beberapa kewedanan, antara lain Kewedanan Gresik, Kewedanan Sidayu, Kewedanan Cerme, yang seluruhnya berada di bawah struktur administratif Kabupaten Surabaya.⁵²

Sebagai lanjutan dari kebijakan penggabungan administratif antara Kabupaten Soerabaja dan Kabupaten Grisee oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, diselenggarakan sidang gabungan perdana antara Dewan Kabupaten (*Regentschapsraad*) Surabaya dan Gresik. Pada awal tahun tepatnya 1935 terjadi pertemuan penting ini berlangsung di ruang besar kantor Gubernur, dengan agenda utama membahas penetapan lokasi ibu kota bagi Kabupaten hasil penggabungan. Rapat dihadiri oleh sekitar tiga puluh anggota dari kedua dewan, dan dibuka secara resmi oleh Bupati gabungan, Raden Adipati Ario Soerjowinoto. Dalam pidatonya, beliau menyinggung pembentukan Dewan Gresik pada tahun 1929 serta penunjukannya sebagai pemimpin administratif atas dua wilayah tersebut. Soerjowinoto menekankan

⁵² Wawancara dengan Pak Eko Jarwanto pada 28 Mei 2025

pentingnya semangat kolektif untuk mengedepankan kepentingan umum dalam mengambil keputusan strategis mengenai pusat pemerintahan.⁵³

Perdebatan mengenai penentuan ibu kota Kabupaten menjadi fokus utama sidang. Raden Soeparto, Ketua *Landraad* luar biasa Surabaya, menyampaikan harapannya atas kemajuan wilayah di bawah kepemimpinan bupati yang baru. Namun, sebagian besar pembicara dalam forum mengangkat pentingnya mempertimbangkan akar tradisi serta hubungan historis antara masyarakat Gresik dengan struktur pemerintahan lokal. Mereka menilai bahwa keputusan administratif tidak semestinya hanya dilandaskan pada pertimbangan rasionalisme Eropa semata, tetapi juga perlu dilihat dari perspektif budaya lokal yang menghargai kesinambungan historis dan identitas kolektif. Selain itu, sejumlah pandangan menyatakan bahwa penetapan Surabaya sebagai ibu kota tidak akan memberikan keuntungan strategis yang signifikan, sementara bagi Gresik, kehilangan status sebagai pusat pemerintahan akan menjadi kemunduran, baik secara administratif maupun simbolis. Dalam tataran politik yang lebih luas, dukungan terhadap Gresik juga muncul di kalangan *Volksraad*, bahkan sampai pada usulan untuk menamai Kabupaten gabungan tersebut sebagai “Grissee” demi mempertahankan kontinuitas historis wilayah. Dalam suasana forum yang kian dinamis, mayoritas peserta menyuarakan dukungan terhadap Gresik.

Setelah seluruh pandangan dipertimbangkan, dilakukan pemungutan suara. Hasil akhir menunjukkan kemenangan telak bagi Gresik, dengan 17 suara mendukung dan 8 menolak penetapannya sebagai ibu kota Kabupaten baru. Keputusan ini diterima dengan antusias dan segera disahkan melalui pembacaan naskah resmi dalam bahasa Belanda dan Melayu. Agenda rapat kemudian dilanjutkan dengan pembahasan teknis

⁵³ *De Indische Courant Van Woensdag* dalam berita *De regentschapsraad* tanggal 2 Februari 1935

mengenai penyatuan struktur dewan menjadi satu badan kolegal, serta isu-isu administratif lainnya seperti distribusi bahan pangan, penggajian aparatur di Gresik, dan usulan pendirian lembaga perbankan pertanian (Padibank). Keputusan tersebut menandai momentum penting dalam perjalanan administrasi kolonial lokal, serta menegaskan kembali peran strategis Gresik sebagai pusat pemerintahan tingkat kabupaten dalam masa transisi struktur administratif Hindia Belanda.

Keputusan pengesahan Gresik sebagai ibu kota kabupaten hasil pemungutan suara tersebut segera memunculkan implikasi teknis yang membutuhkan tindak lanjut administratif dari pemerintah kolonial. Salah satu dokumen penting yang mencerminkan dinamika tersebut adalah laporan resmi mengenai telegram yang diterima oleh Bupati Kabupaten Surabaya, R.A.A. Soerjowinoto, sebagaimana dimuat dalam sumber *De Locomotif* dalam berita *Soerabaia's Bupati* tanggal 8 Mei 1935. Dalam laporan tersebut, dinyatakan bahwa Gubernur Jenderal Hindia Belanda telah menetapkan Gresik sebagai tempat kedudukan resmi (*standplaats*) bagi bupati dari Kabupaten gabungan Surabaya dan Gresik. Penetapan ini menjadi bukti konkret bahwa keputusan politik yang telah disahkan melalui forum dewan kabupaten juga memperoleh legitimasi administratif dari otoritas pusat di Buitenzorg (Bogor).⁵⁴

Berdasarkan hasil rapat diatas, kemudian dikeluarkan kebijakan yang tertuang dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1935 No. 164 berisi keputusan penting dari Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang menetapkan Grisee (Gresik) sebagai *hoofdplaats* atau ibu kota sementara (*bij wijze van proef*) dari Kabupaten Surabaya. Sementara itu, posisi *assistent-resident* (asisten residen) yang sebelumnya berkedudukan di Gresik, dipindahkan ke Surabaya. Secara administratif, kebijakan ini

⁵⁴ *De Locomotif* dalam berita *Soerabaia's Bupati* tanggal 8 Mei 1935

menunjukkan adanya eksperimen administratif kolonial yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda untuk menilai efektivitas penataan wilayah dan pusat pemerintahan di daerah Jawa Timur, khususnya di wilayah yang mencakup Surabaya dan Gresik.⁵⁵

Transformasi yang terjadi di wilayah Gresik akibat kebijakan ini bersifat institusional dan fungsional, yakni berubahnya status Gresik dari wilayah distrik biasa menjadi pusat administratif pemerintahan kabupaten. Perubahan ini berdampak pada peningkatan peran birokrasi kolonial di Gresik, termasuk penguatan fungsi pemerintahan sipil, pengarsipan, serta administrasi hukum dan ekonomi lokal. Secara sosial-ekonomi, kebijakan tersebut juga mempercepat tumbuhnya aktivitas perdagangan dan jasa di sekitar pusat pemerintahan baru karena meningkatnya mobilitas pejabat dan masyarakat pendukung birokrasi.

Rapat Perdana Dewan Kabupaten Surabaya dilaporkan dilaksanakan pada hari Selasa pagi di kantor Kabupaten Surabaya tepatnya di Gresik, yang dimuat dalam arsip berita yang berjudul *Het Regentschap* terbitan tanggal 28 Oktober 1936. Rapat ini menegaskan bahwa setelah penetapan Gresik sebagai *hoofdplaats* (ibu kota) sementara dari *Regentschap Soerabaja* pada tahun 1935, terjadi proses penguatan fungsi pemerintahan lokal yang menandai dimulainya aktivitas administratif secara penuh di wilayah Gresik. Terbentuknya *Regentschapsraad* (dewan kabupaten) dengan jumlah 21 anggota menandakan adanya struktur birokrasi kolonial yang lebih mapan, di mana keputusan-keputusan penting seperti perubahan tarif pajak, pengelolaan fasilitas publik, dan pembentukan lembaga sosial mulai dilakukan di tingkat lokal. Kegiatan rapat ini juga memperlihatkan adanya upaya kolonial Belanda untuk menerapkan model pemerintahan partisipatif semu, dengan melibatkan tokoh-tokoh bumiputra dan pejabat

⁵⁵ *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* Tahun 1935 No. 164

Eropa dalam lembaga perwakilan lokal. Hal ini mencerminkan kebijakan *administrative experiment* kolonial dalam memindahkan pusat pemerintahan ke Gresik, sekaligus menguji efektivitas pengelolaan daerah di luar kota besar seperti Surabaya.⁵⁶

Transformasi yang terjadi di wilayah Gresik akibat kebijakan ini bersifat politik-administratif dan sosial ekonomi. Secara politik, Gresik mengalami peningkatan status dari distrik menjadi pusat pemerintahan kabupaten, yang menjadikannya tempat pengambilan keputusan administratif dan keuangan daerah. Secara ekonomi, keputusan dalam rapat seperti penurunan pajak, penghapusan retribusi tanah, dan pengalihan kepemilikan aset publik seperti rumah potong hewan dari provinsi ke kabupaten menunjukkan adanya upaya untuk menghidupkan kembali kegiatan ekonomi rakyat di tengah kondisi sulit masa 1930-an (Depresi Besar). Selain itu, rencana pembangunan fasilitas publik seperti lapangan olahraga di Tlogo Dendo menandakan berkembangnya orientasi pembangunan sosial di bawah pemerintahan lokal Gresik. Rapat tersebut bukan sekadar peristiwa administratif, melainkan mencerminkan transformasi nyata Gresik menuju pusat pemerintahan otonom yang berfungsi penuh dalam tata kelola daerah kolonial.

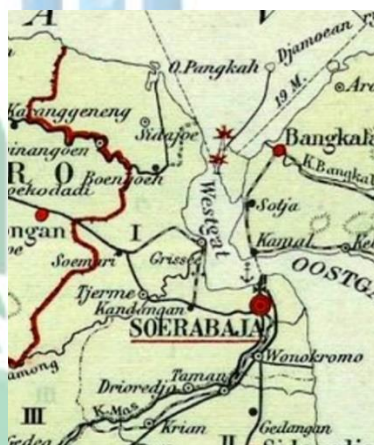
Pusat pemerintahan dari kabupaten Surabaya yang ada di Gresik hanya bersifat sementara yang mana kemudian dipindahkan ke daerah Surabaya. Berikut informasi yang disampaikan oleh Pak Eko Jarwanto selaku Sejarawan Gresik, yaitu :

“Kebijakan Kabupaten Surabaya ini terkait pendopo (pusat pemerintaha) yang awalnya ada di Gresik, yang ada di daerah Alun-alun sekarang, nah hal tersebut terjadi hanya sekitar 2-3 tahun, Kira-kira sampai tahun 1937.”⁵⁷

⁵⁶ *De Indische Courant* dalam berita *Het Regentschap* tanggal 28 Oktober 1936

⁵⁷ Wawancara dengan Pak Eko Jarwanto pada 28 Mei 2025

Menurut Bapak Eko Jarwanto, sejarawan Gresik, pemindahan pusat pemerintahan dari Gresik ke Surabaya tercermin secara simbolik dalam kebijakan terkait pendopo kabupaten. Pendopo yang semula berada di kawasan Alun-Alun Gresik hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan selama sekitar dua hingga tiga tahun setelah penggabungan administratif dengan Kabupaten Surabaya, diperkirakan hingga tahun 1937. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal Gresik sempat tetap digunakan sebagai lokasi administratif, kebijakan Pemerintah Kabupaten Surabaya secara bertahap mengalihkan fungsi-fungsi pemerintahan ke wilayah Surabaya.



Gambar 2.5 Peta Gresik setelah digabungkan dengan Kabupaten Surabaya pada tahun 1937

(Sumber : <https://indisch4ever.nu/2014/07/05/kaarten-indie-1937/>)

Dalam berita *Grissee : Bestuursveranderingen* terbitan tanggal 1 Desember 1937 menjelaskan Kebijakan pemindahan kembali pusat pemerintahan Kabupaten Surabaya dari Gresik ke Surabaya menandai fase penting dalam transformasi administratif wilayah Gresik pada akhir dekade 1930-an. Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah kolonial Belanda untuk melakukan rekonsolidasi kekuasaan di wilayah perkotaan utama yang dinilai lebih strategis secara ekonomi dan politik.

Pengisian kembali jabatan *regent* (bupati) di Surabaya menjadi simbol dari sentralisasi administrasi setelah masa percobaan pemindahan pusat pemerintahan ke Gresik dinilai kurang efektif. Akibatnya, Gresik yang sebelumnya berperan sebagai pusat pemerintahan sementara kehilangan status prestisiusnya, dan terjadi pergeseran dalam tata kelola wilayah. Gedung pendopo yang semula menjadi representasi kekuasaan lokal kolonial di Gresik kemudian direncanakan untuk dibongkar dan dialihfungsikan, sementara rumah dinas bupati dijadikan fasilitas kesehatan. Hal ini menunjukkan adanya perubahan orientasi fungsi ruang dari simbol politik menuju fungsi sosial pelayanan publik, yang mencerminkan pergeseran prioritas kebijakan kolonial di tingkat lokal.⁵⁸

Transformasi yang terjadi akibat kebijakan ini memperlihatkan bahwa Gresik tetap memiliki nilai strategis dalam sistem kontrol kolonial, meskipun posisinya mengalami degradasi secara administratif. Pemanfaatan ulang bangunan pemerintahan dan penempatan kembali detasemen *veldpolitie* menandakan bahwa pemerintah kolonial masih menaruh perhatian terhadap stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut. Penempatan pasukan polisi lapangan lengkap dengan struktur komando menggambarkan bagaimana Gresik diperlakukan sebagai wilayah pengawasan penting dalam jaringan kekuasaan administratif kolonial di Jawa Timur. Pergeseran pusat pemerintahan ini bukan sekadar perubahan geografis administratif, melainkan juga bagian dari reorganisasi sistem kekuasaan dan pengendalian sosial kolonial, yang mengubah fungsi-fungsi fisik, politik, dan sosial Gresik dalam konteks pemerintahan Hindia Belanda menjelang akhir 1930-an.

⁵⁸ *Soerabaiasch handelsblad* dalam berita *Grissee : Bestuursveranderingen* tanggal 1 Desember 1937

Kemudian tahun 1937 dikeluarkan keputusan *Besluit* tanggal 9 November 1937 No. 31 yang menetapkan bahwa di Gresik akan tetap didirikan *Landraad* (pengadilan negeri untuk pribumi) dan *Residentiegerecht* (pengadilan untuk urusan administrasi dan perdata kolonial) menunjukkan adanya penguatan fungsi yuridis dan administratif Gresik setelah sebelumnya ditunjuk sebagai *hoofdplaats* kabupaten Surabaya pada tahun 1935.⁵⁹ Dalam konteks sejarah administrasi kolonial, kebijakan ini menandai transformasi Gresik dari sekadar pusat administratif percobaan menjadi pusat pemerintahan yang juga memiliki otoritas hukum sendiri, sehingga kedudukannya semakin strategis dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda di Oost-Java. Keberadaan lembaga peradilan di Gresik memperluas cakupan kekuasaan kolonial di tingkat lokal sekaligus mendorong perkembangan wilayah karena meningkatnya aktivitas birokrasi, peradilan, dan ekonomi di sekitar pusat pemerintahan.

Pada tahun 1938 direncanakan pemindahan kantor pemerintahan Kabupaten Surabaya, berdasarkan berita yang dimuat *De Indische Courant* bertajuk *GRISSEE* yang menginformasikan tentang pemindahan kantor Kabupaten dari lokasi lama (Gresik) ke gedung bekas toko Hoffmann di Aloonstraat No. 15. Pemindahan ini diumumkan melalui surat edaran tertanggal 11 Maret 1938 oleh Bupati Surabaya dan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 16 Maret. Proses pemindahan meliputi perabotan, arsip, serta dokumen administrasi penting yang diperkirakan akan memakan waktu sekitar satu minggu. Diharapkan pada tanggal 23 Maret seluruh aktivitas kantor telah berpindah sepenuhnya ke gedung baru.⁶⁰ Transformasi yang terjadi akibat kebijakan ini tidak hanya bersifat fisik tetapi juga simbolik. Perubahan lokasi kantor pemerintahan dan penetapan jadwal pelayanan publik terutama jam audiensi bupati

⁵⁹ *Besluit Staatsblad van Nederlandsch-Indië* Tahun 1937 No. 31

⁶⁰ *De Indische Courant* dalam berita *GRISSEE* tanggal 17 Maret 1938

(*regent*) yang kini secara rutin diadakan di kantor *wedono* Gresik mengindikasikan bahwa fungsi Gresik bergeser menjadi pusat administratif sekunder dalam sistem pemerintahan kolonial. Hal ini menegaskan posisi Gresik sebagai wilayah penyangga administratif yang tetap vital bagi jalannya pemerintahan di bawah otoritas kolonial, meskipun pusat formal kekuasaan telah berpindah ke Surabaya.

Kebijakan pemindahan pusat administrasi dari Gresik ke Surabaya tidak hanya berdampak pada perubahan teknis birokrasi, tetapi juga memunculkan konsekuensi sosial-politik terhadap posisi dan mobilitas pejabat lokal. Salah satu dampak penting dari perubahan ini adalah berkaitan dengan kediaman resmi bupati. Berikut informasi dari Pak Kris Adji selaku Budayawan Gresik, yaitu :

“Pada masa kepemimpinan Bupati Moesono, awalnya beliau tidak bersedia untuk tinggal di Surabaya, hingga terdapat berita yang menjelaskan bahwa Bupati Moesono diwajibkan untuk tinggal di Surabaya karena saat itu sudah berubah menjadi Kabupaten Surabaya”⁶¹

Hasil wawancara dengan narasumber, Bapak Kris Adji, mengungkapkan bahwa pada masa kepemimpinan Bupati Raden Tumenggung Moesono, terjadi dinamika dalam proses pemindahan pusat pemerintahan dari Gresik ke Surabaya. Awalnya, Bupati Moesono enggan untuk pindah dan tetap memilih tinggal di Gresik, meskipun secara administratif pusat kekuasaan telah bergeser ke Surabaya. Sikap ini mencerminkan adanya keterikatan historis dan emosional terhadap Gresik, yang sebelumnya menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Surabaya pasca-penggabungan wilayah. Namun, menurut informasi yang diperoleh dari narasumber dan didukung oleh pemberitaan masa kolonial, muncul kebijakan resmi yang mewajibkan bupati untuk tinggal di Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemindahan administratif tidak

⁶¹ Wawancara dengan Pak Kris Adji pada 30 April 2025

hanya sebatas perpindahan fisik instansi, tetapi juga melibatkan aspek simbolik dan struktural, yakni peneguhan posisi Surabaya sebagai pusat kekuasaan baru, serta penghapusan peran strategis Gresik dalam struktur pemerintahan kolonial Hindia Belanda.

Pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten dari Gresik ke Surabaya menuntut penyediaan infrastruktur administratif yang memadai. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari kantor berita Aneta, Departemen Pekerjaan Umum dan Perhubungan (*Verkeer en Waterstaat*) di Bandoeng pada waktu itu telah mengeluarkan izin resmi untuk melakukan renovasi terhadap rumah milik pemerintah (*gouvernementswoning*) di kawasan Genteng. Bangunan tersebut sebelumnya difungsikan sebagai kantor Dinas Opium dan garam, dan kemudian dialihfungsikan menjadi kediaman resmi bagi Bupati Surabaya. Sebelum perubahan ini, Bupati Surabaya hanya menempati rumah kontrakan di daerah Simpang, sementara para pendahulunya pernah tinggal di berbagai tempat, termasuk di kawasan Juliana-boulevard. Ketika Gresik masih berstatus sebagai ibu kota kabupaten, keberadaan rumah jabatan bupati di Surabaya belum menjadi prioritas. Akan tetapi, dengan dipindahkannya kembali pusat pemerintahan ke Surabaya, kebutuhan akan bangunan resmi untuk menunjang fungsi administrasi menjadi mendesak.⁶²

Transformasi yang terjadi pada wilayah Gresik akibat kebijakan ini sangat signifikan dari segi politik dan simbolik. Pemindahan *pendopo* dari bekas rumah regent di Gresik untuk dibangun kembali di Genteng menandakan perpindahan pusat kekuasaan simbolik dan administratif dari Gresik ke Surabaya secara permanen.

⁶² *De Indische Courant* dalam berita *De Nieuwe Regentswoning: Autorisatie voor den bouw verleend* tanggal 7 Desember 1938

Tindakan ini mencerminkan penurunan status Gresik dari ibu kota kabupaten menjadi wilayah subordinat di bawah kendali langsung pusat pemerintahan kolonial Surabaya. Selain itu, pemindahan elemen arsitektural seperti pendopo juga menunjukkan bagaimana identitas budaya dan kekuasaan lokal Gresik secara bertahap dilebur ke dalam struktur administratif kolonial yang lebih besar. Pembangunan *regentswoning* (rumah dinas bupati) baru di Genteng tidak sekadar proyek fisik, melainkan representasi transformasi politik-administratif yang menandai berakhirnya peran Gresik sebagai pusat pemerintahan kabupaten dan awal dari konsolidasi kekuasaan kolonial di wilayah perkotaan Surabaya.



Gambar 2.6 Pendopo Kabupaten Surabaya di Genteng kali

(Sumber : <https://tiketcakdurasim.com/gedung/3>)

Peresmian pusat pemerintahan Kabupaten Surabaya yang baru di kawasan Genteng Kali pada 15 Maret 1940 menjadi penanda penting dalam transformasi administratif wilayah tersebut pada masa kolonial terdapat kebijakan administratif yang berkaitan dengan pemindahan pusat pemerintahan (*hoofplaats*) dan tempat kediaman resmi bupati (*regent*) dalam struktur pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Berita tersebut menjelaskan bahwa pemerintah kolonial memberikan otorisasi untuk melakukan renovasi terhadap rumah dinas pemerintah di Genteng, yang sebelumnya

digunakan oleh Dinas Opium dan Garam (*Opium- en Zoutregie*), agar dapat difungsikan kembali sebagai rumah dinas Bupati Surabaya. Langkah ini berkaitan erat dengan perubahan status administratif wilayah, khususnya setelah kedudukan ibu kota Kabupaten Surabaya dipindahkan dari Gresik ke Surabaya. Dalam konteks ini, pembangunan rumah dinas regent (kabupaten) bukan sekadar aspek fisik, tetapi juga simbolisasi dari perubahan otoritas pemerintahan lokal yang menandai penguatan kedudukan Surabaya sebagai pusat administratif baru menggantikan Gresik.⁶³

Transformasi yang terjadi pada wilayah Gresik akibat kebijakan ini bersifat struktural dan simbolik. Pemindahan pusat pemerintahan dari Gresik ke Surabaya menandai berakhirnya peran Gresik sebagai pusat administratif kabupaten dan menggeser fungsinya menjadi wilayah perifer dalam sistem pemerintahan kolonial. Pendopo kabupaten yang sebelumnya berada di Gresik bahkan dibongkar dan dipindahkan ke Surabaya, menunjukkan pemindahan fungsi dan makna ruang kekuasaan secara nyata. Hal ini merefleksikan bagaimana kebijakan kolonial tidak hanya mengatur batas wilayah, tetapi juga mengubah tata kelola sosial-politik dan identitas lokal. Dengan demikian, transformasi wilayah Gresik tidak hanya dilihat dari segi administratif, tetapi juga dari hilangnya simbol kekuasaan lokal yang selama ini melekat pada eksistensi kabupaten dan pendoponya sebagai pusat pemerintahan tradisional Jawa.

Berdasarkan *Staatsblad Nederlandsch-Indië* 1941 No. 99 ini menunjukkan adanya kebijakan kolonial yang berfokus pada penataan kembali struktur peradilan di Hindia Belanda, khususnya dalam memperjelas wilayah yurisdiksi dan kedudukan pejabat hukum (*officier van justitie* dan *magistraat*) di berbagai daerah, termasuk Gresik

⁶³ *De Indische Courant* dalam berita *De Nieuwe Kaboepaten aan Genteng-Kali* tanggal 15 Maret 1940

(Grissee). Berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal tanggal 12 April 1941 No. 12, disebutkan bahwa Gresik ditetapkan sebagai salah satu tempat kedudukan *landraad* (pengadilan negeri pribumi) yang berada di bawah yurisdiksi *officier van justitie* di Surabaya.⁶⁴ Artinya, wilayah Gresik kembali diakui secara administratif sebagai bagian dari struktur hukum kolonial yang memiliki fungsi yudisial tersendiri, meskipun tetap bergantung pada Surabaya sebagai pusat hukum dan administratif yang lebih tinggi.

Transformasi yang terjadi pada wilayah Gresik akibat kebijakan tahun 1941 ini bersifat institusional dan fungsional dalam kerangka pemerintahan kolonial. Setelah sebelumnya mengalami penurunan status akibat pemindahan ibu kota kabupaten ke Surabaya pada tahun 1930-an, penetapan Gresik sebagai salah satu tempat kedudukan *landraad* menunjukkan adanya penguatan kembali peran Gresik dalam sistem hukum dan administrasi kolonial, meskipun bukan sebagai pusat pemerintahan. Gresik bertransformasi dari sekadar wilayah administratif pendukung menjadi salah satu simpul hukum di bawah koordinasi Surabaya. Perubahan ini menandai pergeseran fungsi Gresik dari pusat kekuasaan tradisional menjadi bagian dari sistem kolonial modern yang terstruktur melalui lembaga peradilan.

Pada tahun 1941, struktur pemerintahan Kabupaten Surabaya menunjukkan adanya tata kelola kolonial yang tersusun secara hirarkis dan terorganisasi. Jabatan tertinggi dipegang oleh seorang Bupati, yaitu Raden Toemenggoeng Ario Moesono, yang menjabat sejak 26 November 1937. Di bawahnya, posisi penting lainnya adalah Patih yang dijabat oleh Raden Saketi/ Raden Wirjokoesoemo sejak 23 September 1933. Sistem birokrasi ini juga mencakup pejabat administratif seperti Sekretaris utama Raden Wahjoedi/Raden Reksoiwidjojo yang mulai menjabat sejak 21 Mei 1939, dan

⁶⁴ *Staatsblad Nederlandsch-Indië* Tahun 1941 No. 99

Sekretaris pembantu yang dijabat oleh Mas Soeprapto/Mas Djojoadisoeprapto sejak 1 Januari 1935.

Pembagian administratif wilayah dilakukan melalui sistem distrik yang masing-masing dipimpin oleh pejabat tertentu. Misalnya, distrik Kota Soerabaja dipimpin oleh Raden Setijono sejak 16 Oktober 1936, dan distrik Djoabokotta oleh Mat Hasim sejak 25 November 1938. Distrik lainnya seperti Gunungkendeng, Bawean, Gresik, Cerme, dan Sidayu juga memiliki kepala distrik masing-masing. Khusus untuk distrik Gresik, pemimpinnya adalah Raden Soepardi Soerjoingsunprojodojo yang mulai menjabat sejak 1 Januari 1935. Selain itu, terdapat juga jabatan-jabatan khusus seperti Kapiten Arab yang dipegang oleh Sjech Alie bin Mohamad Bolsaid, serta Kepala Pribumi yang dijabat oleh Kundan T. Daryanani. Struktur ini menunjukkan bagaimana pemerintah kolonial Belanda membentuk sistem pemerintahan lokal dengan melibatkan kaum priyayi Jawa sebagai bagian dari sistem birokrasi kolonial. Para pejabat lokal tersebut tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi perpanjangan tangan kekuasaan kolonial dalam menjaga stabilitas dan pengawasan terhadap masyarakat di wilayahnya⁶⁵

Berdasarkan analisis kebijakan penggabungan administratif antara Kabupaten Gresik dan Kabupaten Surabaya pada masa kolonial, transformasi wilayah yang terjadi dapat dipahami melalui teori transformasi administrasi Fred W. Riggs dan konsep reformasi administrasi Gerald E. Caiden. Perspektif Riggs menekankan bagaimana perubahan struktur administrasi dipicu oleh dinamika sosial, ekonomi, dan politik, di mana penggabungan Gresik ke dalam Kabupaten Surabaya bukan sekadar akibat faktor geografis seperti pendangkalan pelabuhan, tetapi lebih pada strategi kolonial untuk

⁶⁵ *Regeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië* tahun 1941, 309

memusatkan kekuasaan, memperkuat Surabaya sebagai kota metropolitan, serta mengefisiensikan administrasi selama Depresi Besar. Hal ini tercermin dari pengalihan pusat pemerintahan, penghapusan sejumlah kabupaten, serta perubahan status Gresik menjadi distrik subordinat, yang menandai pergeseran fungsi administratif, yuridis, dan ekonomi lokal.

Sementara itu, pendekatan reformasi administrasi Caiden relevan dalam memahami langkah kolonial sebagai upaya “artificial inducement of administrative transformation against resistance,” yakni perubahan administratif yang dilakukan secara sadar untuk meningkatkan efisiensi dan kontrol, meskipun menimbulkan resistensi lokal, misalnya keterikatan emosional pejabat terhadap Gresik dan penyesuaian simbolik dalam pemindahan pendopo serta rumah dinas bupati. Dengan demikian, transformasi wilayah Gresik bersifat multidimensional—institusional, fungsional, simbolik, dan sosial-ekonomi—menunjukkan interaksi antara strategi politik kolonial, efisiensi administratif, serta dampak terhadap struktur masyarakat lokal sesuai kerangka Riggs dan Caiden.

Tabel 2.2 Struktur Pemerintahan Kabupaten Surabaya pada Tahun 1941

Kategori	Jabatan	Nama Pejabat	Tanggal Pengangkatan
Pejabat Inti	Bupati	Raden Toemenggoeng Ario Moesono	26 November 1937
	Patih	Raden Saketi/Raden Wirjokoesoemo	23 September 1933
	Sekretaris Utama	Raden Wahjoedi/Raden Reksoiwidjojo	21 Mei 1939
	Sekretaris Pembantu	Mas Soeprapto/Mas Djojoadisoeprapto	1 Januari 1935

Kepala Distrik (Wedana)	Kota Soerabaja	Raden Setijono	16 Oktober 1936
	Jabakota	Mat Hasim	25 November 1938
	Gunungkendeng	Raden Rachmad	21 Oktober 1938
	Bawean	Raden Josoweno	30 September 1940
	Gresik	Raden Soepardi Soerjoingsunprojdojo	1 Januari 1935
	Cerme	Mas Dirdjosoeparto al. Mas Moehalji	6 Mei 1940
	Sidayu	Kiai Immanid/Kiai Immanidprojo	23 Maret 1939
Jabatan Khusus	Kapiten Arab	Sjech Alie bin Mohamad Bolsaid	3 Desember 1937
	Kepala Pribumi	Kundan T. Daryanani	10 November 1935

Sumber/Source : *Regeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië tahun 1941*

**Tabel 2.3 Daftar Kebijakan Pemerintah dalam Transformasi Administrasi
Gresik-Surabaya 1934-1942**

Tahun	Kebijakan	Transformasi terhadap Wilayah Gresik
1934	Staatsblad No. 715 – Perubahan pembagian wilayah wajib militer menjadi daerah pendaftaran (<i>inschrijvingskringen</i>).	Gresik kehilangan fungsi administratif dalam sistem kewajiban militer; kontrol administratif dan registrasi penduduk terpusat di Surabaya; menunjukkan pergeseran fungsi wilayah dari mandiri menjadi subordinat.
1934	Staatsblad Nederlandsch-Indië No. 749 – Penghapusan beberapa kabupaten, termasuk Gresik, dan penggabungan administratif dengan Surabaya.	Gresik kehilangan status kabupaten; fungsi administratif dialihkan ke Surabaya; wilayah Gresik menjadi distrik/kewedanan di bawah Kabupaten Surabaya; terjadi sentralisasi administrasi dan pengarsipan hukum ke Surabaya.

1935	Staatsblad Nederlandsch-Indië No. 164 – Penetapan Gresik (<i>Grissee</i>) sebagai <i>hoofplaats</i> (ibu kota sementara) Kabupaten Surabaya.	Status Gresik meningkat menjadi pusat administratif kabupaten sementara; penguatan fungsi birokrasi, hukum, dan ekonomi; aktivitas perdagangan dan jasa meningkat di sekitar pusat pemerintahan baru.
1935– 1936	Rapat Perdana Dewan Kabupaten Surabaya di Gresik – Pembentukan <i>Regentschapsraad</i> gabungan.	Terbentuknya struktur birokrasi yang mapan di Gresik; pengambilan keputusan administratif lokal; pembangunan fasilitas publik mulai dilakukan; menunjukkan transformasi politik-administratif dan sosial-ekonomi.
1936	Pembentukan Dewan Kabupaten gabungan (Regentschapsraad) di Gresik (Berita Het Regentschap, 28 Oktober 1936)	Gresik mengalami peningkatan status dari distrik menjadi pusat pemerintahan kabupaten
1937	Reposisi fungsi bangunan Gresik: pendopo untuk rumah dinas bupati, rumah regent jadi RS, kontrolir jadi rumah wedana. (Berita <i>Grissee</i> : <i>Bestuursveranderingen</i> tanggal 1 Desember 1937)	Wilayah Gresik menjadi bagian dari reorganisasi sistem kekuasaan dan pengendalian sosial kolonial, yang mengubah fungsi-fungsi fisik, politik, dan social.
1937	Besluit No. 31 – Pendirian <i>Landraad</i> dan <i>Residentiegerecht</i> di Gresik.	Gresik menjadi pusat hukum yudisial; transformasi dari pusat administratif percobaan menjadi pusat pemerintahan yang memiliki otoritas hukum sendiri; peningkatan aktivitas birokrasi dan ekonomi lokal.
1938	Pemindahan kantor pemerintahan Kabupaten Surabaya dari Gresik ke Surabaya. (Berita <i>GRISSEE</i> tanggal 17 Maret 1938)	Gresik menjadi pusat administratif sekunder; pusat formal pemerintahan pindah ke Surabaya; fungsi lokal

		berorientasi sebagai wilayah penyangga administrasi.
1940	Renovasi dan pendirian rumah dinas bupati di Genteng, Surabaya (Berita <i>De Nieuwe Regentswoning</i> tanggal 7 Desember 1938).	Pemindahan simbolik pusat kekuasaan dari Gresik ke Surabaya; Gresik menurun statusnya dari ibu kota kabupaten menjadi wilayah subordinat; elemen arsitektural seperti pendopo dipindahkan; fungsi sosial dan pelayanan publik meningkat di Gresik.
1941	Staatsblad Nederlandsch-Indië No. 99 – Penataan kembali struktur peradilan; Gresik sebagai tempat kedudukan <i>Landraad</i> .	Penguatan peran Gresik dalam sistem hukum kolonial; meski bukan pusat pemerintahan, Gresik menjadi simpul hukum di bawah koordinasi Surabaya; transformasi institusional dan fungsional.

C. Periode II: Peneguhan Status Kabupaten Gresik dalam Pemerintahan Republik Indonesia (1950–1974)

Periode revolusi kemerdekaan membawa dampak besar terhadap stabilitas administratif di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Surabaya. Dalam situasi yang penuh gejolak tersebut, pusat pemerintahan kabupaten mengalami perubahan lokasi secara dinamis dan tidak menentu. Berdasarkan keterangan dari sejarawan Gresik, Eko Jarwanto, diperoleh informasi berikut ini:

“Ketika terjadi perang kemerdekaan Indonesia khususnya di Surabaya, sekitar 1945-1950 masa revolusi Perang Kemerdekaan, pusat pemerintahan Kabupaten Surabaya sudah berubah-ubah dan tidak tentu lagi, seperti daerah bunga pernah dijadikan pusat pemerintahan sementara oleh Kabupaten Surabaya. Setelah tahun 1950an, pendopo/pusat pemerintahan Kabupaten Surabaya dipindahkan lagi di wilayah Gresik.”⁶⁶

⁶⁶ Wawancara dengan Pak Eko Jarwanto pada 28 Mei 2025

Pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia, khususnya antara tahun 1945 hingga 1950, situasi politik dan keamanan yang tidak stabil berdampak signifikan terhadap jalannya pemerintahan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Surabaya. Berdasarkan kesaksian narasumber, pusat pemerintahan Kabupaten Surabaya mengalami ketidakpastian dan berpindah-pindah lokasi demi alasan keamanan. Salah satu lokasi yang sempat dijadikan pusat pemerintahan sementara adalah wilayah Bunga. Pemindahan ini mencerminkan kondisi darurat yang dihadapi pemerintah lokal akibat agresi militer Belanda serta gejolak revolusi di Surabaya sebagai salah satu medan pertempuran utama. Setelah situasi mulai stabil pasca pengakuan kedaulatan pada tahun 1950-an, pusat pemerintahan Kabupaten Surabaya dipindahkan ke wilayah Gresik.

Setelah kondisi politik dan keamanan mulai membaik pasca pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada tahun 1950, pemerintah pusat segera menginisiasi proses konsolidasi dan penataan ulang sistem pemerintahan di tingkat daerah. Salah satu langkah krusial dalam proses ini adalah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950, yang menjadi landasan yuridis utama dalam menetapkan struktur dan status administratif kabupaten-kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur. Dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut secara jelas dinyatakan bahwa kedudukan pemerintahan Kabupaten Surabaya berada di kota Gresik.⁶⁷ Transformasi yang terjadi pada tahap ini bersifat kelembagaan dan teritorial, yaitu pengakuan resmi terhadap kedudukan Gresik sebagai pusat birokrasi daerah dalam

⁶⁷ Sekretaris Negara Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1950 Tentang Pemerintah Kabupaten Daerah di Djawa Timur, pasal 2 ayat (1).

struktur pemerintahan Republik Indonesia, meskipun secara nomenklatur masih berada di bawah nama Kabupaten Surabaya.

Langkah pembangunan industri semen di Gresik pada awal dekade 1950-an merupakan tonggak penting dalam sejarah industrialisasi di Jawa Timur pasca-kemerdekaan. Wawancara dengan pejabat Dinas Perindustrian Jawa Timur, seperti yang dilaporkan dalam berita Aneta, menunjukkan bahwa keputusan pendirian pabrik semen di wilayah sekitar 5 km sebelah barat Gresik merupakan kebijakan yang dirancang secara strategis oleh pemerintah pusat dalam rangka pembangunan ekonomi nasional. Kawasan Gresik dipilih bukan hanya karena faktor geografis dan infrastruktur pelabuhannya, tetapi juga karena potensinya sebagai simpul ekonomi baru yang dekat dengan pusat kekuasaan administratif Kabupaten.⁶⁸ Kebijakan ini menunjukkan adanya kesinambungan antara peran administratif Gresik sebagai pusat pemerintahan daerah dan transformasinya menjadi pusat industri baru di Jawa Timur. Dengan demikian, kebijakan pembangunan industri semen menandai transformasi ekonomi awal Gresik dari wilayah administratif menjadi kawasan industri strategis dalam kerangka pembangunan nasional.

⁶⁸ *Het Nieuwsblad voor Sumatra* dalam berita *Cementfabriek in Grissee* tanggal 1 oktober 1951



Gambar 2.7 Situasi luar Pabrik Semen Gresik tahun 1955

(Sumber : <https://sikn.jatimprov.go.id/index.php/image-675>)

Kemudian, peresmian Pabrik Semen Gresik oleh Presiden Soekarno pada 7 Agustus 1957, menandai realisasi konkret dari kebijakan industrialisasi nasional yang diusung dalam era Demokrasi Terpimpin. Dengan kapasitas produksi mencapai 250.000 ton per tahun melampaui total produksi semen nasional sebelumnya yang hanya 150.000 ton pabrik ini tidak hanya menjadi simbol kemajuan teknologi, tetapi juga menjadi sarana vital dalam menjawab kebutuhan domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Pendanaan pembangunan pabrik melalui pinjaman luar negeri dari Ex-Im Bank Amerika Serikat sebesar 14 juta dolar, dengan kontribusi Indonesia yang lebih besar, menunjukkan adanya diplomasi ekonomi yang berpihak pada kepentingan nasional. Selain itu, keberadaan pabrik ini diproyeksikan mampu menghemat devisa hingga 10 juta dolar per tahun, menjadikannya salah satu inisiatif awal pemerintah dalam menciptakan kemandirian ekonomi melalui sektor industri berat.⁶⁹ Transformasi yang dihasilkan tidak hanya berupa perubahan ekonomi struktural, tetapi juga pembentukan identitas baru bagi Gresik sebagai kota industri

⁶⁹ *Winschoter Courant : Dagblad voor Oostelijk Groningen* dalam berita *President Soekarno opened cementfabriek* tanggal 8 Agustus 1957

negara pertama di Jawa Timur, yang mengubah lanskap sosial, mobilitas tenaga kerja, dan pola permukiman di sekitarnya.



Gambar 2.8 Peresmian Pabrik Semen Gresik oleh Soekarno Tahun 1957

(Sumber : www.sig.id/sejarah)

Transformasi status hukum dan kelembagaan pabrik ini kemudian ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 132 Tahun 1961 yang menetapkan pendirian Perusahaan Negara (P.N.) Semen Gresik. Berdasarkan peraturan tersebut, status pabrik yang semula berbentuk N.V. (Naamloze Vennootschap) dilebur ke dalam struktur badan hukum negara, dengan tujuan mendukung pembangunan ekonomi nasional khususnya dalam bidang industri dasar dan berat, sebagaimana semangat ekonomi terpimpin. Dalam Pasal 5 peraturan ini ditegaskan bahwa perusahaan didirikan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan mendukung terciptanya masyarakat adil dan makmur secara material dan spiritual.⁷⁰ Perubahan ini bukan hanya restrukturisasi administratif, tetapi juga manifestasi dari ideologi ekonomi terpimpin, di mana negara mengambil peran utama dalam pengelolaan industri strategis. Transformasi yang terjadi di Gresik sebagai akibat kebijakan ini bersifat institusional

⁷⁰ Sekretaris Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 132 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Semen Gresik, Pasal 1, Pasal 5

dan ideologis, yaitu penguatan kontrol negara terhadap sektor industri berat serta penegasan peran Gresik sebagai simpul utama dalam jaringan produksi semen nasional.

Selain itu, kondisi Kotamadya Surabaya yang mengalami perkembangan pesat dalam aspek demografi, ekonomi, dan tata ruang mendorong pemerintah untuk melakukan perluasan wilayah kota. Sebagai respons atas dinamika tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 yang menjadi dasar hukum penting dalam mengubah batas wilayah antara Kotamadya Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Kabupaten Surabaya). Undang-undang ini secara eksplisit memindahkan lima kecamatan, yakni Wonocolo, Sukolilo, Rungkut, Tandes, dan Karangpilang, dari wilayah Kabupaten Surabaya ke dalam administrasi Kotamadya Surabaya. Kebijakan ini didasari oleh pertimbangan bahwa batas wilayah Kotamadya yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 (eks-*Stadsgemeente*) tidak lagi memadai secara spasial untuk menampung dinamika perkembangan kota. Dalam pelaksanaannya, perluasan wilayah ini dilandasi kesepakatan administratif antara Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya dan Pemerintah Kotamadya Surabaya, sebagaimana dituangkan dalam Persetujuan Bersama tertanggal 17 Juni 1963 dan diperkuat oleh keputusan DPRD Kabupaten Surabaya pada 27 November 1962, yang menyatakan persetujuan atas pengalihan sebagian wilayahnya.⁷¹

Secara struktural, kebijakan ini mempersempit cakupan wilayah Kabupaten Surabaya, namun secara fungsional justru memperkuat posisi Gresik sebagai pusat pemerintahan kabupaten karena sebagian besar aktivitas administratif, politik, dan

⁷¹ Sekretaris Negara Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Suarabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah UU No. 12 Tahun 1950

birokrasi telah berpusat di Gresik sejak awal 1950-an. Transformasi yang terjadi bersifat teritorial dan kelembagaan, di mana Gresik semakin menegaskan perannya sebagai inti pemerintahan daerah yang memisahkan diri secara geografis dan administratif dari dinamika urban Surabaya. Di sisi lain, pengurangan wilayah ini turut mengubah arah pembangunan ekonomi Kabupaten Surabaya-Gresik dengan mendorong Gresik berorientasi pada pengembangan industri dan pelabuhan, bukan lagi pada fungsi pertanian dan pedesaan sebagaimana sebelumnya. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 menjadi momentum penting dalam proses peneguhan identitas wilayah Gresik sebagai entitas administratif dan ekonomi yang berdiri sendiri menjelang perubahan status resminya menjadi Kabupaten Gresik pada tahun 1974.

Perkembangan industri di Gresik mencapai fase baru setelah diberlakukannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1968 pada masa awal Orde Baru. Kedua kebijakan ini membuka peluang besar bagi investasi asing dan domestik di sektor industri dan manufaktur. Dalam konteks Gresik, kebijakan ini melahirkan berbagai perusahaan besar seperti PT Petrokimia Gresik, PT Nippon Paint, dan PT Eternit, serta perusahaan domestik seperti PT Nusantara Maywood dan PT Wikara Karya Murni. Dengan dukungan topografi yang padat dan stabil, serta kedekatan geografis dengan Surabaya dan pelabuhan utama Tanjung Perak, Gresik mengalami transformasi spasial dan ekonomi yang signifikan: dari kota administratif menjadi kawasan industri regional yang menopang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Kebijakan penanaman modal ini menandai integrasi Gresik ke dalam sistem kapitalisme negara yang diatur oleh Orde Baru.⁷²



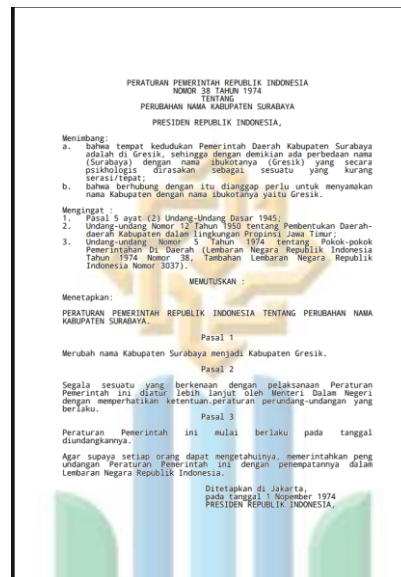
Gambar 2.9 PT. Petrokimia di Gresik pada Tahun 1970

(Sumber : <https://khastara.perpusnas.go.id/koleksi-digital/detail/?catId=524030>)

Pada tahun 1974 terjadi perubahan signifikan dalam struktur administratif wilayah di Jawa Timur, khususnya terkait dengan eksistensi Kabupaten Surabaya. Berdasarkan keterangan dari narasumber, nama "Kabupaten Surabaya" resmi dihapuskan dan digantikan dengan nama "Kabupaten Gresik". Perubahan ini dilatarbelakangi oleh kondisi faktual di mana pusat pemerintahan kabupaten yang semula bernama Surabaya telah sejak lama berkedudukan di wilayah Gresik. Meskipun secara yuridis dan administratif sebagian wilayah kabupaten tersebut masih mencakup area di sekitar Surabaya, penamaan "Kabupaten Surabaya" dianggap tidak lagi relevan dengan realitas geografis dan pusat kekuasaan administratif yang berlaku saat itu. Pergeseran pusat pemerintahan ini menjadi dasar argumentatif yang kuat bagi perubahan nama, mengingat penamaan suatu kabupaten idealnya mencerminkan lokasi aktual dari pusat pemerintahan. Oleh karena itu, demi menghindari ambiguitas administratif dan menciptakan kejelasan dalam struktur pemerintahan daerah,

⁷² *Kabupaten Gresik Membangun*, (Gresik, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, 1974), 151

pemerintah secara resmi mengubah nama kabupaten tersebut menjadi Kabupaten Gresik.⁷³



Gambar 2.10 Peraturan Pemerintah no. 38 tahun 1974

(Sumber : <https://peraturan.bpk.go.id/Details/67960/pp-no-38-tahun-1974>)

Langkah perubahan nama tersebut secara resmi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 1974, yang menetapkan penggantian nama "Kabupaten Surabaya" menjadi "Kabupaten Gresik". Dalam konsideran peraturan tersebut dijelaskan bahwa penyesuaian nama dilakukan karena tempat kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Surabaya secara faktual telah lama berada di Gresik, sehingga perbedaan antara nama kabupaten (Surabaya) dan ibukotanya (Gresik) dipandang kurang serasi dan berpotensi menimbulkan kebingungan administratif maupun psikologis di tengah masyarakat. Selain itu, latar belakang usulan perubahan nama juga mencerminkan aspirasi lokal, yakni adanya inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Surabaya melalui keputusan tanggal 20

⁷³ Wawancara dengan Pak Eko Jarwanto pada 28 Mei 2025

Maret 1974, yang kemudian didukung oleh Bupati dan Gubernur Jawa Timur. Usulan ini selanjutnya ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dengan dikeluarkannya regulasi resmi pada tanggal 1 November 1974 oleh Presiden Soeharto.⁷⁴ Transformasi administratif yang terjadi di sini bersifat simbolik sekaligus struktural, yakni pengukuhan identitas Gresik sebagai kabupaten yang mandiri, serta penegasan posisi hukumnya dalam kerangka pemerintahan daerah di bawah rezim sentralistik Orde Baru.

Perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tidak terlepas dari kerangka hukum yang lebih luas, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-undang ini menegaskan pentingnya penataan wilayah administratif sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan serasi dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa pengembangan otonomi daerah didasarkan pada kondisi politik, ekonomi, sosial-budaya, serta pertahanan dan keamanan nasional, yang kemudian dipertegas dalam Pasal 4 ayat (3) bahwa perubahan nama daerah serta ibukotanya dapat ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut, perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik tidak hanya didorong oleh alasan psikologis dan administratif, melainkan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dalam memperkuat struktur birokrasi daerah sesuai asas desentralisasi yang nyata dan bertanggung jawab. Selain itu, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang ini menyebutkan bahwa titik berat otonomi daerah diletakkan pada Daerah

⁷⁴ Sekretaris Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 1974 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya

Tingkat II, termasuk kabupaten, sehingga penyesuaian nama dan pusat pemerintahan menjadi penting untuk menjamin kejelasan fungsi kelembagaan dan identitas wilayah.⁷⁵

Peresmian perubahan nama dari Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik secara resmi dilaksanakan pada 27 Februari 1975, yang ditandai dengan kunjungan langsung Gubernur Jawa Timur, Muhammad Noer, ke Gresik sebagai bentuk legitimasi dan pengesahan transformasi administratif tersebut. Momentum ini menjadi titik penting dalam sejarah pemerintahan daerah, karena sejak saat itu Gresik secara resmi berstatus sebagai Kabupaten Daerah Tingkat II, dengan Kota Gresik ditetapkan sebagai pusat pemerintahan. Struktur kelembagaan yang terbentuk pasca-peresmian dikenal sebagai Pemerintah Daerah Tingkat II Gresik, yang berfungsi sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di tingkat kabupaten, sesuai kebijakan desentralisasi yang berlaku pada masa itu.⁷⁶

Berdasarkan analisis transformasi administratif Gresik antara masa revolusi kemerdekaan hingga perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik pada 1974, dapat disimpulkan bahwa proses tersebut mencerminkan dinamika transformasi wilayah sebagaimana dijelaskan dalam teori Fred W. Riggs dan konsep reformasi administrasi Gerald E. Caiden. Menurut Riggs, transformasi administratif terjadi melalui penyesuaian struktural, fungsional, dan teritorial untuk menanggapi tekanan sosial, politik, dan ekonomi; hal ini terlihat dari perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Surabaya ke Gresik pasca-revolusi, penguatan peran Gresik

⁷⁵ Sekretaris Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1)

⁷⁶ *Kabupaten Gresik Membangun*, 223

sebagai pusat birokrasi, dan integrasi wilayah industri strategis melalui pembangunan Pabrik Semen serta industrialisasi pasca-1960-an.

Sementara itu, pendekatan reformasi administrasi Caiden menekankan bahwa perubahan administratif merupakan hasil intervensi sadar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, yang tercermin dalam kebijakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 dan penyesuaian batas wilayah, penguatan kelembagaan P.N. Semen Gresik, hingga legitimasi formal perubahan nama kabupaten melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974. Dengan kombinasi faktor politik, ekonomi, dan keamanan, transformasi Gresik menunjukkan pola sentralisasi dan desentralisasi yang saling terkait: dari pusat pemerintahan sementara, pengembangan industri, hingga pengukuhan status administratif sebagai Kabupaten Gresik yang mandiri, menegaskan keterkaitan antara pergeseran struktural, fungsional, dan simbolik dalam dinamika transformasi wilayah Indonesia pasca-kemerdekaan.

Tabel 2.4 Daftar Kebijakan Pemerintah dalam Transformasi Administrasi

Surabaya-Gresik 1934-1942

Tahun	Kebijakan / Peristiwa	Transformasi Terhadap Wilayah Gresik
1950	UU RI No. 12 Tahun 1950 menetapkan kedudukan pemerintahan Kabupaten Surabaya berada di Gresik	Pengakuan resmi Gresik sebagai pusat birokrasi daerah; transformasi kelembagaan dan teritorial; Gresik menegaskan peran administratifnya di tingkat kabupaten.
Awal 1950-an	Pendirian Pabrik Semen Gresik (5 km barat Gresik). (Berita <i>Cementfabriek in Grissee</i> tanggal 1 oktober 1951)	Transformasi ekonomi awal; Gresik menjadi simpul industri strategis, memperkuat posisi administratif dan peran ekonomi.
7 Agustus 1957	Peresmian Pabrik Semen Gresik oleh Presiden Soekarno	Transformasi sosial-ekonomi; Gresik menjadi kota industri pertama di Jawa Timur;

		meningkatkan mobilitas tenaga kerja, pola permukiman, dan aktivitas perdagangan.
1961	PP No. 132 Tahun 1961: Pendirian PN Semen Gresik	Transformasi institusional dan ideologis; penguatan kontrol negara terhadap sektor industri strategis, memperkuat Gresik sebagai simpul industri nasional.
1965	UU No. 2 Tahun 1965: Pemindahan 5 kecamatan dari Kabupaten Surabaya ke Kotamadya Surabaya	Transformasi teritorial dan kelembagaan; memperkuat posisi Gresik sebagai pusat pemerintahan kabupaten yang terpisah dari urbanisasi Surabaya.
1967-1968	UU Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967 & UU Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 Tahun 1968	Transformasi ekonomi dan spasial; Gresik berkembang sebagai kawasan industri regional dengan integrasi investasi nasional dan asing.
1974	PP No. 38 Tahun 1974: Penggantian nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik	Transformasi simbolik dan struktural; pengukuhan identitas Gresik sebagai kabupaten mandiri, penegasan pusat pemerintahan di Kota Gresik, legalisasi administratif.
27 Februari 1975	Peresmian resmi Kabupaten Gresik oleh Gubernur Jatim, Muhammad Noer	Legitimasi penuh Gresik sebagai Kabupaten Daerah Tingkat II; pembentukan struktur kelembagaan definitif sesuai prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

BAB III

KONDISI DAN DAMPAK SOSIAL EKONOMI TRANSFORMASI ADMINISTRASI WILAYAH GRESIK TAHUN (1934-1942) DAN (1950-1974)

A. Sejarah Kondisi Geografis, Ekonomi dan Sosial Gresik

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Gresik terletak di kawasan yang strategis, yaitu di Delta Bengawan Solo yang bermuara ke Selat Madura. Posisi geografis ini menjadikan Gresik sebagai salah satu kota pelabuhan penting yang telah berkembang sejak tahun 1387 M.⁷⁷ Pada tahun 1915 letak geografis Gresik terletak di sisi barat Selat Madura, tepatnya di kaki perbukitan Giri yang berada pada bagian depan wilayah tersebut. Jaraknya sekitar 11 pal ke arah timur laut dari Surabaya dan sekitar 45 pal dari arah Mojokerto. Koordinat astronomisnya tercatat pada garis lintang selatan 7°10'20" dan garis bujur timur 112°4', yang menunjukkan posisinya sebagai salah satu wilayah strategis di pesisir utara Jawa Timur pada masa kolonial.⁷⁸ Dari segi topografi, sebagian besar wilayah Gresik terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 2 hingga 12 meter di atas permukaan laut, menjadikannya daerah yang relatif landai.

Secara administratif, berdasarkan *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* No. 172 Tahun 1887 yang ditetapkan pada 20 September 1887, pemerintah kolonial Belanda menetapkan batas-batas administratif dari berbagai afdeeling (wilayah administratif) di bawah Karesidenan Soerabaja, termasuk wilayah

⁷⁷ Susi Setyorini, "Islam dalam Seni Damar Kurung Menurut Ika Ismoerdijahwati dan Dwi Indrawati di Kabupaten Gresik", (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya. 2014), 35

⁷⁸ Tim Penyusun Sejarah Gresik, *Kota Gresik : Sebuah Perspektif Sejarah dan Harijadi Gresik*, (Gresik, Pemerintah Daerah Tingkat II Gresik, 1991), 32

Gresik. Berdasarkan dokumen tersebut, batas wilayah Kabupaten Gresik dijelaskan secara detail melalui batas-batas alamiah maupun buatan. Sebelah utara dan timur wilayah Gresik berbatasan langsung dengan selat Madura (straat Madoera), yang menunjukkan penggunaan garis pantai sebagai batas alam utama. Sebelah barat, batas ditentukan melalui jalur yang dimulai dari desa Loempoer menuju jalan utama dan berlanjut ke pos jaga Roemo, kemudian menyusuri jalan dalam menuju pos jaga Poetat, melewati kawasan desa seperti Telogopodjok, Ngipik, dan Poetat. Sementara itu, batas selatan Gresik ditetapkan mengikuti jalur penghubung dari pos jaga Poetat ke Soedimoro Setolan, kemudian menuju Kradenan dan melintasi sejumlah desa seperti Poetat, Kebomas, Telogopatoel, Katoebanan, Ngindjen, Soedimoro, Singarso, Kramat-Inggil, Indro, hingga Soemamboeng dan Kradenan, sebelum akhirnya bermuara ke wilayah pesisir.⁷⁹

Kabupaten Gresik dilintasi oleh dua sungai besar yang memiliki peran penting dalam kondisi geografis dan hidrologis wilayahnya, yaitu Bengawan Solo di bagian barat dan Sungai Brantas di bagian timur. Kondisi ini menjadikan Gresik memiliki posisi strategis sebagai kota pelabuhan yang penting dalam jaringan perdagangan regional. Letak tersebut memungkinkan Gresik berperan sebagai simpul (outlet) dalam sistem distribusi barang, yang menghubungkan wilayah pedalaman Pulau Jawa dengan kawasan pesisir bahkan hingga ke luar pulau. Sungai Bengawan Solo berfungsi sebagai jalur transportasi air yang mengalirkan berbagai komoditas hasil produksi dari Kota Solo, salah satu pusat ekonomi utama di wilayah pedalaman Jawa Tengah menuju Gresik. Sementara

⁷⁹ *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* No. 172 Tahun 1887

itu, anak Sungai Brantas di bagian timur dimanfaatkan sebagai jalur distribusi yang menghubungkan kawasan pedalaman Jawa Timur dengan wilayah pesisir Gresik. Kedua sungai tersebut menjadi sarana vital dalam lalu lintas perdagangan komoditas, khususnya hasil pertanian yang tidak dapat diproduksi secara optimal di wilayah Gresik sendiri.⁸⁰

Kabupaten Gresik memiliki kondisi tanah yang beragam dan dapat dibedakan menjadi empat wilayah utama berdasarkan karakteristik geologinya. Di bagian utara, terdapat Pegunungan Kapur Utara yang tanahnya kurang subur, sehingga kurang mendukung pertanian, tetapi kaya akan bahan galian seperti batu kapur dan tanah liat yang banyak dimanfaatkan untuk industri konstruksi dan semen. Sementara itu, bagian tengah memiliki tanah yang lebih subur dibandingkan wilayah utara, sehingga lebih sesuai untuk kegiatan pertanian serta budidaya perikanan di tambak. Di bagian selatan, wilayah ini didominasi oleh dataran rendah yang cukup subur, meskipun terdapat beberapa bukit yang mengandung bahan galian dari golongan C. Hal ini membuat kawasan selatan memiliki potensi untuk sektor pertanian dan pertambangan sekaligus. Selain wilayah daratannya, Kabupaten Gresik juga meliputi Kepulauan Bawean serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kepulauan Bawean memiliki potensi bahan tambang yang bernilai tinggi, salah satunya adalah batu onyx yang sering digunakan sebagai bahan baku pembuatan kerajinan dan dekorasi.⁸¹

⁸⁰Oemar Zainuddin, *Kota Gresik 1896-1916*, (Depok: Penerbit Ruas, 2010), 8

⁸¹ Antonius Purwanto, "Kabupaten Gresik: Kota Santri dan Geliat Industri", diakses pada 28 Februari 2025. <https://www.kompas.id/baca/daerah/2021/11/08/kabupaten-gresik-kota-santri-dan-geliat-industri>

2. Kondisi Ekonomi

Gresik memiliki sejarah panjang yang kaya dalam perkembangan perdagangan dan aktivitas maritim, yang telah berlangsung sejak Abad XI M. Pada periode tersebut, Gresik telah berperan sebagai pusat perdagangan yang menghubungkan berbagai wilayah, baik di dalam maupun luar Nusantara. Sebagai kota pelabuhan yang strategis, Gresik menjadi tujuan utama para pedagang dari berbagai penjuru dunia, termasuk dari Cina, Arab, Gujarat, Kalkuta, Siam, Bengali, dan Campa. Kehadiran para pedagang asing ini mencerminkan tingginya intensitas perdagangan yang berlangsung di Gresik serta menunjukkan perannya dalam jaringan perdagangan internasional.⁸²

Pada Abad XIV M, Gresik mengalami perkembangan pesat sebagai salah satu pelabuhan utama dan pusat perdagangan yang signifikan, terutama di bawah pengaruh Kerajaan Majapahit. Pelabuhan Gresik memainkan peran krusial sebagai pusat distribusi berbagai komoditas, termasuk rempah-rempah, tekstil, logam mulia, dan keramik yang diperdagangkan antara India, Cina, dan wilayah Asia Tenggara. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan utama menjadikannya sebagai salah satu simpul penting dalam jaringan perdagangan internasional. Selain berfungsi sebagai tempat pertukaran barang, pelabuhan ini juga menjadi titik pertemuan budaya dan peradaban dari berbagai bangsa yang datang melalui jalur laut. Rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan merica, yang berasal dari Kepulauan Maluku dan sangat diminati di pasar global, diperdagangkan melalui Gresik sebelum akhirnya dikirim ke berbagai kawasan,

⁸² Pemerintah Kabupaten Gresik, “Kondisi Sejarah Kabupaten Gresik”, diakses pada 1 Maret 2025, <https://gresikkab.go.id/Kondisie/history>

termasuk India, Timur Tengah, dan Eropa.⁸³ Keberadaan Gresik tidak hanya berfungsi sebagai pusat perdagangan, tetapi juga memiliki peran krusial sebagai pintu gerbang menuju ibu kota Majapahit yang terletak di pedalaman. Sebagai akses utama ke pusat kerajaan, Gresik menjadi persinggahan bagi para pedagang yang membawa berbagai komoditas dari berbagai wilayah.⁸⁴

Gresik pada Abad XV dan XVI M, berkembang pesat sebagai pusat perdagangan utama di kawasan Nusantara, menjadikannya salah satu pelabuhan paling penting di wilayah pesisir utara Jawa. Kota ini mengalami kemajuan yang signifikan seiring dengan meningkatnya peran pedagang Muslim dalam aktivitas ekonomi, sehingga menjadikannya simpul strategis dalam jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Timur Tengah, India, dan Cina. Keberadaan Gresik sebagai pusat perdagangan yang ramai menarik berbagai kelompok saudagar, baik dari kalangan masyarakat lokal Jawa maupun para pedagang asing yang berasal dari Cina, India, dan Timur Tengah. Di antara mereka, komunitas Muslim Sino-Jawa memainkan peran yang sangat krusial dalam menggerakkan roda perekonomian. Mereka tidak hanya memperluas jaringan perdagangan dengan membawa komoditas berharga dan keterampilan bisnis, tetapi juga turut membentuk karakter budaya kota dengan memperkenalkan tradisi, sistem keuangan, serta nilai-nilai Islam yang semakin mengakar di tengah masyarakat Gresik. Keberagaman etnis dan interaksi yang

⁸³ Lu'lu'ul Maknunah, "Perdagangan Maritim di Pelabuhan Gresik Tahun 1548-1605 M", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 15

⁸⁴ Dewi Roihanatul Hilmiyyah, "Pelabuhan Gresik sebagai Proses Perdagangan dan Islamisasi Abad XV-XIV M", (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 5-6

intens di pelabuhan ini menciptakan lingkungan kosmopolitan yang dinamis, di mana berbagai pengaruh budaya saling berbaur dan berkembang pesat.⁸⁵

Gresik mulai mengembangkan sistem akuakultur tradisional yang dikenal sebagai "tambak" sejak berabad-abad lalu, menjadikannya sebagai salah satu pusat utama perikanan budidaya di Indonesia. Praktik ini telah ada setidaknya sejak Abad XV M dan terus berkembang seiring waktu, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perekonomian lokal.⁸⁶ Sistem tambak di Gresik memanfaatkan kolam air payau yang terhubung dengan jaringan kanal untuk membudidayakan berbagai spesies perikanan, terutama udang dan bandeng. Dengan teknik yang telah diwariskan secara turun-temurun, metode ini memungkinkan masyarakat setempat mengoptimalkan sumber daya alam pesisir mereka untuk menghasilkan komoditas perikanan dalam jumlah besar. Hingga saat ini, Gresik dikenal sebagai salah satu produsen bandeng terbesar di Indonesia, dengan produksi mencapai sekitar 98.000 ton per tahun. Keberhasilan industri tambak ini tidak hanya memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat lokal, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap ketahanan pangan nasional, memastikan ketersediaan sumber protein yang stabil bagi masyarakat luas.⁸⁷

Pada tahun 1706, Kyai Tumenggung Puspanegara diangkat sebagai Bupati Gresik dan segera mengambil kebijakan strategis dengan mendirikan

⁸⁵ Aniendya Christianna, dkk, "The Impact of Sino-Javanese Musim Migration on Gresik's Visual Culture", *Migration Letters* 20, No. S4, (2023), 128, <https://migrationletters.com/index.php/ml/article/view/3839/2572>

⁸⁶ Citra Fitrie Riany, Stefan Partelow, dan Ben Naget, "Governance Challenges for Indonesian pond Aquaculture: a Case Study of Milkfish Production in Gresik", *Frontiers in Aquaculture* 2, 2023, 1, <https://doi.org/10.3389/faq.2023.1254593>

⁸⁷ Citra Fitrie Riany, Stefan Partelow, dan Ben Naget, "Governance Challenges for Indonesian pond Aquaculture: a Case Study of Milkfish Production in Gresik", 3

pabrik meriam, yang memberikan pengaruh besar terhadap aspek keamanan dan ekonomi di wilayah tersebut. Keputusan ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat sistem pertahanan kota, tetapi juga menciptakan efek psikologis bagi pihak-pihak yang berpotensi mengancam stabilitas Gresik. Keberadaan pabrik ini memungkinkan produksi persenjataan dalam jumlah yang lebih besar dan berkualitas tinggi, menjadikan Gresik sebagai salah satu pusat kekuatan militer yang diperhitungkan di Jawa. Dengan meningkatnya kemampuan pertahanan, kota ini tidak hanya terlindungi dari ancaman eksternal, tetapi juga semakin menarik perhatian dalam konteks politik dan perdagangan di Nusantara.⁸⁸ Di sisi lain, meskipun industri manufaktur modern belum berkembang secara signifikan pada masa itu, perdagangan dan pelayaran tetap menjadi sektor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pada masa pemerintahan Bupati Kyai Tumenggung Astronegoro II, sektor ekonomi dan perdagangan di pelabuhan Gresik mengalami kemajuan yang signifikan. Pelabuhan ini menjadi titik singgah penting bagi para pedagang asing dari berbagai negara yang aktif melakukan transaksi dagang di kawasan tersebut. Beragam komoditas bernilai tinggi diperdagangkan, menegaskan peran strategis Gresik sebagai pusat perdagangan maritim. Keberhasilan ini menempatkan Gresik dalam jajaran empat besar kota pelabuhan tersibuk di Pulau Jawa, sejajar dengan pelabuhan utama lainnya seperti Semarang, Batavia, dan Rembang. Catatan tahun 1774–1775 bahkan menunjukkan bahwa jumlah

⁸⁸ Ida Nur Aissyah, “Pemerintah Poesponegoro Bupati Pertama dan Pengaruhnya dalam Penyiaran Islam di Gresik (1688-1718)”, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009), 57

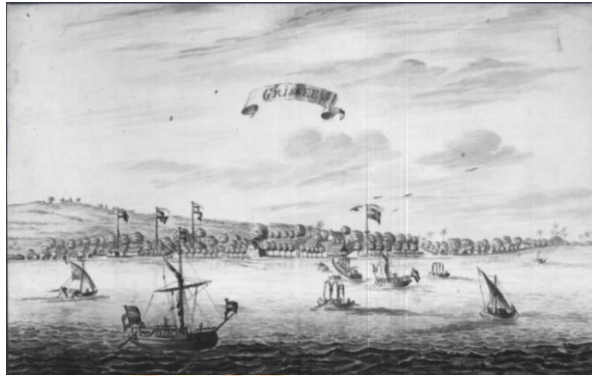
kapal yang bersandar di pelabuhan Gresik mencapai 970 unit, mencerminkan intensitas aktivitas ekonomi yang berlangsung saat itu⁸⁹

Tabel 3.1 Aktifitas Pelabuhan dagang VOC di kawasan Pantai Utara tahun 1774-1775

No.	Kota Pelabuhan	Private	Eropa	VOC	Total
1.	Banyuwangi	163	-	?	163
2.	Pasuruan	144	-	?	144
3.	Sumenep	790	-	-	790
4.	Bangkalan	529	-	?	529
5.	Surabaya	941	-	10	951
6.	Gresik	959	-	11	970
7.	Rembang	985	-	18	1.003
8.	Juwana	859	-	15	874
9.	Jepara	139	-	13	152
10.	Semarang	1.681	-	63	1.744
11.	Pekalongan	595	-	9	604
12.	Tegal	343	-	10	333
13.	Cirebon	671	-	9	680
14.	Batavia	1.487	44	186	1.717
15.	Banten	825	-	13	838

Sumber/Source : Buku Gresik Punya Cerita Peran Gresik dalam Lintasan Sejarah Nusantara

⁸⁹ Eko Jarwanto, *Penguasa-Penguasa di Nagari Tandhes*, (Gresik: Mataseger), 2024, 118-119



Gambar 3.1 Pemandangan pelabuhan Gresik yang sangat ramai dengan pemukiman disepanjang pantai pada tahun 1775-1778
(Sumber Atlas of Mutual Heritage)

Industri penyamakan kulit juga mulai berkembang di Gresik sekitar tahun 1890, dengan pusat produksinya berlokasi di kawasan Kampung Kemasan. Seiring waktu, industri ini mengalami kemajuan pesat berkat penerapan teknik penyamakan yang semakin canggih, memungkinkan produksi kulit dengan kualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional. Para pengrajin kulit di Gresik menghasilkan berbagai produk, mulai dari bahan baku kulit olahan hingga barang jadi seperti tas, sepatu, dan perlengkapan lainnya, yang diminati oleh berbagai kalangan. Kemajuan dalam sektor penyamakan kulit ini turut memperkuat posisi Gresik sebagai kota dagang yang berdaya saing tinggi. Bersama dengan pertumbuhan sektor perdagangan dan industri lainnya,⁹⁰

Menjelang akhir Abad XIX M, masyarakat Gresik mengalami transformasi ekonomi yang signifikan, di mana banyak penduduknya mulai

⁹⁰ Aris Lukman Hakim, “Mobilitas Sosial Ekonomi Kampung Kemasan Kota Islam Gresik Tahun 1890-1920”, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, (2015), 27

berkembang menjadi pengusaha kecil atau kapitalis skala kecil. Mereka mengandalkan industri rumah tangga dan sektor perdagangan sebagai sumber utama mata pencaharian. Sistem ekonomi berbasis kewirausahaan ini tumbuh secara mandiri, didorong oleh semangat berdagang yang kuat serta keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun. Prinsip hidup yang mereka anut tercermin dalam moto khas yang berkembang di kalangan masyarakat, yakni *"Lebih baik menjadi pedagang daripada menjadi pegawai."* Ungkapan ini mencerminkan cara pandang mereka terhadap pekerjaan, yang lebih menekankan pada kebebasan ekonomi dan kemandirian dibandingkan dengan bekerja di bawah otoritas orang lain. Hubungan agama dan ekonomi saling terkait erat, terutama dalam perdagangan dan industri rumahan. Masyarakat Gresik menganggap bekerja sebagai bagian dari ibadah, sehingga kegiatan ekonomi dilakukan sejalan dengan nilai-nilai keagamaan. Hal ini mendorong berkembangnya industri yang menunjang kebutuhan ibadah, seperti kopiah, sarung, terompah, mukenah, dan batik.⁹¹

Gresik berkembang menjadi kota pelabuhan yang sangat penting sejak Abad XVII M hingga awal Abad XX M, di mana hampir seluruh aktivitas perdagangan terpusat di wilayah ini. Meskipun Surabaya telah tumbuh sebagai kota perdagangan, kota tersebut belum memiliki pelabuhan sendiri. Akibatnya, seluruh kegiatan ekspor dan impor yang berkaitan dengan perdagangan di Surabaya tetap harus dilakukan melalui Pelabuhan Gresik. Namun, setelah tahun 1911, kondisi ini mulai berubah seiring dengan dibukanya Pelabuhan Surabaya, yang kelak dikenal sebagai Tanjung Perak. Keberadaan pelabuhan

⁹¹ Oemar Zainuddin, *Kota Gresik 1896-1916*, 16.

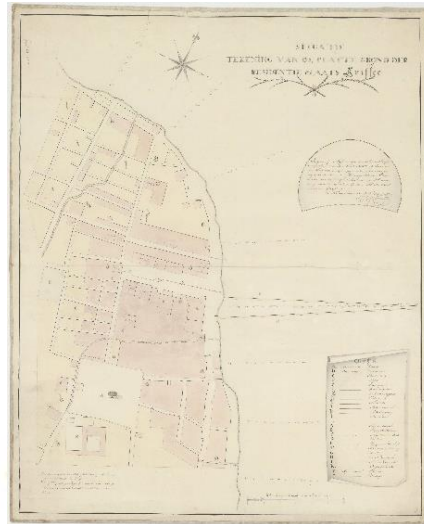
baru ini membuat para saudagar secara bertahap meninggalkan Gresik dan beralih ke Surabaya, yang dianggap menawarkan peluang bisnis yang lebih menjanjikan. Pergeseran aktivitas perdagangan ini berdampak signifikan pada perekonomian Gresik, yang perlahan mengalami kemunduran. Hanya pedagang kecil yang masih bertahan di Pelabuhan Gresik, sementara peran kota ini sebagai pusat perdagangan utama semakin berkurang.⁹²

3. Kondisi Sosial

Kondisi sosial dan struktur sosial di Gresik mencerminkan keberagaman serta dinamika yang kompleks, dipengaruhi oleh posisi geografisnya yang strategis dan sejarah panjangnya sebagai kota pelabuhan. Masyarakat Gresik memiliki karakter yang pluralistik, terbentuk dari perpaduan berbagai kelompok etnis dan budaya. Mayoritas penduduknya berasal dari suku Jawa dan Madura, yang memiliki peran dominan dalam sektor pertanian, perdagangan, dan aktivitas keagamaan.⁹³ Selain itu, terdapat komunitas Arab dan Tionghoa yang telah lama menetap di Gresik dan turut berkontribusi dalam perkembangan ekonomi lokal, terutama dalam bidang perdagangan dan industri. Kehadiran mereka menambah warna dalam dinamika sosial kota ini, menciptakan struktur masyarakat yang heterogen dengan jaringan sosial yang saling berhubungan. Interaksi antara kelompok-kelompok ini tidak hanya terlihat dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga dalam kehidupan budaya dan keagamaan, menjadikan Gresik sebagai kawasan yang kaya akan tradisi dan nilai-nilai multicultural.

⁹² Dukut Imam Widodo, *Grissee Tempo Doeloe*, (Gresik: Pemerintah Kabupaten Gresik, 2004), 629-630

⁹³ Siti Mufarohah dan Aminuddin Kasdi, "Aspek-Aspek Historis Tradisi Sanggring (Kolak Ayam) di Desa Gumeno Kabupaten Gresik", *AVATARA: e-Jurnal Pendidikan Sejarah* 2, No. 3, 2014, 588, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/9206>.



Gambar 3.2 Denah Kota Gresik tahun 1824 menggambarkan tata ruang kota, lengkap dengan alun-alun dan permukiman
(Sumber : National Archiefe)

Dalam aspek permukiman, masyarakat Gresik cenderung menetap dalam kelompok-kelompok yang terbentuk berdasarkan latar belakang etnis masing-masing. Pola pemukiman ini mencerminkan struktur sosial yang berkembang seiring dengan sejarah panjang Gresik sebagai kota pelabuhan dan pusat perdagangan. Etnis Arab, misalnya, banyak bermukim di kawasan Kampung Gapuro dan Pulo Pancikan, yang sejak dahulu menjadi pusat aktivitas keagamaan dan perdagangan mereka. Sementara itu, komunitas Tionghoa menetap di Kampung Pecinan, yang dikenal sebagai kawasan perdagangan dan pusat aktivitas ekonomi mereka. Di sisi lain, kelompok etnis Eropa memilih untuk tinggal di wilayah sebelah utara alun-alun, yang kemungkinan besar dipilih karena lokasinya yang strategis serta lebih dekat dengan fasilitas

administratif dan perdagangan utama.⁹⁴ Meskipun masyarakat Gresik terdiri dari beragam kelompok etnis dengan latar belakang budaya yang berbeda, mereka mampu hidup berdampingan secara harmonis.

Pendidikan dan tingkat literasi masyarakat di Gresik sangat dipengaruhi oleh keberadaan pesantren sebagai pusat pembelajaran serta kuatnya tradisi Islam yang telah mengakar dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Pesantren di Gresik berperan besar dalam membangun sistem pendidikan berbasis Islam, baik dalam aspek keagamaan maupun spiritual. Salah satu pesantren tertua di daerah ini didirikan oleh Syaikh Maulana Malik Ibrahim, yang lebih dikenal sebagai Sunan Gresik. Sebagai salah satu tokoh Wali Songo yang berperan dalam penyebaran Islam di Jawa, beliau tidak hanya menyebarkan ajaran Islam tetapi juga mengembangkan sistem pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter dan moral masyarakat. Pesantren yang beliau dirikan menjadi pusat pembelajaran agama, di mana para santri tidak hanya memperoleh pemahaman keislaman, tetapi juga dibina dalam aspek sosial dan spiritual.⁹⁵

Sistem pendidikan di pesantren Gresik menerapkan metode pembelajaran tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun, yakni bandongan dan sorogan. Metode bandongan merupakan sistem pembelajaran kolektif, di mana seorang kiai membacakan dan menjelaskan isi kitab kuning kepada santri, memungkinkan mereka memahami ajaran Islam secara luas

⁹⁴ Mustolehudin, "Merawat Tradisi Membangun Harmoni: Tinjauan Sosiologis Tradisi Haul dan Sedekah Bumi di Gresik", *Jurnal Multikultural dan Multireligius* 13, No. 3, 2014, 26, <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/110>.

⁹⁵ Sudirman, "Urgensi Pengembangan Adiwiyata bagi Pengembangan Pesantren", (Tesis, UIN Sulthan Syarif Kasim Riau, 2017) 28

dalam suasana belajar yang bersifat klasikal. Sementara itu, metode sorogan bersifat individual, di mana santri membaca kitab kuning di hadapan kiai untuk mendapatkan bimbingan dan koreksi secara langsung. Kitab-kitab kuning yang digunakan dalam sistem pembelajaran ini merupakan karya ulama klasik yang membahas berbagai cabang ilmu keislaman, seperti fiqih, tauhid, tafsir, dan tasawuf. Dengan menerapkan sistem pendidikan berbasis kitab kuning ini, pesantren di Gresik tidak hanya berfungsi sebagai pusat penyebaran ilmu agama, tetapi juga berperan dalam membentuk generasi yang memiliki pemahaman keislaman yang mendalam, berakhlak mulia, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi.⁹⁶

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Gresik menggunakan bahasa Jawa sebagai alat komunikasi utama, dengan dialek khas yang dikenal sebagai bahasa Gresikan. Dialek ini memiliki ciri tersendiri yang membedakannya dari variasi bahasa Jawa lainnya, mencerminkan pengaruh budaya lokal yang berkembang di wilayah tersebut.⁹⁷ Selain bahasa lisan, masyarakat Gresik juga memiliki tradisi literasi yang khas, yaitu penggunaan Aksara Pegon sebagai sistem penulisan. Aksara Pegon merupakan bentuk tulisan yang menggunakan huruf Arab tanpa harakat untuk menuliskan teks dalam bahasa Jawa.⁹⁸ Sistem penulisan ini banyak digunakan dalam berbagai manuskrip keagamaan, karya sastra, serta dokumen-dokumen tradisional, terutama yang berkaitan dengan

⁹⁶ Aris Syukron, "Perbandingan Metode Bandongan dan Sorongan dalam Memahami Kitab Safinatunnajah", *Tsaqafatuna: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2, No.1, 2020, 7. <https://jurnal.stit-buntetpesantren.ac.id/index.php/tsaqafatuna/article/download/37/17/159>

⁹⁷ Salimatul Ummah, "Komunikasi Transendental Tradisi Macanan dalam Perspektif Mulla Sadra (Studi di Desa Kisik Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)", (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2021), 40

⁹⁸ Syamsul Hadi, "Tradisi Pesantren dan Kosmopolitanisme Islam di Masyarakat Pesisir Utara Jawa", *MUQODDIMA: Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi* 2, No. 1, 2021, 92, <https://journal.unusia.ac.id/index.php/Muqoddima/article/download/233/185/652>

ajaran Islam. Keberadaan Aksara Pegon tidak hanya mencerminkan akulturasi antara budaya Jawa dan Islam, tetapi juga menunjukkan pentingnya literasi dalam kehidupan intelektual masyarakat Gresik sejak masa lampau.

Pada masa kolonial Belanda, pendidikan formal di Gresik mulai mengalami perkembangan sebagai bagian dari implementasi Politik Etis yang dicanangkan oleh pemerintah kolonial. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi melalui tiga sektor utama, yaitu pendidikan, irigasi, dan transmigrasi. Dalam praktiknya, pendidikan formal di Gresik masih sangat terbatas dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hanya kelompok elite pribumi atau mereka yang memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik yang dapat mengakses pendidikan ini, mengingat biaya dan persyaratan yang cukup tinggi. Kurikulum pendidikan formal pada masa itu lebih menitikberatkan pada keterampilan dasar, seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta penguasaan bahasa Belanda. Pembelajaran ini dirancang sesuai dengan kebutuhan administrasi pemerintah kolonial, yang pada akhirnya bertujuan mencetak tenaga kerja pribumi untuk mengisi posisi rendah dalam birokrasi pemerintahan. Dengan demikian, meskipun pendidikan formal berkembang, peluang bagi masyarakat pribumi untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan berkontribusi dalam sektor lain masih sangat terbatas.⁹⁹

⁹⁹ Iin Purnamasari, dan A. Y. Soengeng Ysh, *Sejarah Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dalam Lima Masa*, (Yogyakarta, Magnum Pustaka Utama, 2021), <https://eprints.upgris.ac.id/2781/1/sejarah%20pendidikan%20lima%20masa%20komplit.pdf%20BU%20IIN.pdf>

B. Kondisi dan Dampak Sosial Ekonomi Selama Proses Tranformasi Wilayah

Gresik

1. Kondisi dan Dampak Sosial terhadap Masyarakat Gresik

Perubahan status administratif dan transformasi wilayah suatu daerah umumnya membawa dampak nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Dalam kasus antara Kabupaten Gresik dan Kabupaten Surabaya, perubahan ini tidak hanya memengaruhi struktur tata kelola pemerintahan, tetapi juga berdampak signifikan terhadap aksesibilitas kualitas layanan publik, dan sektor pendidikan. Salah satu konsekuensi utama yang muncul adalah terganggunya pelayanan administrasi kependudukan, yang mencerminkan bagaimana dinamika administratif turut memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat secara langsung.

Ketika Gresik berstatus sebagai kewedanaan di bawah Kabupaten Surabaya, masyarakat Gresik mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen-dokumen administratif yang harus dilakukan di Surabaya sebagai pusat pemerintahan. Meskipun terdapat kantor perwakilan di Gresik, kewenangan administratif yang terbatas membuat segala urusan yang bersifat kabupaten tetap harus diselesaikan di Surabaya. Hal ini memperlihatkan bagaimana sentralisasi kekuasaan administratif di Surabaya menciptakan hambatan birokratis bagi masyarakat Gresik. Namun, setelah terjadi perubahan status wilayah dan pemindahan pusat pemerintahan ke Gresik, masyarakat setempat tidak lagi menghadapi kesulitan serupa. Proses desentralisasi tersebut

membawa dampak positif berupa efisiensi pelayanan publik dan penguatan identitas administratif Gresik sebagai entitas kabupaten yang otonom.¹⁰⁰

Kondisi tersebut tidak hanya mencerminkan keterbatasan dalam pelayanan administrasi, tetapi juga memperlihatkan dampak yang lebih luas terhadap akses masyarakat terhadap fasilitas sosial dasar, seperti pendidikan. Sentralisasi pemerintahan di Surabaya secara tidak langsung memaksa masyarakat Gresik untuk bergantung pada infrastruktur kota induk, baik untuk keperluan administratif maupun kebutuhan sosial lainnya. Menurut penuturan Budayawan Gresik, Pak Toha, informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa:

“Dulu setiap urusan berpusat di Gentengkali, bukan hanya urusan administrasi publik bahkan sekolah negeri saja di Gresik tidak ada sehingga harus di Surabaya. Masyarakat Gresik dulu sekolah di sekolah Kompleks, sekolah bung karno. Dulu sekolahnya naik kereta, karena kereta tergolong ajeg tergolong masih berjalan. Dulu naik dari belakan daerah SMP 2 kebosen sekarang itu, turun daerah pasar turi dari pasar turi itu jalan kaki. Jadi sekolah negeri itu gak ada di Gresik, SMP maupun SMA.”¹⁰¹

Hasil wawancara ini menggambarkan bahwa pada masa ketika Gresik masih berada dalam struktur administratif di bawah Kabupaten Surabaya, dampak sosial dari transformasi wilayah sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam akses terhadap layanan pendidikan. Seluruh urusan, baik administratif maupun kebutuhan sosial seperti pendidikan, terpusat di wilayah Gentengkali, Surabaya. Ketiadaan sekolah negeri di Gresik pada saat itu memaksa masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke Surabaya, seperti di Sekolah Kompleks atau Sekolah Bung Karno. Mobilitas pelajar Gresik yang harus menempuh perjalanan jauh menggunakan kereta api—yang

¹⁰⁰ Wawancara dengan Pak Kris pada 30 April 2025

¹⁰¹ Wawancara dengan Pak Toha pada 25 Mei 2025

kala itu masih aktif dan menjadi sarana transportasi utama—menunjukkan adanya ketimpangan dalam penyediaan fasilitas publik antara pusat pemerintahan dan wilayah yang menjadi perpanjangan administratifnya. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan keterbatasan infrastruktur di Gresik, tetapi juga menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap pusat administratif Surabaya dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan menengah.

Transformasi administrasi juga mendorong terjadinya urbanisasi di wilayah Gresik. Peningkatan pembangunan infrastruktur dan reorganisasi wilayah administratif menarik penduduk dari daerah pedesaan ke pusat-pusat kota, terutama seiring dengan berkembangnya industri dan perdagangan di kawasan ini.¹⁰² Sebagaimana disampaikan oleh Pak Eko Jarwanto, Sejarawan Gresik, bahwa:

“Pabrik Semen dulu ketika berdiri tahun 1956, saat itu mengorbankan masyarakat, diboyong masyarakat dipindah untuk mendirikan pabrik itu, namun ketika pabrik Semen berdiri susah mencari pegawai yang asli orang Gresik, karena orang Gresik itu kan mentalnya bebas, mereka bisnis man sehingga mereka bangun jam berapa tidur jam berapa mereka tidak mau diatur-atur. Sehingga mendapat pegawai orang Gresik itu susah, akhirnya mengambil pegawai-pegawai yang dari luar Gresik dan kemudian terjadi migrasi. Oleh pegawai Semen kebanyakan pendatang dari luar Gresik. Kalaupun ada yang warga Gresik, itu pun diambil dari daerah-daerah yang jauh, seperti Cerme, sembayat, dll, bahkan dulu ada angkutan yang mengantar jemput mereka yaitu truck yang ditutup terpal, sebelum adanya bus Semen.”¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pendirian Pabrik Semen Gresik pada tahun 1956 menandai fase awal industrialisasi wilayah, namun juga

¹⁰² Sonia Hirt dan Kiril Stanilov, *Twenty Years of Transition: The Evolution of Urban Planning in Eastern Europe and the Former Soviet Union, 1989–2009* (Nairobi: UN-HABITAT, 2009), 17, https://www.researchgate.net/publication/271586297_Twenty_Years_of_Transition_The_Evolution_of_Urban_Planning_in_Eastern_Europe_and_the_Former_Soviet_Union_1989-2009

¹⁰³ Wawancara dengan Pak Eko Jarwanto pada 28 Mei 2025

berdampak langsung pada kehidupan sosial masyarakat setempat. Pendirian pabrik tersebut dilakukan dengan mengorbankan ruang hidup masyarakat di kawasan pembangunan sehingga sejumlah penduduk harus direlokasi demi proyek industri skala besar ini. Meskipun diharapkan dapat membuka lapangan kerja bagi warga lokal, realitas yang terjadi menunjukkan sebaliknya. Karakter masyarakat Gresik yang cenderung mandiri dan fleksibel membuat mereka enggan mengikuti pola kerja industri yang ketat. Akibatnya, perusahaan merekrut tenaga kerja dari luar daerah, memicu arus migrasi ke Gresik dan mengubah struktur sosial di sekitar kawasan industri. Para pekerja pendatang inilah yang kemudian mendorong proses urbanisasi, yang ditunjang oleh fasilitas transportasi khusus sebelum tersedianya bus karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa industrialisasi tidak hanya mengubah ruang fisik, tetapi juga memicu pergeseran demografis dan pola interaksi sosial di Gresik.

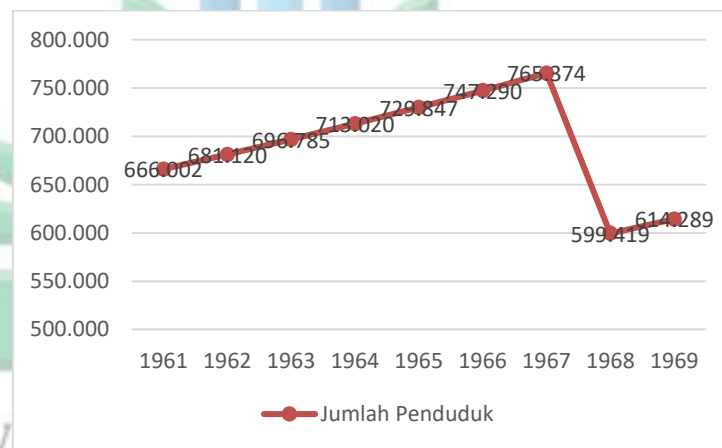


Gambar 3.3 Rumah dinas Karyawan Pabrik Semen Gresik tahun 1957

(Sumber : <https://sikn.jatimprov.go.id/index.php/image-1088>)

Berdirinya Pabrik Semen Gresik di Kecamatan Kebomas juga membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial masyarakat setempat. Kehadiran pabrik tersebut memicu munculnya kawasan permukiman baru yang

awalnya dibangun untuk para karyawan, mengubah lahan kosong menjadi wilayah berpenghuni. Karena sebagian besar tenaga kerja berasal dari luar daerah seperti Blitar, Kediri, dan Probolinggo, dan tidak seluruhnya dapat tinggal di kompleks perumahan pabrik, mereka terpaksa mencari tempat tinggal di luar fasilitas pabrik. Kondisi ini mendorong warga lokal untuk membangun rumah kos atau pemondokan guna memenuhi kebutuhan hunian para pekerja. Selain itu, ada pula penduduk yang menyewakan bahkan menjual tanahnya kepada pendatang.¹⁰⁴



Gambar 3.4 Grafik kependudukan Kabupaten Surabaya tahun 1961- 1969¹⁰⁵

(Sumber : Jawa Timur dalam Angka 1970)

Dalam data statistik kependudukan menunjukkan bahwa selama periode 1961 hingga 1970, Kabupaten Surabaya mengalami pertumbuhan penduduk yang relatif stabil, namun tidak secepat wilayah urban lain seperti Kotamadya Surabaya atau Kabupaten tetangga seperti Sidoarjo dan Lamongan. Pada tahun

¹⁰⁴ Purnawan Basundoro, "Industrialisasi, Perkembangan Kota, dan Respon Masyarakat", *Humaniora* 13, No. 2, 2001, 136, <https://www.neliti.com/publications/11798/>

¹⁰⁵ Grafik ini menunjukkan pertumbuhan penduduk yang relatif stabil dari tahun 1961-1967, dengan peningkatan dari 666.002 jiwa menjadi 765.374 jiwa. Namun pada tahun 1968 terjadi penurunan tajam hingga angka 599.419 jiwa, kemudian naik kembali tahun 1969 menjadi 614.284

1961, jumlah penduduk Kabupaten Surabaya tercatat sebanyak 666.002 jiwa dan meningkat menjadi 592.595 jiwa pada tahun 1970, berdasarkan data Sensus Penduduk sementara 5 Juli 1970. Meskipun terdapat sedikit penurunan pada angka tahun 1970 dibanding tahun-tahun sebelumnya (misalnya 1969: 614.284 jiwa), hal ini kemungkinan besar mencerminkan kebijakan pergeseran administratif wilayah Kabupaten Suarabya ke Kotamadya Surabaya dan perpindahan penduduk akibat perubahan status wilayah. Dengan luas wilayah sebesar 1.137,05 km², tingkat kepadatannya hanya 521 jiwa/km², jauh lebih rendah dibandingkan Kotamadya Surabaya (5.375 jiwa/km²) maupun daerah seperti Kota Mojokerto dan Malang. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Surabaya bersifat lebih rural dan berfungsi sebagai hinterland atau daerah penyangga dari perkembangan kota induknya.¹⁰⁶

Dampak sosial lain yang muncul akibat proses industrialisasi dan urbanisasi di Gresik adalah terjadinya pergeseran dalam struktur keluarga dan pola interaksi sosial masyarakat. Pola hidup tradisional yang sebelumnya ditandai oleh keberadaan keluarga besar dan nilai-nilai gotong royong mulai tergantikan oleh model keluarga inti yang lebih individualistis serta gaya hidup modern. Perubahan ini turut diperkuat oleh meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan publik, sebagai hasil dari pembangunan infrastruktur seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan sistem transportasi yang dilakukan pemerintah dalam rangka menunjang pertumbuhan kawasan industri.¹⁰⁷

¹⁰⁶ *Jawa Timur dalam Angka 1970*, (Surabaya, Sensus dan Statistika Propinsi Djawa Timur, 1971), 21

¹⁰⁷ Wawancara dengan Pak Toha pada 25 Mei 2025

2. Kondisi dan Dampak Ekonomi terhadap Masyarakat Gresik

Perubahan batas wilayah dan kedudukan administratif sering kali meninggalkan jejak yang lebih dalam daripada sekadar perpindahan pusat pemerintahan. Di balik keputusan-keputusan politik dan kebijakan birokratis, terdapat denyut ekonomi masyarakat yang perlahan menyesuaikan diri dengan arah baru yang ditetapkan oleh penguasa. Gresik, sebuah wilayah pesisir yang sejak lama dikenal dengan kekayaan sumber daya alam dan tradisi perdagangannya, mengalami perjalanan panjang dalam kerangka kebijakan pemerintahan dari tahun 1934 hingga 1974. Pergeseran status dari bagian Kabupaten Surabaya menuju wilayah otonom tidak hanya memengaruhi struktur kekuasaan lokal, tetapi juga menjadi titik tolak transformasi ekonomi yang mengubah wajah masyarakatnya dari basis agraris dan perikanan menuju kawasan industri yang strategis di Jawa Timur.

Pada masa ketika Gresik masih berstatus sebagai bagian dari Kabupaten Surabaya, struktur sosial ekonomi masyarakat setempat menunjukkan corak yang khas dan mandiri. Mayoritas penduduk Gresik saat itu berprofesi sebagai petani, petambak, dan pemilik usaha skala kecil seperti home industry. Aktivitas ekonomi ini memperlihatkan bahwa meskipun secara administratif Gresik belum berdiri sendiri, masyarakatnya masih memiliki basis ekonomi lokal yang kuat dan berorientasi pada potensi sumber daya alam wilayah pesisir. Secara khusus, wilayah pertambakan Gresik bahkan dikenal sebagai yang terluas di Jawa Timur serta menjadi penghasil ikan bandeng berkualitas terbaik. Kondisi ini menunjukkan bahwa Gresik memiliki identitas ekonomi yang berbeda dan cukup kuat dibandingkan daerah-daerah sekitarnya, serta memiliki peranan

strategis dalam pemenuhan kebutuhan pangan, khususnya hasil perikanan tambak, di wilayah regional Jawa Timur.¹⁰⁸

Pemindahan pusat pemerintahan dari Gresik ke Surabaya tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga memicu pergeseran pola ekonomi masyarakat, khususnya kalangan menengah ke atas. Masyarakat Gresik yang memiliki modal dan usaha turut menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut dengan membuka atau memindahkan tempat usahanya ke Surabaya. Hal ini disebabkan oleh bergesernya pusat kegiatan perdagangan dan pemerintahan ke Surabaya, yang secara otomatis menjadikan kota tersebut sebagai poros ekonomi baru di kawasan. Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika mobilitas ekonomi sebagai respons terhadap sentralisasi kekuasaan administratif dan ekonomi. Para pelaku usaha dari Gresik tidak hanya berpindah secara fisik, tetapi juga mengalihkan orientasi ekonominya ke wilayah pusat, yang mencerminkan pola adaptasi masyarakat terhadap struktur kekuasaan kolonial.¹⁰⁹

Selain itu, transformasi administratif ini juga berdampak pada pelaku ekonomi lokal dari kalangan masyarakat kecil, terutama para pengrajin tradisional di Gresik. Meskipun memiliki keterampilan tinggi dalam pembuatan kerajinan tangan, para pengrajin ini seringkali terkendala dalam hal permodalan. Ketergantungan mereka pada pemodal dari Surabaya menyebabkan relasi ekonomi yang timpang. Dalam praktiknya, para pengrajin hanya berperan sebagai tenaga produksi, sedangkan kontrol atas distribusi dan

¹⁰⁸ Wawancara dengan Pak Kris pada 30 April 2025

¹⁰⁹ Wawancara dengan Pak Eko Jarwanto pada 28 Mei 2025

penjualan produk sepenuhnya berada di tangan pemilik modal di Surabaya. Keadaan ini menciptakan struktur ekonomi yang menyerupai sistem manufaktur terpusat, di mana Gresik berperan sebagai lokasi produksi dan Surabaya menjadi pusat manajemen serta pemasaran. Namun karena tidak adanya sistem organisasi yang formal antara kedua wilayah tersebut, relasi ini tidak dapat disebut sebagai sistem industri yang utuh, meskipun fungsinya menyerupai sebuah pabrik.¹¹⁰

Setelah melewati masa kolonial, pendudukan Jepang, dan awal kemerdekaan, arah kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah bergeser untuk mendorong pembangunan sektor industri. Pemindahan pusat pemerintahan ke Gresik menjadi titik awal terjadinya perubahan struktur ekonomi wilayah secara signifikan. Perubahan fungsi administratif ini turut membuka ruang bagi percepatan pertumbuhan ekonomi, terutama pasca kemerdekaan ketika berbagai perusahaan besar mulai didirikan, salah satunya adalah Pabrik Semen Gresik yang menjadi simbol awal industrialisasi di kawasan tersebut. Arus investasi yang meningkat, diikuti oleh pembangunan infrastruktur pendukung, menjadikan Gresik sebagai wilayah yang semakin strategis dalam jejaring ekonomi regional.¹¹¹ Posisi ini memperkuat peran Gresik sebagai kawasan penopang Surabaya.

¹¹⁰ *Kabupaten Gresik Membangun*, (Gresik, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, 1974)

¹¹¹ Achmad Hadi, dkk, "Sustainability Analysis of Industrial Estate Development in the Gresik Urban Area of East Java", *International Journal of Civil Engineering and Technology* 10, No. 8, 2019, 12, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3450281.

Tabel 3.2 Banyaknya perusahaan di Kabupaten Surabaya (Gresik) tahun 1963

Bentuk Badan Hukum	Jumlah Perusahaan (Mesin Tenaga)	Jumlah Perusahaan (Tanpa Mesin)	Total
Perusahaan Negara (P.N.)	5	-	5
Perseroan Terbatas / Naamloze Vennootschap (P.T./N.V.)	20	3	23
Commanditaire Vennootschap (C.V.)	15	6	21
Firma (Fa.)	6	3	9
Kongsi	3	2	5
Perseorangan	37	333	370
Koperasi	-	4	4
Jumlah	86	351	437

Sumber/Source : Sensus Perindustrian tahun 1964

Berdasarkan data dalam Tabel diatas mengenai Banyaknya perusahaan di Kabupaten Surabaya (Gresik) tahun 1963, wilayah Kabupaten Surabaya menunjukkan keragaman bentuk badan hukum yang menaungi perusahaan-perusahaan yang beroperasi. Secara keseluruhan, tercatat sebanyak 86 perusahaan yang menggunakan mesin tenaga dan 351 perusahaan yang masih mengandalkan tenaga non-mesin. Perusahaan perseorangan menjadi bentuk badan hukum yang paling dominan, yakni 37 perusahaan bermesin dan 333 tanpa mesin, yang mengindikasikan kuatnya aktivitas industri kecil dan informal, khususnya di kawasan Gresik sebagai bagian dari Kabupaten Surabaya kala itu. Selain itu, terdapat pula perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT/NV) sebanyak 20 unit, CV sebanyak 15 unit, serta beberapa lainnya berbentuk firma dan kongsi. Ragam bentuk hukum ini mencerminkan struktur ekonomi yang majemuk di wilayah Kabupaten

Surabaya, sekaligus menegaskan peranan strategis kawasan tersebut sebagai salah satu pusat kegiatan industri sebelum mengalami transformasi administratif menjadi Kabupaten Gresik.¹¹²

Keberadaan pabrik-pabrik besar di wilayah Gresik, khususnya setelah pembangunan Pabrik Semen Gresik, menjadi magnet yang menarik arus migrasi penduduk dari berbagai daerah. Lonjakan jumlah pendatang ini secara langsung mendorong peningkatan kebutuhan akan berbagai layanan dan sarana pendukung kehidupan sehari-hari. Dampak terhadap perubahan tersebut, masyarakat lokal mulai membuka usaha seperti warung makan, kios sembako, dan toko kelontong yang tersebar di sekitar kawasan industri. Di samping itu, kebutuhan tempat tinggal turut meningkat, sehingga banyak warga setempat yang membangun rumah kontrakan atau menyediakan kamar kos sebagai sumber pendapatan baru, yang kemudian membentuk tatanan sosial-ekonomi baru yang lebih kompleks, aktif, dan saling bergantung di antara komunitas pendatang dan penduduk asli.¹¹³

Perubahan status administratif Gresik dari bagian Kabupaten Surabaya menjadi wilayah otonom tidak hanya berdampak pada tata kelola pemerintahan, tetapi juga mendorong pergeseran sosial ekonomi yang signifikan. Dari daerah pesisir dengan basis ekonomi lokal, Gresik tumbuh menjadi kawasan industri penting di Jawa Timur, mengalami dinamika usaha dan relasi produksi sejak masa kolonial hingga pasca kemerdekaan. Transformasi ini menunjukkan

¹¹² Biro Pusat Statistik, *Sensus Perindustrian Tahun 1964: Hasil Pengolahan Sektor Industri Besar dan Sedang Djawa Timur* (Jakarta: Bagian Sensus Perindustrian, Biro Sensus, 1964), 21. <https://jatim.bps.go.id/id/publication/1970/04/06/c713e00bea80491773dcffb2>

¹¹³ Wawancara dengan Pak Toha pada 25 Mei 2025

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada temuan penelitian mengenai “Transformasi Administrasi Wilayah Gresik dalam Kebijakan Pemerintahan Masa kolonial (1934–1942) dan Pasca Kemerdekaan (1950–1974)”, dapat ditarik kesimpulan melalui rangkuman abstraksi hasil kajian sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah selama proses transformasi administrasi wilayah Gresik pada masa kolonial (1934–1942) dan pasca kemerdekaan (1950–1974) menunjukkan adanya perubahan struktur kekuasaan dan arah pembangunan yang signifikan. Pada masa kolonial, melalui *Staatsblad No. 749 Tahun 1934*, pemerintah Hindia Belanda menghapus status Kabupaten Gresik dan menggabungkannya ke Kabupaten Surabaya sebagai bagian dari kebijakan efisiensi administratif dan sentralisasi kekuasaan. Gresik kehilangan peran otonomnya dan menjadi wilayah subordinat dengan fungsi terbatas pada kegiatan kewedanan. Namun, setelah kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia melalui *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950*, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965*, dan *Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974* secara bertahap mengembalikan fungsi administratif dan simbolik Gresik sebagai pusat pemerintahan daerah. Kebijakan pembangunan industri strategis seperti pendirian *Pabrik Semen Gresik (1957)* dan *PT Petrokimia (1970)* turut memperkuat posisi Gresik sebagai wilayah penting dalam perekonomian Jawa Timur, sekaligus meneguhkan identitasnya sebagai kabupaten yang mandiri secara administratif dan ekonomi.

2. Kondisi dan dampak sosial ekonomi masyarakat Gresik selama masa transformasi administrasi menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam struktur sosial, pola ekonomi, dan identitas lokal masyarakat. Pada masa penghapusan kabupaten (1934–1940-an), masyarakat mengalami kemunduran aktivitas ekonomi akibat hilangnya pusat pemerintahan dan pergeseran fungsi perdagangan ke Surabaya. Namun setelah 1950, terutama dengan munculnya kebijakan industrialisasi, Gresik mengalami transisi dari masyarakat agraris dan maritim menuju masyarakat industri. Pembangunan infrastruktur, munculnya lapangan kerja baru, dan meningkatnya arus migrasi menyebabkan tumbuhnya kawasan permukiman, perubahan mata pencaharian, serta peningkatan taraf hidup masyarakat. Secara sosial, interaksi antaretnis dan kelas pekerja baru mengubah pola relasi tradisional, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, meski juga memunculkan ketimpangan ekonomi serta tantangan lingkungan akibat industrialisasi. Dengan demikian, transformasi administratif Gresik tidak hanya mengubah tata kelola pemerintahan, tetapi juga membentuk karakter sosial-ekonomi baru di Gresik

Hasil temuan saya dibandingkan dengan studi sebelumnya terletak pada cakupan analisis yang lebih luas dan pembahasan yang lebih mendalam. Jika riset terdahulu umumnya hanya menyoroti satu aspek, seperti pelabuhan, industri Semen Gresik, atau dinamika sosial-ekonomi pasca-industrialisasi. Sedangkan penelitian ini menggabungkan kajian kebijakan pemerintah, proses perubahan administrasi, dan dampak sosial-ekonomi Gresik sepanjang 1934–1974. Temuan saya menunjukkan bahwa penghapusan Kabupaten Gresik pada 1934 merupakan bagian dari kebijakan reformasi pemerintahan, dan mengungkap keterkaitan erat antara kebijakan pasca kemerdekaan, industrialisasi, dan transformasi sosial yang belum diulas mendalam oleh

penelitian sebelumnya. Pendekatan ini memberikan perspektif baru yang holistik dengan menempatkan transformasi Gresik dalam konteks sejarah regional dan kebijakan pembangunan nasional.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar kajian sejarah administratif daerah seperti Gresik terus dikembangkan dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan aspek kebijakan pemerintahan, dinamika sosial-ekonomi, serta konteks kolonial dan pascakolonial secara lebih menyeluruh. Penelusuran arsip dan sumber primer yang lebih luas, terutama dari sumber Belanda dan Jepang, masih sangat diperlukan bagi peneliti selanjutnya untuk memperkaya perspektif dan mendalami faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan penggabungan maupun pemisahan administratif. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan dapat menjadikan sejarah transformasi administrasi ini sebagai dasar untuk membangun identitas lokal dan memperkuat arah pembangunan berbasis sejarah wilayahnya.

Penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa sejarah bukan hanya catatan masa lalu, tetapi juga cermin bagi proses pembangunan masa kini. Transformasi wilayah Gresik dari bagian Kabupaten Surabaya menjadi kabupaten mandiri merupakan proses yang sarat makna politis, sosial, dan ekonomi. Namun, untuk lebih memaksimalkan kontribusi akademik skripsi ini, penelitian lanjutan dengan cakupan waktu yang lebih luas hingga periode kontemporer akan sangat membantu dalam menjelaskan kesinambungan dan perubahan struktural yang terjadi pasca 1974. Dengan begitu, sejarah Gresik dapat ditulis lebih utuh sebagai bagian dari narasi besar perkembangan daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen

Besluit. Staatsblad van Nederlandsch-Indië No. 31 Tahun 1937

Besluit. Staatsblad van Nederlandsch-Indië No. 53 Tahun 1826

Regeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië tahun 1931, Dutch East Indies.
<https://play.google.com/store/books/details?id=VjUNAQAIAAJ>

Regeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië tahun 1941, Dutch East Indies.
<https://play.google.com/store/books/details?id=fBsPAQAIAAJ>

Sekretaris Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 1974 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya

Sekretaris Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 132 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Semen Gresik

Sekretaris Negara Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1950 Tentang Pemerintah Kabupaten Daerah di Djawa Timur, pasal 2 ayat (1).

Sekretaris Negara Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Suarabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah UU No. 12 Tahun 1950

Sekretaris Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1)

Staatsblad van Nederlandsch-Indië No. 164 Tahun 1935

Staatsblad van Nederlandsch-Indië No. 172 Tahun 1887

Staatsblad van Nederlandsch-Indië No. 53 Tahun 1826

Staatsblad van Nederlandsch-Indië No. 715 Tahun 1934

Staatsblad van Nederlandsch-Indië No. 749 Tahun 1934

Staatsblad van Nederlandsch-Indië No. 99 Tahun 1941

Buku-buku

Abdurahman, Dudung, *Metode Penelitian Sejarah Islam*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011

Jarwanto, Eko, *Gresik Punya Cerita Peran Gresik dalam Lintasan Sejarah Nusantara*, Gresik: Yayasan Mataseger, 2022

Jarwanto, Eko, *Penguasa-Penguasa di Nagari Tandhes*, Gresik: Yayasan Mataseger, 2024

Kabupaten Gresik Membangun, Gresik, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, 1974

Margana, Sri dan M. Nursam, *Kota-Kota di Jawa Identitas, Gaya Hidup, dan Permasalahan Sosial*, Yogyakarta: Ombak, 2010

Tim Penyusun Sejarah Gresik, *Kota Gresik: Sebuah Perspektif Sejarah dan Harijadi Gresik*, Gresik, Pemerintah Daerah Tingkat II Gresik, 1991

Widodo, Dukut Imam, dkk, *Grissee Tempo Doeloe*, Gresik, Pemerintah Kabupaten Gresik, 2004

Zainuddin, Oemar, *Kota Gresik 1896-1916*, Depok: Penerbit Ruas, 2010

Skripsi, Tesis, Tugas Akhir

Aissyah, Ida Nur, “Pemerintah Poesponegoro Bupati Pertama dan Pengaruhnya dalam Penyiaran Islam di Gresik (1688-1718)”, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009

Amin, Muhammad Fasikhul, “Sejarah Sidayu dari Bekas Kadipaten , Kewedanan, hingga menjadi Kecamatan Abad XVI-XX M”, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016

Dewi, Irma Lutfiana, “Peralihan Kekuasaan Gresik dari Kerajaan Giri Kedaton menjadi Kabupaten Tandes (Studi Historis)”, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016

Hakim, Aris Lukman, “Mobilitas Sosial Ekonomi Kampung Kemasan Kota Islam Gresik Tahun 1890-1920”, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015

Hasanah, Uswatun, “Syahbandar Perempuan Nyai Ageng Pinatih di Gresik, Jawa Timur (Peran dan Kontribusinya Bagi Sumber Belajar Sejarah di SMA)”, Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha, 2020

Hilmiyyah, Dewi Roihanatul, “Pelabuhan Gresik sebagai Proses Perdagangan dan Islamisasi Abad XV-XIV M”, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019

Maknunah, Lu'lu'ul, “Perdagangan Maritim di Pelabuhan Gresik Tahun 1548-1605 M”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019

Muniroh, Meytha Aisyi, “Industrialisasi dan Perkembangan Perumahan di Gresik (1957-1993)”, Skripsi, Universitas Airlangga, 2015

- Perkasa, Muhammad Ilham, “Konfigurasi Spasial pada Kawasan Peninggalan Islam di Wilayah Perkotaan Jawa Timur: Studi Kasus Kawasan Maulana Malik Ibrahim, Ampel, dan Giri”, Tugas Akhir, Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, 2020
- Ridlo, Muhammad Ainur, “Industrialisasi dan Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Islam Kota Gresik (1957-1990)”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2018
- Santoso, Vetri Agung, “Dari Surabaya ke Gresik : Pembangunan dan Perubahan Sosial 1953-1974”, Skripsi, Universitas Airlangga, 2011
- Setyorini, Susi, “Islam dalam Seni Damar Kurung Menurut Ika Ismoerdijahwati dan Dwi Indrawati di Kabupaten Gresik”, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya. 2014
- Sudirman, “Urgensi Pengembangan Adiwiyata bagi Pengembangan Pesantren”, Tesis, UIN Sulthan Syarif Kasim Riau, 2017
- Ummah, Salimatul, “Komunikasi Transendental Tradisi Macanan dalam Perspektif Mulla Sadra (Studi di Desa Kisik Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)”, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2021
- Wahyu, Tri Yantari S, “Eksistensi Warnet Cafe Er, Mr dan Je Terhadap Perubahan Sosial dan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Dusun Mrican Baru, Catur Tunggal, Depok, Sleman)”, Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012
- Wisnu, “Terbentuknya Kabupaten Gresik Tahun 1974: Studi Tentang Sejarah Perubahan Status Kabupaten Surabaya Menjadi Kabupaten Gresik”, Skripsi, Universitas Negeri Surabaya, 2005
- Yusuf, Fendi Saifulloh, *Habituasi Nilai-Nilai Keagamaan Remaja dalam Grup Banjari Al-Dzikri di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik*, (Skripsi, IAIN Kediri, 2023), 18.

Jurnal dan Artikel

- Adib, Mohammad, “Agen dan Struktur dalam Pandangan Pierre Bourdieu”, *BioKultur* 1, No. 2, (2012), 107, <https://media.neliti.com/media/publications/493156-portrait-of-maulanas-life-a-wealthy-inde-de903ea6.pdf>.
- Akbar, Hilman Fitrian, *dkk*, “Faktor-Faktor Ekologi Administrasi dalam Sistem Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, No. 12, (2021), 2753, <https://ejournal.stpmataram.ac.id/JIP/article/view/538>.
- Amane, Ade Putra Ode, *dkk*, *Reformasi Administrasi Publik*, (Purbalingga, Eureka Media Aksara, 2023), 21, <https://publikasi.ubl.ac.id/index.php/Monograf/catalog/download/104/121/511-1?inline=1>

- Arjanggi, Sutiono, "Pedagang Buah Madura di Gresik Tahun 1974-1990", *AVATARA: e-Jurnal Pendidikan Sejarah* 4, No. 1, (2016), <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/13855>
- Basundoro, Purnawan, "Industrialisasi, Perkembangan Kota, dan Respon Masyarakat", *Humaniora* 13, No. 2, 2001, <https://www.neliti.com/publications/11798/>
- Christianna, Aniendya, dkk, "The Impact of Sino-Japanese Musim Migration on Gresik's Visual Culture", *Migration Letters* 20, No. S4, (2023), <https://migrationletters.com/index.php/ml/article/view/3839/2572>
- Citra Fitrie Riany, Stefan Partelow, dan Ben Naget, "Governance Challenges for Indonesian pond Aquaculture: a Case Study of Milkfish Production in Gresik", *Frontiers in Aquaculture* 2, 2023, <https://doi.org/10.3389/faq.2023.1254593>
- Engkus, "Administrasi Publik dalam Pendekatan Ekologi", *JISPO* 7, 1, (2017), 94, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/article/view/1739>.
- Fadlilah, Umi dan Artono, "Sejarah Perubahan Status Administrasi Gresik dari Kabupaten Surabaya ke Kabupaten Gresik Tahun 1974", *AVATARA: e-Jurnal Pendidikan Sejarah* 9, No. 1, (2020), <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/35373/31447>
- Goa, Lorentius, "Perubahan Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat", *SAPA: Jurnal Kateketik dan Pastoral* 2, No. 2, (2017), <https://e-journal.stp-ipi.ac.id/index.php/sapa/article/view/40>
- Hadi, Achmad, dkk, "Sustainability Analysis of Industrial Estate Development in the Gresik Urban Area of East Java", *International Journal of Civil Engineering and Technology* 10, No. 8, 2019, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3450281.
- Hadi, Syamsul, "Tradisi Pesantren dan Kosmopolitanisme Islam di Masyarakat Pesisir Utara Jawa", *MUQODDIMA: Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi* 2, No. 1, 2021, <https://journal.unusia.ac.id/index.php/Muqoddima/article/download/233/185/652>
- Hafizh, Abdullah dan Artono, "Perkembangan Kerajaan Giri Kedaton Tahun 1548-1605", *AVATARA e-jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol, 11, No. 1, 2021, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/41852/36003>
- Herdiani, Een, "Metode Sejarah dalam Penelitian Tari", *Jurnal Seni Makalangan* 3, No. 2, (2016), <https://jurnal.isbi.ac.id/index.php/makalangan/article/view/889>
- Husu, Hanna-Mari, "Rethinking incumbency: Utilising Bourdieu's field, capital, and habitus to explain energy transitions", *Energy Research & Social Science* 93, (2022), 3, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629622003280>.

- Mustolehudin, “Merawat Tradisi Membangun Harmoni: Tinjauan Sosiologis Tradisi Haul dan Sedekah Bumi di Gresik”, *Jurnal Multikultural dan Multireligius* 13, No. 3, 2014, <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/110>.
- Ome, Rosdiana Agustina, Sholikhah Retno H, dan Amithya Irma K, “Transformasi Spacial Morfologi dan Zonifikasi Wilayah Peri Urban Kota Yogyakarta”, *MATRA* 4, No. 1, (2023), <https://journal.itny.ac.id/index.php/matra/article/view/1270>
- Peng, Wen-shien, “A Critique of Fred W. Riggs Ecology of Public Administration”, *Internasional Public Management Review* 9, No. 1, (2008), 214, <https://ipmr.net/index.php/ipmr/article/view/51>.
- Rosana, Ellya, “Modernisasi Dalam Perspektif Perubahan Sosial”, *Al-AdYan* 10, No. 1, (2015), <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan/article/view/1423>
- Seno, Ramadhani Haryo, “Strategi Reformasi Administrasi dan Kepemimpinan”, *Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani* 7, No. 2, (2020), 115, <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/1061>
- Siregar, Mengihut, “Teori “Gado-gado” Pierre Felix- Bourdieu”, *Jurnal Studi Kultural* 1, No. 2, (2016), 80, <https://erepository.uwks.ac.id/16679/1/3.2.pdf>.
- Siti Mufarohah dan Aminuddin Kasdi, “Aspek-Aspek Historis Tradisi Sanggring (Kolak Ayam) di Desa Gumeno Kabupaten Gresik”, *AVATARA: e-Jurnal Pendidikan Sejarah* 2, No. 3, 2014, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/9206>.
- Sukmana, Wulan Juliani, “Metode Penelitian Sejarah”, *Seri Publikai Pembelajaran* 2, No. 2, (2021), <https://www.researchgate.net/publication/351097486>
- Suriadi, Hari, dkk, “Sejarah Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia”, *Jurnal Media Ilmu* 2, No. 2, (2023), <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/mediailmu/article/view/4974>
- Suryanullah, Ahmad Sholehuddin, “Gagasan Kolonial Tentang Permasalahan Lingkungan di Gresik pada Paruh Kedua Abad XIX”, *Historiography* 5, No. 1, 2025, <https://journal2.um.ac.id/index.php/JDS/article/download/57787/pdf>
- Syukron, Aris, “Perbandingan Metode Bandongan dan Sorongan dalam Memahami Kitab Safinatunnajah”, *Tsaqafatuna: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2, No.1, 2020, <https://jurnal.stit-buntetpesantren.ac.id/index.php/tsaqafatuna/article/download/37/17/159>
- Trilestari, Endang Wirjatmi, “Reformasi Administrasi dengan Pendekatan “Systems Thingking” Mengkonstruksi Birokrasi dalam Mengatasi Kompleksitas

Permasalahan untuk Suatu Perubahan”, *Jurnal Ilmu Administrasi* 5, No. 3, 2008, 219, <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/448>

Website

Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Gresik, “Periodesasi Sejarah Gresik”, diakses 20 April 2025, <https://disparekrafbudpora.gresikkab.go.id/detailpost/periodesasi-sejarah-gresik>

Pemerintah Kabupaten Gresik, “Kondisi Sejarah Kabupaten Gresik”, diakses pada 1 Maret 2025. <https://gresikkab.go.id/Kondisie/history>

Purba, Albert Benjamin Febrian, “Sejarah Perubahan Kabupaten Surabaya ke Kabupaten Gresik”, diakses pada 13 Januari 2024, <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-7341025/sejarah-perubahan-kabupaten-surabaya-jadi-kabupaten-gresik>

Purwanto, Antonius, “Kabupaten Gresik: Kota Santri dan Geliat Industri”, diakses pada 28 Februari 2025. <https://www.kompas.id/baca/daerah/2021/11/08/kabupaten-gresik-kota-santri-dan-geliat-industri>

Ebook

Basundoro, Purnawan, *Sejarah Pemerintahan Kota Surabaya Sejak Masa Kolonial sampai Masa Reformasi (1906-2012)*, Yogyakarta: Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga dan ELMATERA Publishing, 2012, <https://repository.unair.ac.id/91937/>

Biro Pusat Statistik, *Sensus Perindustrian Tahun 1964: Hasil Pengolahan Sektor Industri Besar dan Sedang Djawa Timur* (Djakarta: Bagian Sensus Perindustrian, Biro Sensus, 1964), 21. <https://jatim.bps.go.id/id/publication/1970/04/06/c713e00bea80491773dcffb2>

Eysinga, P. P. Rooda Van, *Handboek der Land- en Volkenkunde, Geschied-, Taal-, Aardrijks- en Staatskunde van Nederlandsch Indie*, Amsterdam: L. Van Bakkenes, 1850, <https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/132691>

Gelder, W. van dan C. Lekkerkerker, *Schoolatlas van Nederlandsch-Indië*, edisi ke-19 Groningen: J.B. Wolters, 1928, <https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?coll=boeken&identifier=MMKB24:068487000:0002>

Hirt, Sonia dan Kiril Stanilov, *Twenty Years of Transition: The Evolution of Urban Planning in Eastern Europe and the Former Soviet Union 1989–2009*, Nairobi: UN-HABITAT, 2009, https://www.researchgate.net/publication/271586297_Twenty_Years_of_Transition_The_Evolution_of_Urban_Planning_in_Eastern_Europe_and_the_Former_Soviet_Union_1989-2009

Jawa Timur dalam Angka 1970, Surabaya, Sensus dan Statistika Propinsi Djawa Timur, 1971,

<https://jatim.bps.go.id/id/publication/1971/05/14/36b2de9c05561e3fb0777e37>

Purnamasari, Iin, dan A. Y. Soegeng Ysh, *Sejarah Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dalam Lima Masa*, Yogyakarta, Magnum Pustaka Utama, 2021,

<https://eprints.upgris.ac.id/2781/1/sejarah%20pendidikan%20lima%20masa%20komplit.pdf%20BU%20IIN.pdf>

Wasino dan Endang Sri Hartatik, *Metode Penelitian Sejarah (Dari Riset Hingga Pebulisan)*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018,

<http://eprints.undip.ac.id/70451/1/>

Koran

De Indische Courant Van Woensdag. Berita De regentschapsraad tanggal 2 Februari 1935

De Indische Courant. Berita De Nieuwe Kaboepaten aan Genteng-Kali tanggal 15 Maret 1940

De Indische Courant. Berita De Nieuwe Regentswoning: Autorisatie voor den bouw verleend tanggal 7 Desember 1938

De Indische Courant. Berita GRISSEE tanggal 17 Maret 1938

De Indische Courant. Berita Het Regentschap tanggal 28 Oktober 1936

De Indische Courant. Berita Oost-Java Nieuws tanggal 12 Juni 1935

De Locomotif. Berita Soerabaia's Bupati tanggal 8 Mei 1935

Het Nieuwsblad voor Sumatra. Berita Cementfabriek in Grissee tanggal 1 Oktober 1951

Soerabaiasch handelsblad. Berita Grissee : Bestuursveranderingen tanggal 1 Desember 1937

Soerabaiasch Handelsblad. Berita Het Vergroote Regentschap Soerabaia tanggal 12 Juni 1935

Winschoter Courant : Dagblad voor Oostelijk Groningen. Berita President Soekarno opened cementfabriek tanggal 8 Agustus 1957

Wawancara

Pak Eko Jarwanto, Sejarawan Gresik, diwawancarai oleh Penulis, Gresik 28 Mei 2025

Pak Kris Adji, Budayawan Gresik, diwawancarai oleh Penulis, Gresik 30 April 2025

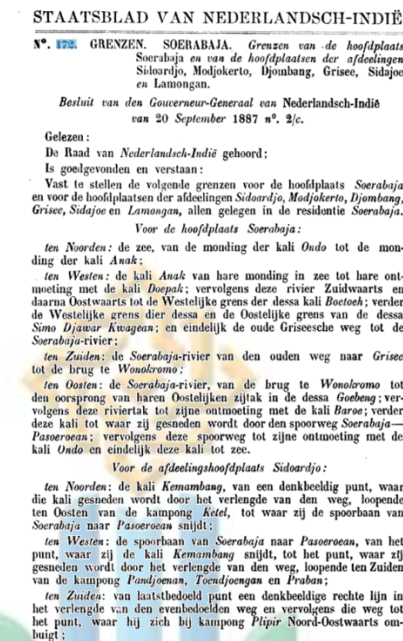
Pak Toha, Budayawan Gresik, diwawancarai oleh Penulis, Gresik, 25 Mei 2025

LAMPIRAN-LAMPIRAN

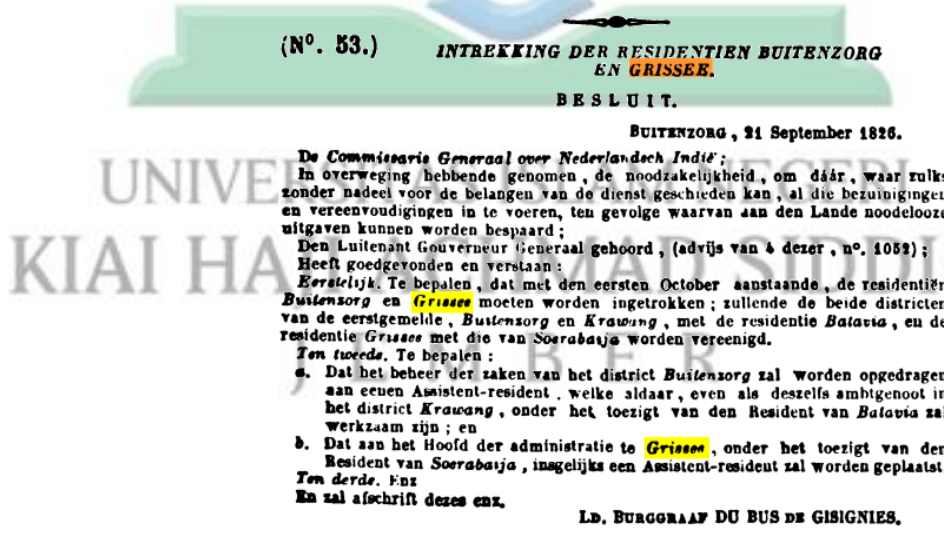
Tahun - tahun penting :

- Tahun 1934** : Penghapusan dan penggabungan status Kabupaten Gresik ke dalam wilayah administratif Kabupaten Surabaya melalui *Staatsblad* 1934 No. 749 yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.
- Tahun 1935** : Gresik ditetapkan sebagai pusat pemerintahan sementara Kabupaten Surabaya yang baru dibentuk
- Tahun 1938** : Pemerintah kolonial resmi memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Surabaya dari Gresik ke *Aloonstraat* No. 15 Surabaya
- Tahun 1940** : Pemerintah kolonial Hindia Belanda meresmikan kompleks rumah dinas dan kantor bupati di kawasan Genteng Kali, Surabaya
- Tahun 1950** : Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia, pusat pemerintahan Kabupaten Surabaya dipindahkan kembali dari Genteng Kali Surabaya ke Gresik
- Tahun 1953-1957** : Pemerintah Indonesia mendirikan Pabrik Semen Gresik pada 1953, kemudian diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 7 Agustus 1957, menjadi titik awal kebangkitan ekonomi Gresik.
- Tahun 1965** : Lima kecamatan dari wilayah Kabupaten Surabaya, yakni Kecamatan Wonocolo, Sukolilo, Rungkut, Tandes, dan Karangpilang, dipisahkan dan dimasukkan ke dalam wilayah administratif Kotamadya Surabaya untuk penyesuaian struktur kota.
- Tahun 1974** : Pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 yang secara resmi memisahkan Gresik dari Kabupaten Surabaya dan menetapkan kembali sebagai kabupaten mandiri

Dokumen / Gambar



Gambar 1 Staatsblad van Nederlandsch-Indië No. 172 Tahun 1887

(Sumber : <https://play.google.com/store/books/details?id=2dQrAQAAMAAJ>)

Gambar 2 Staatsblad van Nederlandsch-Indië No. 53 Tahun 1826

(Sumber : <https://www.delpher.nl/nl/kranten/>. Staatsblad van Nederlandsch-Indië van 1816-1845)

Afdeeling Grisse.

Resident. H. M. van Altena, (vd.), 2 Nov. 1930.
Afdeelingsscretaris (kantorhoofd). M. F. Pieter, 2 Maart 1929.
Commies, (1c). J. C. W. F. Pelle, 5 Juli 1929.
Assistent-resident Lamongan. W. Huson, 28 Aug. 1930.
Hoofdpolitieopziener. J. Jahn, 27 Aug. 1927.
Detachement veldpolitie Lamongan:
Hoofdpolitieopziener. P. P. Altorff, April 1928.

GEWESTELIJK BESTUUR (PROV. OOST-JAVA). 363

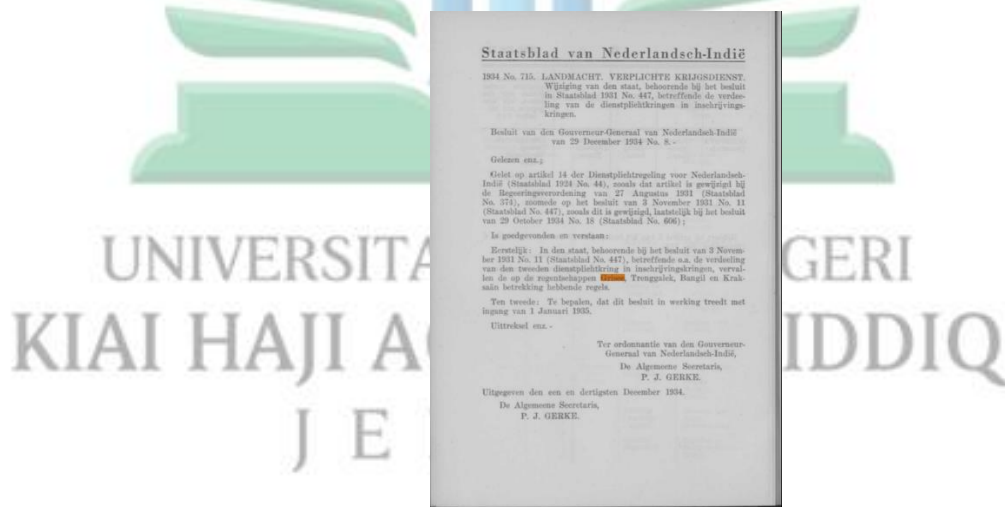
Regentschap Grisse.

Regent. Raden Adipati Ario Soerowinoto, (G. S.), 15 Aug. 1917.
Patih. Mas Soetardjo, o.g. Mas Kartoadikoesomo (B. Sch.), 24 Sept. 1929.
Regentschapsscretaris. Ede kl. Raden Kodrat Samadikoen o.g. Sastrodinoto, 4 April 1929.
Wedana van het district:
Grisse. Kiahi Ngabehi Ardjoediprodjo, 28 Sept. 1929.
Tjerme. Raden Pandji Goerdadikoesomo, (B. Sch.), 30 Nov. 1928.
Sidoarjo. Raden Soehani, 25 Aug. 1928.
Karangbinangun. Raden Abdoelchamid, 15 Maart 1930.
Luitenant der Chinezen. Han Khoe Liang, (Z. St.), 19 Sept. 1929.
Kapitein titulaire der Arabieren. Said Hoessin bin Moehamad bin Oemar bin Sjahab, 22 Mei 1913.

Gambar 3 Struktur Pemerintahan *Afdeling* Gresik dan Kabupaten Gresik tahun 1931

(Sumber : *Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië*, Dutch East Indies.

<https://play.google.com/store/books/details?id=VjUNAQAIAAJ>)



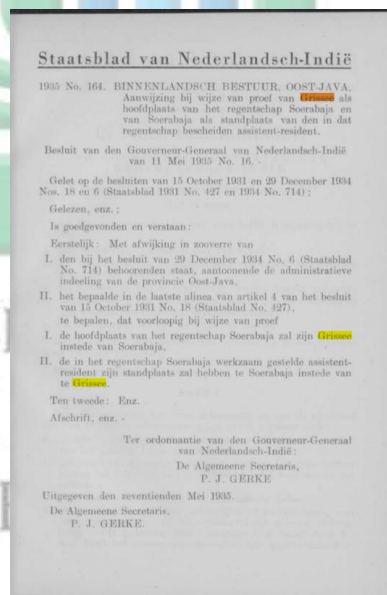
Gambar 4 *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* No. 715 Tahun 1934

(Sumber : <https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/>. *Staatsblad van Nederlandsch-Indië voor ...*, 1934 tanggal 01 Januari 1934)



Gambar 5 Koran terbitan Kolonial Belanda tentang Pelantikan Bupati Surabaya pertama dan penetapan Gresik sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Surabaya

(Sumber : <https://www.delpher.nl/nl/kranten/>. *De Indische Courant* tanggal 12 Juni 1935)



Gambar 6 *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* No. 164 Tahun 1935

(Sumber : <https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/>. *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* voor ..., 1935 tanggal 01 Januari 1935)



Gambar 7 Koran terbitan Kolonial Belanda tentang izin resmi untuk melakukan renovasi terhadap rumah milik pemerintah di kawasan Genteng

(Sumber : <https://www.delpher.nl/nl/kranten/>. *De Indische Courant* tanggal 7 Desember 1938)



Gambar 8 Koran terbitan Kolonial Belanda tentang peresmian pendopo baru Kabupaten Surabaya di Genteng kali, Surabaya

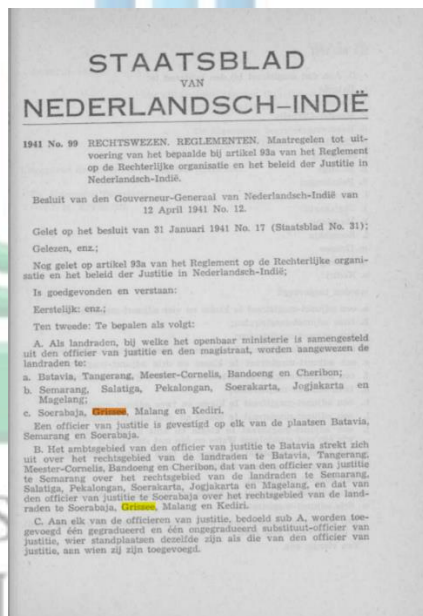
(Sumber : <https://www.delpher.nl/nl/kranten/>. *De Indische Courant* tanggal 15 Maret 1940)

Regentschap Soerabaja.

Regent: Raden Toemenggoeng Ario Moesono, 26 Nov. 1937.
Patih. Raden Sabekti o.g. Raden Wirjokoesoemo (B. Sch.), (G. St.), 23 Sept. 1933.
Regentschapssecretaris 1e klasse. Raden Wahjoedi o.g. Raden Reksodiwidjojo, 21 Mei 1932.
Adjunct-regentschapssecretaris. Mas Soeprapto o.g. Mas Djojoadisoeprapto, 1 Jan. 1935.
Wedana van het district:
Kota Soerabaja. Raden Setijono, 16 Oct. 1936.
Djabakotta. Mat Hasim, 25 Nov. 1938.
Goenoengkendeng. Raden Rachmad, 21 Oct. 1938.
Bawean. Raden Joeswono, (tijd. wd.), 30 Sept. 1940.
Grissee. Raden Soepardi Soerjongingprodjo, 1 Jan. 1935.
Tjermee. Mas Dirdjosepoetro al. Mas Moehadji, 6 Mei 1940.
Sidajoe. Kiai Imanadi o.g. Kiai Imanadiprodjo, 23 Maart 1939.
Kapitein der Arabieren. Sech Alie bin Mohamad Bobsaid, 3 Dec. 1937.
Hoofd der Voor-Indiërs te Soerabaja. Kundan T. Daryanani, 10 Nov. 1938.

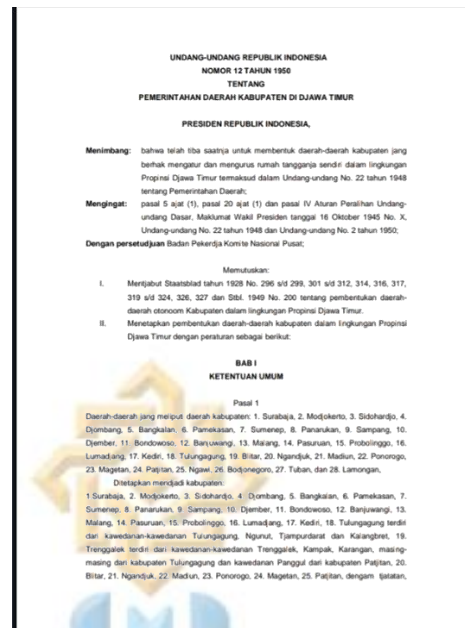
Gambar 9 Struktur pemerintahan Kabupaten Surabaya 1941

(Sumber : *Regeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië* tahun 1941, Dutch East Indies. <https://play.google.com/store/books/details?id=fBsPAQAIAAJ>)



Gambar 10 Staatsblad van Nederlandsch-Indië No. 99 Tahun 1941

(Sumber : <https://www.delfpher.nl/nl/tijdschriften/>. *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* voor ..., 1941 tanggal 01 Januari 1941)



Gambar 11 Undang-undang no. 12 tahun 1950

(Sumber : <https://peraturan.bpk.go.id/Details/64024/uu-no-12-tahun-1950>)



Gambar 12 Koran terbitan Kolonial Belanda tentang rencana pembangunan Pabrik Semen Gresik

(Sumber : <https://www.delpher.nl/nl/kranten/>, *Het Nieuwsblad voor Sumatra* tanggal 1 Oktober 1951)



Gambar 13 Koran terbitan Kolonial Belanda tentang peresmian Pabrik Semen Gresik oleh Ir. Soekarno

(Sumber : <https://www.delpher.nl/nl/kranten/>. Winschoter Courant : Dagblad voor Oostelijk Groningen tanggal 8 Agustus 1957)



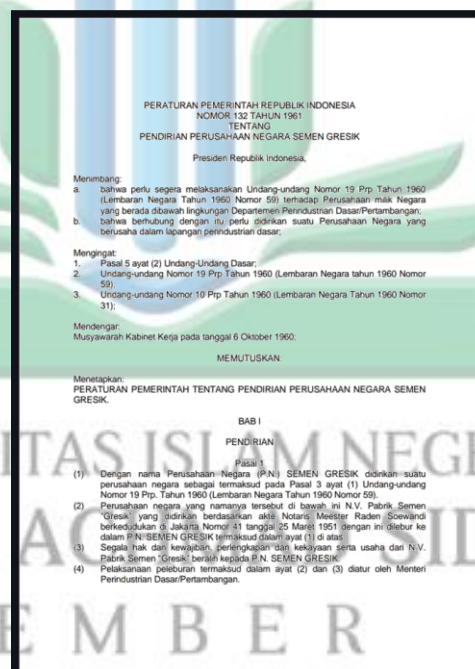
Gambar 14 Batas Kabupaten Surabaya terletak di Desa Mojowuku, Kec. Kedamean, Gresik

(Sumber : Dokumen Pribadi)



Gambar 15 Peletakan batu pertama GNI Gresik oleh Bupati Surabaya tahun 1960

(Sumber : Dokumen Pribadi)



Gambar 16 Peraturan Pemerintah no. 132 tahun 1961

(Sumber : <https://peraturan.bpk.go.id/Details/74546/pp-no-132-tahun-1961>)

- 61 -

Tabel 15. (lanjutan).
Jumlah Tingkat II dalam TIRU.

No. Urut	Daerah Tingkat II/ Kabupaten	Jumlah Rakyat Rural	Jumlah Rakyat Urban	Jumlah Rakyat Semi- Urban	Jumlah Rakyat Total	Jumlah Rakyat Total	Jumlah Rakyat Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.	Kab. Ponorogo	7.777	5	690	1.698	-	-
	P.P., P.P., P.P.	6	567	647	2	74	-
	G.P.	4	84	92	5	95	-
	Pu.	8	272	280	-	-	-
	Kepernat	-	-	-	-	-	-
	Kongsi	1	-	12	-	-	-
	Pemerintahan	29	29	605	24	601	-
	Jumlah	55	545	5.725	31	568	-
8.	Kab. Ponorogo	7.777	1	333	35	-	-
	P.P., P.P., P.P.	4	94	228	1	95	-
	G.P.	4	145	110	5	155	-
	Pu.	8	55	19	2	55	-
	Kepernat	-	-	-	-	-	-
	Kongsi	-	-	-	-	-	-
	Pemerintahan	33	145	607	7	32	-
	Jumlah	44	1.375	1.009	33	378	-
9.	Kab. Ponorogo	7.777	5	1.095	23.507	-	-
	P.P., P.P., P.P.	20	2.475	1.001	5	35	-
	G.P.	35	821	975	6	809	-
	Pu.	4	267	504	3	45	-
	Kepernat	-	-	-	-	-	-
	Kongsi	3	49	60	2	36	-
	Pemerintahan	37	809	1.475	355	6.012	-
	Jumlah	86	6.375	28.336	353	6.308	-

Gambar 17 Data Industri di Kabupaten Surabaya dalam dokumen Sensus Perindustrian 1964

(Sumber :

<https://jatim.bps.go.id/publication/1970/04/06/c713e00bea80491773dcffb2>)

- 62 -

Tabel 16. : Luas Daerah dan Penduduk Jawa Timur, 1970.

No.	Kabupaten / Kecamatan	Luas Daerah (km ²)	Penduduk 1970 (Juta)	Penduduk 1970 (Juta)
1.	Kab. Blora	274,06	1.007.945	1.072.304
2.	" Blora	69,03	331.450	396.764
3.	" Blora	8,27	12.127	13.125
4.	" Blora	15,40	156.268	167.469
5.	" Blora	7,75	51.732	57.440
6.	" Blora	14,30	47.477	51.542
7.	" Blora	112,59	31.248	33.254
8.	" Blora	27,04	48.565	51.505
9.	" Blora	11,17	44.100	46.205
10.	" Blora	59,55	501.091	541.205
11.	" Blora	121,11	9.467.10	9.776.178
12.	" Blora	11,17	86.182	90.157
13.	" Blora	11,17	90.171	93.065
14.	" Blora	11,17	77.777	80.000
15.	" Blora	1,00	64.164	66.006
16.	" Blora	1,00	50.488	52.148
17.	" Blora	1,00	50.488	52.148
18.	" Blora	1,00	50.488	52.148
19.	" Blora	1,00	50.488	52.148
20.	" Blora	1,00	50.488	52.148
21.	" Blora	1,00	50.488	52.148
22.	" Blora	1,00	50.488	52.148
23.	" Blora	1,00	50.488	52.148
24.	" Blora	1,00	50.488	52.148
25.	" Blora	1,00	50.488	52.148
26.	" Blora	1,00	50.488	52.148
27.	" Blora	1,00	50.488	52.148
28.	" Blora	1,00	50.488	52.148
29.	" Blora	1,00	50.488	52.148
30.	" Blora	1,00	50.488	52.148
31.	" Blora	1,00	50.488	52.148
32.	" Blora	1,00	50.488	52.148
33.	" Blora	1,00	50.488	52.148
34.	" Blora	1,00	50.488	52.148
35.	" Blora	1,00	50.488	52.148
36.	" Blora	1,00	50.488	52.148
37.	" Blora	1,00	50.488	52.148
38.	" Blora	1,00	50.488	52.148
39.	" Blora	1,00	50.488	52.148
40.	" Blora	1,00	50.488	52.148
41.	" Blora	1,00	50.488	52.148
42.	" Blora	1,00	50.488	52.148
43.	" Blora	1,00	50.488	52.148
44.	" Blora	1,00	50.488	52.148
45.	" Blora	1,00	50.488	52.148
46.	" Blora	1,00	50.488	52.148
47.	" Blora	1,00	50.488	52.148
48.	" Blora	1,00	50.488	52.148
49.	" Blora	1,00	50.488	52.148
50.	" Blora	1,00	50.488	52.148
51.	" Blora	1,00	50.488	52.148
52.	" Blora	1,00	50.488	52.148
53.	" Blora	1,00	50.488	52.148
54.	" Blora	1,00	50.488	52.148
55.	" Blora	1,00	50.488	52.148
56.	" Blora	1,00	50.488	52.148
57.	" Blora	1,00	50.488	52.148
58.	" Blora	1,00	50.488	52.148
59.	" Blora	1,00	50.488	52.148
60.	" Blora	1,00	50.488	52.148
61.	" Blora	1,00	50.488	52.148
62.	" Blora	1,00	50.488	52.148
63.	" Blora	1,00	50.488	52.148
64.	" Blora	1,00	50.488	52.148
65.	" Blora	1,00	50.488	52.148
66.	" Blora	1,00	50.488	52.148
67.	" Blora	1,00	50.488	52.148
68.	" Blora	1,00	50.488	52.148
69.	" Blora	1,00	50.488	52.148
70.	" Blora	1,00	50.488	52.148
71.	" Blora	1,00	50.488	52.148
72.	" Blora	1,00	50.488	52.148
73.	" Blora	1,00	50.488	52.148
74.	" Blora	1,00	50.488	52.148
75.	" Blora	1,00	50.488	52.148
76.	" Blora	1,00	50.488	52.148
77.	" Blora	1,00	50.488	52.148
78.	" Blora	1,00	50.488	52.148
79.	" Blora	1,00	50.488	52.148
80.	" Blora	1,00	50.488	52.148
81.	" Blora	1,00	50.488	52.148
82.	" Blora	1,00	50.488	52.148
83.	" Blora	1,00	50.488	52.148
84.	" Blora	1,00	50.488	52.148
85.	" Blora	1,00	50.488	52.148
86.	" Blora	1,00	50.488	52.148
87.	" Blora	1,00	50.488	52.148
88.	" Blora	1,00	50.488	52.148
89.	" Blora	1,00	50.488	52.148
90.	" Blora	1,00	50.488	52.148
91.	" Blora	1,00	50.488	52.148
92.	" Blora	1,00	50.488	52.148
93.	" Blora	1,00	50.488	52.148
94.	" Blora	1,00	50.488	52.148
95.	" Blora	1,00	50.488	52.148
96.	" Blora	1,00	50.488	52.148
97.	" Blora	1,00	50.488	52.148
98.	" Blora	1,00	50.488	52.148
99.	" Blora	1,00	50.488	52.148
100.	" Blora	1,00	50.488	52.148

Gambar 18 Data luas wilayah dan sensus penduduk Kabupaten dalam dokumen Jawa Timur dalam angka tahun 1970

(Sumber :

<https://jatim.bps.go.id/publication/1971/05/14/36b2de9c05561e3fb0777e37>)



Gambar 19 Undang-undang no. 2 Tahun 1965

(Sumber : <https://peraturan.bpk.go.id/Details/49971>)



Gambar 20 Wawancara dengan Pak Kris Adji selaku Budayawan Gresik, di rumahnya pada 30 April 2025

(Sumber : Dokumen pribadi)



Gambar 18 Wawancara dengan Pak Toha selaku Budayawan Gresik, dirumahnya pada tanggal 25 Mei 2025

(Sumber : Dokumen pribadi)



Gambar 19 Wawancara dengan Pak Eko Jarwanto selaku Sejarawan Gresik, di SMA As-Sa'adah Bunga, Gresik pada 28 Mei

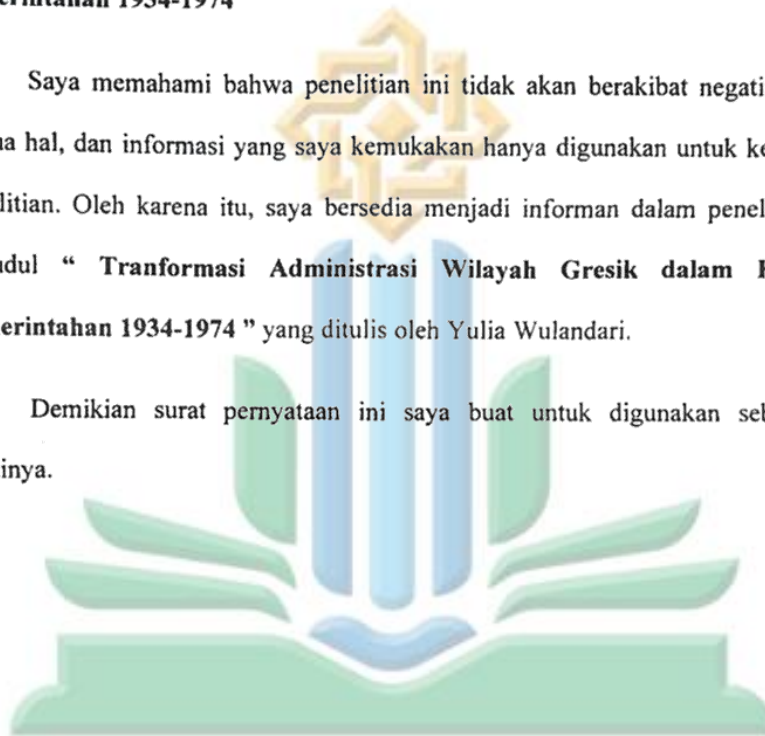
(Sumber : Dokumen pribadi)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Yulia Wulandari dengan judul penelitian “ **Tranformasi Administrasi Wilayah Gresik dalam Kebijakan Pemerintahan 1934-1974** ”

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap semua hal, dan informasi yang saya kemukakan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan dalam penelitian yang berjudul “ **Tranformasi Administrasi Wilayah Gresik dalam Kebijakan Pemerintahan 1934-1974** ” yang ditulis oleh Yulia Wulandari.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Gresik, 30 April 2025

Mengetahui

Kris Adji AW

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Yulia Wulandari dengan judul penelitian **"Tranformasi Administrasi Wilayah Gresik dalam Kebijakan Pemerintahan 1934-1974"**.

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap semua hal, dan informasi yang saya kemukakan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan dalam penelitian yang berjudul **"Tranformasi Administrasi Wilayah Gresik dalam Kebijakan Pemerintahan 1934-1974"** yang ditulis oleh Yulia Wulandari.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gresik, Mei 2025

Mengetahui



LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Yulia Wulandari dengan judul penelitian **“Tranformasi Administrasi Wilayah Gresik dalam Kebijakan Pemerintahan 1934-1974”**

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap semua hal, dan informasi yang saya kemukakan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan dalam penelitian yang berjudul **“Tranformasi Administrasi Wilayah Gresik dalam Kebijakan Pemerintahan 1934-1974”** yang ditulis oleh Yulia Wulandari.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Gresik, Mei 2025

Mengetahui



Eko Jarwanto

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulia Wulandari

Nim : 211104040029

Program Studi : Sejarah dan Peradaban Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Institusi : Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, Oktober 2025

Saya menyatakan



Yulia Wulandari

NIM 211104040029

BIODATA PENULIS



A. Identitas Penulis

Nama : Yulia Wulandari
Tempat/Tanggal lahir : Gresik, 15 Juli 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : RT. 2 RW. 1, Dusun Genengan, Desa Ngasin,
Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi : Sejarah dan Peradaban Islam
NIM : 211104040029

B. Riwayat Pendidikan

TK : TK Al-Amin Surabaya
SD : SD Islam Darul Muttaqin Genengan
MTS : MTs Negeri Gresik
MA : MAN 2 Gresik

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota PMR Wira MAN 2 Gresik Periode 2018-2021
2. Anggota Pramuka Ambalan R.A Kartini MAN 2 Gresik Periode 2018-2020
3. Anggota Media Center Fakultas Syariah Periode 2022
4. Anggota Satgas KPPS UIN KH. Achmad Siddiq Jember